



H. FACHRORI UMAR
GUBERNUR JAMBI



H. SUDIRMAN
PJ. SEKDA PROVINSI JAMBI

LPPD 2020

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih mandiri karena daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pencapaian tujuan otonomi tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintahan wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama dengan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Bagi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 kepada Pemerintah untuk melihat pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka perwujudan NAWACITA dan JAMBI TUNTAS 2021.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2020 ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap lapisan masyarakat dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam penyusunan program maupun kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencapai JAMBI TUNTAS 2021.

Jambi, Februari 2021

GUBERNUR JAMBI,



DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	63
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Capaian Kinerja Makro	66
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	66
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	66
2.1.3 Angka Pengangguran.....	68
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	68
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	72
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	73
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	73
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	116
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	126
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	127
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	233
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	234
3.3 Permasalahan dan Kendala	235
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	235
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 Urusan Pendidikan	237

4.2 Urusan Kesehatan	242
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	250
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	252
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	254
4.6 Urusan Sosial	256

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi, 2015-2019	4
Tabel 1.2	Klarifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi	5
Tabel 1.3	Tingkat kepadatan penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2019	8
Tabel 1.5	Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi	8
Tabel 1.6	Rekapitulasi Jumlah PNS Se-Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.7	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
Tabel 2.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2015-2019	67
Tabel 2.2	penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Jambi 2019	68
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi Tahun 2011-2015.....	69
Tabel 2.4	Nilai Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2015 ADHK Tahun 2010 Provinsi Jambi	70
Tabel 2.5	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	128
Tabel 2.6	Realisasi Capaian Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2020	129
Tabel 2.7	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	131
Tabel 2.8	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	133
Tabel 2.9	Kategori Penilaian SAKIP	135
Tabel 2.10	Realisasi Capaian Komponen Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	137
Tabel 2.11	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020	138
Tabel 2.12	Capaian IPM Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	142

Tabel 2.13	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020	146
Tabel 2.14	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.15	Intervensi Gizi Spesifik Yang Dilaksanakan Di Provinsi Jambi Tahun 2020	151
Tabel 2.16	Capaian IDG Sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan Di Berbagai Bidang Kehidupan	157
Tabel 2.17	Capaian Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah	160
Tabel 2.18	Perkembangan Skor Indikator, 2018-2019	165
Tabel 2.19	Capaian Total Factor Productivity Sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity	168
Tabel 2.20	Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder Terhadap PDRB Sebagai Indikator Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi Yang Mampu Memberikan Nilai Tambah	170
Tabel 2.21	Capaian indikator Ketersediaan Energi Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan	173
Tabel 2.22	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	174
Tabel 2.23	Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2020	175
Tabel 2.24	Capaian Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Yang Menyentuh Terhadap Akses Dan Sentra Perekonomian	183
Tabel 2.25	Capaian Rasio Elektrifikasi Sebagai indikator Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik	187
Tabel 2.26	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	187
Tabel 2.27	Lokasi Potensi Air Terjun Di Provinsi Jambi	188
Tabel 2.28	Data Potensi energy Potensial Adi di Kabupaten Kerinci	189
Tabel 2.29	Capaian Sasaran Meningkatnya Akse Terhadap Air Bersih Tahun 2020	192

Tabel 2.30	Capaian Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Sebagai Indikator Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi Tahun 2020	194
Tabel 2.31	Capaian indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDA Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan	196
Tabel 2.32	Capaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan	203
Tabel 2.33	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020	204
Tabel 2.34	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Pengguran.....	207
Tabel 2.35	Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Sebagai Indikator Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	211
Tabel 2.36	Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran	215
Tabel 2.37	Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Realisasi Kinerja	216
Tabel 4.1	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan	237
Tabel 4.2	Capaian SPM Pendidikan Menengah	238
Tabel 4.3	Capaian SPM Pendidikan Khusus	239
Tabel 4.4	Nama Program dan Pagu Serta Realisasi Anggaran Tahun 2020	240
Tabel 4.5	Sumber dan pagu Serta Realisasi Anggaran	246
Tabel 4.6	Sumber dan Pagu Serta Realisasi Anggaran	247
Tabel 4.7	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama	259
Tabel 4.8	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua	260
Tabel 4.9	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga	261
Tabel 4.10	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat	262
Tabel 4.11	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019	6
Gambar 1.2 Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	16
Gambar 2.1 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ...	71
Gambar 2.2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	130
Gambar 2.3 Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta Komponen pengungkit dan komponen hasilnya	132
Gambar 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	240

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 ayat (3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010, maka pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, harus memuat visi misi dan program kepala daerah terpilih, dan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Strategis OPD dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 ini, dijelaskan bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

LPPD yang disusun, memiliki makna sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Karena melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai

masukannya untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam LPPD yang disampaikan ini, diuraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur terpilih periode 2016–2021, juga dilampirkan penyerapan dana program dan kegiatan OPD selama tahun 2020, sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Pada Tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai Tahun 2012 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

b. Kondisi Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0° 74' - 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' - 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

Adapun batas wilayah Provinsi Jambi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Utara : berbatasan dengan Provinsi Riau dan sebagian dari Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Barat : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- 4) Timur : berbatasan dengan sebagian dari Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Luas Wilayah

Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2018 yang bersumber dari Jambi Dalam Angka sebanyak 143 Kecamatan, 1.399 Desa dan 163 Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan, desa dan kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 25 Kecamatan, 205 Desa dan 10 Kelurahan. Jumlah Kecamatan di Provinsi Jambi setiap Tahunnya dapat dilihat pada *Tabel 1.1* berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi, 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kerinci	16	16	16	16	16
Merangin	24	24	24	24	24
Sarolangun	10	10	10	10	10
Batang hari	8	8	8	8	8
Muaro Jambi	11	11	11	11	11
Tanjung Jabung Timur	11	11	11	11	11
Tanjung Jabung Barat	13	13	13	13	13
Tebo	12	12	12	12	12
Bungo	17	17	17	17	17
Kota Jambi	8	11	11	11	11
Kota Sungai Penuh	8	8	8	8	8
Jambi	138	141	141	141	141

Sumber: Jambi Dalam Angka 2020

3. Topografi

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (RTRWP Jambi 2013-2033,2013):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%).
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%);
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%).

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berikut *Tabel 1.2* tentang Karakteristik Ketinggian di Provinsi Jambi :

Tabel 1.2
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/
	Ha	%	Kabupaten
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari.
Dataran sedang (100 - 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (>500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Sepanjang tahun 2014, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 mencapai 12.609,3 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 26,8 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22,4 derajat celcius.

Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman

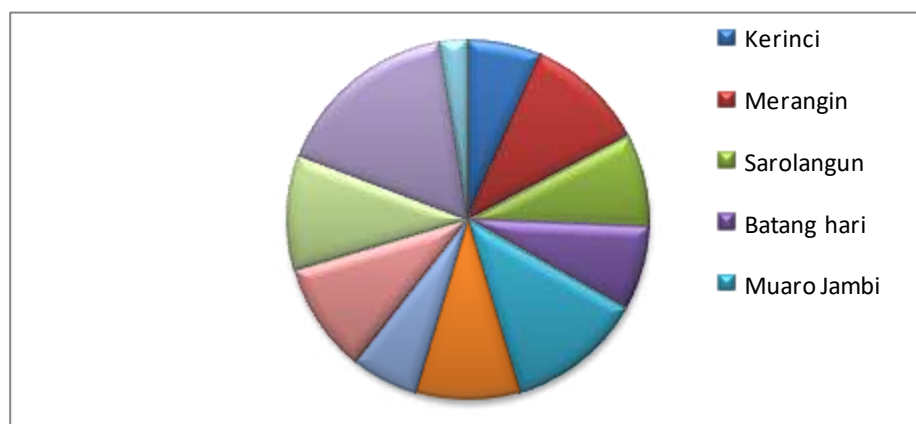
Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 sebanyak 3.677.894 jiwa, pada Tahun 2019 sebanyak 3.624.579 jiwa. Selama 1 (satu) tahun terjadi pertumbuhan sebesar 0.98%.

Gambar 1.1
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi, 2019



Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 2020

Dilihat dari kepadatan penduduk Provinsi Jambi berdasarkan luas wilayah, relatif seimbang diantara wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi) dengan wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin Sarolangun, Bungo, Tebo). Presentase kepadatan penduduk di kedua wilayah tersebut yaitu wilayah timur 54,02% dan wilayah barat 48,22%. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kota Jambi dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya dengan persentase 16,93%, selanjutnya kepadatan penduduk yang lebih rendah adalah Kota Sungai Penuh dengan persentase 2,56%.

Tabel 1.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Daratan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Kerinci	3.355,27	239.606	71,14
2.	Merangin	7.679,00	394.174	50,56
3.	Sarolangun	6.184,00	307.585	48,82
4.	Batang Hari	5.804,00	275.504	47,02
5.	Muaro Jambi	5.326,00	454.524	83,25
6.	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	221.619	40,40
7.	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	339.286	71,82
8.	Tebo	6.461,00	360.193	54,87
9.	Bungo	4.659,00	382.311	80,44
10.	Kota Jambi	205,43	611.353	2.943,76
11.	Kota Sungai Penuh	391,50	91.739	232,21
Jumlah/Total 2018		50.160,05	3.677894	3.724,38

Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 2020

Selanjutnya untuk jumlah penduduk Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tabel 1.4 yang ada dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Provinsi Jambi, 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	163.499	156.871	320.370
5-9	163.460	157.640	321.100
10-14	162.744	158.097	320.841
15-19	158.416	154.866	313.282
20-24	154.268	148.900	303.168
25-29	157.707	151.138	308.845
30-34	156.242	147.694	303.936
35-39	150.434	146.395	296.829
40-44	142.140	134.970	277.110
45-49	121.600	113.342	234.942
50-54	98.878	92.935	191.813
55-59	79.237	74.808	154.045
60-64	59.588	55.115	114.703
65-69	38.203	35.120	73.323
70-74	21.624	22.369	43.993
75+	20.814	25.465	46.279
Jambi	1.848.854	1.775.725	3.624.579

Jambi Dalam Angka Tahun 2020

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1._
Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi

No.	Nama Kabupaten dan Kota	Dasar Hukum	Tanggal Pembentukan
1.	Kabupaten Kerinci	UU No. 58 / 1958	10 November 1958
2.	Kabupaten Merangin	UU No. 18 / 1958	22 Desember 1949
3.	Kabupaten Sarolangun	UU No. 54 / 1999	10 Oktober 1999
4.	Kabupaten Batang Hari	UU No. 54 / 1999	1 Desember 1948
5.	Kabupaten Muaro Jambi	UU No. 54 / 1999	18 Oktober 1999
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	UU No. 54 / 1999	21 Oktober 1999
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	UU No. 07 / 1965	10 Agustus 1965
8.	Kabupaten Tebo	UU No. 54 / 1999	12 Oktober 1999
9.	Kabupaten Bungo	UU No. 18 / 1968	19 Oktober 1965
10.	Kota Jambi	UU No. 09 / 1956	6 Januari 1957
11.	Kota Sungai Penuh	UU No. 25 / 2008	8 Oktober 2009

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Organisasi pemerintahan di daerah pada prinsipnya dibentuk untuk mengakomodasikan kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah. Dalam upaya mendukung transformasi kewenangan dan kelembagaan sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU 33 No. Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengisyaratkan pembentukan daerah disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja. Organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menyediakan pelayanan dasar (basic services) dan pengembangan sektor unggulan (core competence). Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan dasar tetapi juga memajukan daerah berdasarkan sektor unggulan yang dimilikinya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Urusan pemerintah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Besaran organisasi perangkat daerah, sekurangnya juga harus mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota,

sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah perangkat daerah di Provinsi Jambi sebanyak 43 (empat puluh tiga) OPD yang terdiri dari :

1. Inspektorat Provinsi Jambi;
2. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
12. Rumah Sakit Umum Rd. Mattaher Provinsi Jambi;
13. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi;
14. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
16. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;
18. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
19. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Hortikultura Provinsi Jambi;
20. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
22. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
24. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi

25. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
28. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
30. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
31. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
32. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2020 berjumlah 11.007 orang terdiri dari 5.217 orang laki-laki dan 5.790 orang perempuan. Adapun Jumlah Aparatur Sipil Negara Se-Provinsi Jambi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1._

**REKAPITULASI JUMLAH PNS SE-PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO.	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Provinsi Jambi	5.217	5.790	11.007
2.	Kab. Muaro Jambi	2.259	3.283	5.542
3.	Kab. Batang Hari	2.092	2.632	4.724
4.	Kab. Sarolangun	2.038	2.375	4.413
5.	Kab. Merangin	2.547	3.173	5.720
6.	Kab. Bungo	2.205	2.646	4.851
7.	Kab. Tebo	1.798	2.193	3.991
8.	Kab. Tanjab Barat	1.875	2.146	4.021
9.	Kab. Tanjab Timur	1.800	1.845	3.645
10.	Kab. Kerinci	2.295	2.339	4.634
11.	Kota Sungai Penuh	1.175	1.525	2.700
12.	Kota Jambi	1.739	4.012	5.751
JUMLAH		27.040	33.959	60.999

Sumber : BKD Provinsi Jambi

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	4.176.315.760.182,78	4.388.378.087.520,71	105,08%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	1.360.986.764.131,78	1.522.832.793.387,59	111,89%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	1.157.871.072.636,78	1.292.729.048.514,00	111,65%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	8.605.407.970,00	8.339.716.803,00	96,91%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	31.212.590.404,00	29.549.357.836,82	94,67%
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	163.297.693.121,00	192.214.670.233,77	117,71%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LRA	2.813.320.996.051,00	2.862.888.575.956,00	101,76%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	2.799.553.812.051,00	2.849.121.391.956,00	101,77%
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak-LRA	145.854.624.568,00	152.642.024.299,00	104,65%
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA	218.414.454.483,00	291.967.549.326,00	133,68%
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.349.436.923.000,00	1.343.493.401.210,00	99,56%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	1.085.847.810.000,00	1.061.018.417.121,00	97,71%
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	13.767.184.000,00	13.767.184.000,00	100,00%
4.2.2.3	Dana Penyesuaian-LRA	13.767.184.000,00	13.767.184.000,00	100,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	2.008.000.000,00	2.656.718.177,12	132,31%
4.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	2.008.000.000,00	2.656.718.177,12	132,31%
5	BELANJA	3.851.759.326.797,72	3.764.965.251.275,71	97,75%
5.1	BELANJA OPERASI	3.037.710.623.111,59	2.905.154.150.172,34	95,64%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.443.168.934.492,09	1.391.740.608.295,29	96,44%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.312.604.838,50	743.319.115.296,05	82,02%
5.1.4	Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00%
5.1.5	Belanja Hibah	687.350.583.781,00	769.215.926.581,00	111,91%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	328.500.000,00	328.500.000,00	100,00%
5.2	BELANJA MODAL	628.761.734.829,54	699.907.145.949,37	111,32%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.505.947.670,00	6.220.174.625,00	95,61%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.019.844.119,00	118.489.020.138,00	91,84%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.664.155.082,40	156.737.111.509,42	95,77%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.845.524.514,14	293.376.749.341,70	97,52%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.680.063.444,00	125.038.140.335,25	435,98%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	46.200.000,00	45.950.000,00	99,46%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	185.286.968.856,59	159.903.955.154,00	86,30%
5.3.1	Belanja Tak Terduga	185.286.968.856,59	159.903.955.154,00	86,30%
6	TRANSFER	734.212.429.830,28	730.905.781.716,56	99,55%
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	634.365.509.830,28	631.105.361.716,56	99,49%
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	634.365.509.830,28	631.105.361.716,56	99,49%
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	99.846.920.000,00	99.800.420.000,00	99,95%
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	15.860.420.000,00	15.860.420.000,00	100,00%
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.986.500.000,00	83.940.000.000,00	99,94%
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00%
	SURFLUS/ (DEFISIT) -	409.655.996.445,22 -	107.492.945.471,56	26,24%
7	PEMBIAYAAN			0,00%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	422.155.996.445,22	420.323.429.670,45	99,57%
7.1.1	Penggunaan SILPA	422.155.996.445,22	420.323.429.670,45	3362,59%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	-	0,00%
7.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	409.655.996.445,22	420.323.429.670,45	102,60%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	312.830.484.198,89	0,00%

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Visi Dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Tahun 2015-2019 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu:

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Tertib : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi

harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laik-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.

6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

b. Strategis Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Gambar 2.1
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA			
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.			
TIGA (3) DIMENSI PEMBANGUNAN			
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental/karakter	DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri	DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Antar Kelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur	
KONDISI PERLU			
Kepastian dan Penegakan Hukum	Keamanan dan Ketertiban	Politik dan Dekorasi	Tata Kelola dan RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA			

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan-pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019. Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur;
4. Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif;
6. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan pembangunan;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM);
8. Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT;
9. *Quick Response*;
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata;
11. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda;
12. Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat;
13. Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
14. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
15. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah;
16. Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat;
17. Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
18. Peningkatan pelestarian budaya lokal;
19. Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkan kembangkan seni dan budaya daerah;
20. Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan;

21. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
22. Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat;
23. Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
24. Pemberi layanan hukum pemereintah daerah dan masyarakat;
25. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
26. Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan enterpreneur;
27. Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan enterpreneur;
28. Penguatan budaya IPTEKIN dan enterpreneur melalui proses pendidikan dan kebudayaan;
29. Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship
30. Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship;
31. Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal;
32. Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier;
33. Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan;
34. Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tindakan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
35. Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agrobisnis dan agroindustri;
36. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD;
37. Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD;
38. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya;
39. Mengembangkan komoditas unggulan agrobisnis berbasis teknologi dan inovasi;

40. Meningkatkan UMKM binaan
41. Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal;
42. Meningkatkan akses terhadap bahan pangan;
43. Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal;
44. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah;
45. Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN;
46. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi;
47. Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan;
48. Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat;
49. Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi;
50. Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi;
51. Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik;
52. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak;
53. Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa;
54. Pengendalian daya rusak air;
55. Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah;
56. Menerapkan *good mining practice*;
57. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
58. Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
59. Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri;
60. Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA;
61. Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya;

62. Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat;
63. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
64. Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan;
65. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan;
66. Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang;
67. Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL);
68. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
69. Memperkuat pembangunan desa dan wilayah pedesaan;
70. Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komoditas Adat Terpencil (KAT);
71. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja;
72. Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan;
73. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alamiah.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan **Misi Pertama** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik; maka

program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❖ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- ❖ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- ❖ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- ❖ Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
- ❖ Program Pentaan Batas dan Wilayah Administrasi
- ❖ Program Pengelolaan dan Penataan Kearsipan SKPD Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Parpol, Ormas dan Perorangan
- ❖ Program Pengembangan Kearsipan
- ❖ Program Profesionalisasi PNS
- ❖ Program Manajemen Pelayanan Kediklatan
- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- ❖ Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan
- ❖ Program Promosi dan Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
- ❖ Program Pentaan, Perencanaan dan rekrutmen SDM aparatur berbasis kompetensi
- ❖ Program peningkatan kesejahteraan PNS dan pemberian penghargaan PNS
- ❖ Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- ❖ Program penelitian dan pengembangan daerah
- ❖ Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi

- ❖ Program perencanaan dan penataan peraturan daerah provinsi
 - ❖ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - ❖ Program reformasi birokrasi
 - ❖ Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
2. Dalam upaya mewujudkan **Misi Kedua** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program upaya kesehatan masyarakat
 - ❖ Program upaya kesehatan perorangan
 - ❖ Program obat dan perbekalan kesehatan
 - ❖ Program pelayanan laboratorium kesehatan
 - ❖ Program peningkatan balai kesehatan Provinsi Jambi
 - ❖ Program pembangunan akademis analis kesehatan
 - ❖ Program pengembangan akademi farmasi
 - ❖ Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
 - ❖ Program pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan
 - ❖ Program pembiayaan dan jaminan kesehatan
 - ❖ Program kesehatan ibu dan anak
 - ❖ Program kesehatan anak balita
 - ❖ Program perbaikan gizi masyarakat
 - ❖ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - ❖ Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - ❖ Program pengembangan lingkungan sehat
 - ❖ Program obat dan perbekalan kesehatan
 - ❖ Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - ❖ Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - ❖ Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
 - ❖ Program pendidikan SMA
 - ❖ Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - ❖ Program pendidikan SMK
 - ❖ Program BOSDA
 - ❖ Program manajemen pelayanan pendidikan

- ❖ Program pengembangan perpustakaan
 - ❖ Program layanan dan pengembangan budaya cara dan pembinaan perpustakaan
 - ❖ Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - ❖ Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda
 - ❖ Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan
 - ❖ Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - ❖ Program pengelolaan keragaman budaya
 - ❖ Program fasilitasi kehidupan umat beragama
 - ❖ Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - ❖ Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - ❖ Program perwujudan demokrasi makin kokoh
 - ❖ Program penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan capil
3. Dalam upaya mewujudkan **Misi Ketiga** : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - ❖ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - ❖ Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - ❖ Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - ❖ Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - ❖ Program kelembagaan dan koordinasi
 - ❖ Program pemberantasan penyakit masyarakat
 - ❖ Program advokasi hukum dan HAM
 - ❖ Program dokumentasi dan informasi produk hukum
 - ❖ Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD
4. Dalam upaya mewujudkan **Misi Keempat** : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- ❖ Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- ❖ Program peningkatan kualitas SDM pertanian
- ❖ Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- ❖ Program pemberdayaan pertanian, perikanan, kehutanan
- ❖ Program kajian dan penelitian pengembangan daerah
- ❖ Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- ❖ Program pengembangan inovasi dan teknologi daerah
- ❖ Program pengembangan kemitraan
- ❖ Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM
- ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
- ❖ Program peningkatan kelembagaan koperasi
- ❖ Program pengembangan IKM
- ❖ Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- ❖ Program pengembangan industri argo dan kimia
- ❖ Program perencanaan sarana prasarana, tata ruang dan kerjasama pembangunan
- ❖ Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan
- ❖ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- ❖ Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
- ❖ Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- ❖ Program peningkatan produksi dan teknologi pertanian
- ❖ Program peningkatan produksi hasil peternakan
- ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
- ❖ Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- ❖ Program penelitian dan pengembangan

- ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
 - ❖ Program peningkatan penguatan kelembagaan koperasi
 - ❖ Program pengembangan IKM
 - ❖ Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - ❖ Program peningkatan ketahanan pangan
 - ❖ Program peningkatan produksi peternakan
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
5. Dalam upaya mewujudkan **Misi Kelima** : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- ❖ Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
 - ❖ Program perencanaan sarana dan prasarana, tata ruang dan kerjasama pembangunan
 - ❖ Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - ❖ Program pembangunan prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ
 - ❖ Program pengembangan energi
 - ❖ Program penyediaan dan pengelolaan air baku
 - ❖ Program pengembangan an pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - ❖ Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
 - ❖ Program pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir dan pengamanan pantai
 - ❖ Program pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
 - ❖ Program penyelidikan, pembinaan, mitigasi dan pelayanan geologi
 - ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
 - ❖ Program pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
 - ❖ Program pengawasan SDKP, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir
 - ❖ Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

- ❖ Program perlindungan dan konservasi SDA
 - ❖ Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - ❖ Program pengembangan destinasi pariwisata
 - ❖ Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
 - ❖ Program perencanaan dan pengembangan hutan
 - ❖ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - ❖ Program rehabilitasi hutan dan lahan
6. Dalam upaya mewujudkan **Misi Keenam** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
 - ❖ Program pengembangan usaha peternakan
 - ❖ Program pengembangan perikanan budidaya
 - ❖ Program pengembangan perikanan tangkap
 - ❖ Program penyediaan dan pengelolaan air baku
 - ❖ Program lingkungan sehat perumahan dan pemukiman
 - ❖ Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
 - ❖ Program pendidikan SMA
 - ❖ Program pendidikan SMK
 - ❖ Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
 - ❖ Program peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa
 - ❖ Program rakor dan pelatihan teknis kebencanaan
 - ❖ Program peningkatan kualitas SDM pertanian
 - ❖ Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
 - ❖ Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
 - ❖ Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
 - ❖ Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - ❖ Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
 - ❖ Program pemberdayaan tenaga kerja
 - ❖ Program pemberdayaan jasa konstruksi

- ❖ Program pembinaan pelaksanaan pembangunan di bidang kerjasama
- ❖ Program peningkatan penghidupan berkelanjutan
- ❖ Program pengembangan IKM
- ❖ Program bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga berencana
- ❖ Program pengendalian penduduk

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

- Kegiatan kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- Kegiatan peningkatan mutu sarana prasarana PKPLK;
- Penyelenggaraan event event tingkat provinsi/ nasional;
- Penyelenggaraan PKLK;
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK;
- Kegiatan Penyelenggaraan PLA;
- Kegiatan produksi unggul PKLK tingkat menengah;
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga tata usaha dan tenaga laboran sekolah pendidik;
- Kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
- Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- Kegiatan pelatihan kompetensi Guru;
- Pembinaan MGMP;
- Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA;
- Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama;
- Pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA;
- Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar;

- Kegiatan Diklat Pengelolaan Dana BOS dan Dana BOS APBN;
- Kegiatan Rakor Manajemen SMA;
- Kegiatan Meubiler SMA;
- Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- Pembinaan Peserta (OOSN) dan (FLSSN) SMA;
- Kegiatan BOS APBN;
- Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK;
- kegiatan Peningkatan Pembelajaran SMK – PP;
- Keg.Pembangunan/Turaf, Pagar SMK;
- Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMK;
- Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan (Re Engineering SMK);
- Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS);
- Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional;
- Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK;
- Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013;
- Kegiatan SIM SMK dan Rakor Kepsek;
- Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK (FLSSN);
- Debat Bahasa Jenjang SMK;
- Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan;
- Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
- Kegiatan Pembinaan Pramuka;
- Kegiatan pembinaan UKS;
- Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantre;
- Kegiatan Pengarus utamaan Gende;
- Kegiatan Pembinaan minat baca Siswa;
- Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan;
- Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan;
- kegiatan produksi TIK Pendidikan;
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan;
- Kegiatan PPDB Online;

- Kegiatan Pembinaan Potensi Pendidikan;
- Kegiatan Pendidikan Untuk Semua;
- Kegiatan Pemberian Beasiswa;
- Kegiatan BOSDA.

2. Dinas Kesehatan

- Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis;
- Kegiatan percepatan peningkatan kemampuan dan kualifikasi tenaga Kesehatan menjadi D.III;
- Kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit;
- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan program kesehatan keluarga utk menjamin keamanan mutu dan manfaat alkes dan PKRT;
- Kegiatan Sampling Alkes dan PKRT;
- Kegiatan Binwasdal program alkes dan PKRT;
- Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan;
- Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Kegiatan Pembinaan lomba sekolah sehat (LSS) tingkat Nasional (pembinaan sarana makanan jajanan) yang mengikuti (LSS) tingkat Nasional;
- Kegiatan Lomba sekolah sehat (LSS) tingkat provinsi (penilaian sarana makanan jajanan sekolah yang mengikuti LSS Nasional);
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional;
- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan perorangan;
- Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesda Provinsi;
- Kegiatan pengelolaan PHA dan DHA;

- Kegiatan Penggalangan Advokasi kesehatan dengan lintas sektor dan pemangku pemberi kebijakan;
- Kegiatan Gerakan masyarakat hidup sehat;
- Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- Kegiatan penggalangan advokasi ke organisasi potensial tentang peningkatan pembangunan kesehatan;
- Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- Kegiatan peningkatan promosi kesehatan di puskesmas;
- Kegiatan dukungan UKM Tersier (Dana BOK Provinsi);
- Kegiatan dukungan Manajemen (Dana BOK Provinsi);
- Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Kurang Giz;
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
- Penanggulangan Kurang Energi dan protein anemia gizi gangguan akibat kekurangan iodium kurang vitamin A;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi;
- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita;
- Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita;
- Kegiatan Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu;
- Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu;
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
- Kegiatan Penyehatan air dan sanitasi dasar;
- Kegiatan Penyehatan udara tanah pangan dan kawasan;
- Kegiatan Pengamanan limbah dan radiasi;
- Kegiatan Kesehatan kerja dan olahraga;
- Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular langsung;
- Kegiatan Pencegahan dan pengendalian tular vektor dan zoonosis (P2PTPZ);
- Kegiatan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I);
- Kegiatan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;

- Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
 - Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular;
 - Kegiatan pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium;
 - Pengembangan Institusi Pendidikan DIII Farmasi Bidang Kesehatan (AKFAR);
 - Pengembangan Institusi pendidikan DIII AAK Bidang Kesehatan (AAK);
3. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial;
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna;
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat;
 - Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin (Pendampingan);
 - Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaaan dan Tertinggal;
 - Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan;
 - Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan;
 - Kegiatan Verivali Data Fakir Miskin Lingkup Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Pemberdayaan KAT dan Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT;
 - Kegiatan Verivali Data KAT di daerah Provinsi jambi;
 - Kegiatan Pendataan dokumen kependudukan bagi warga KAT di Provinsi jambi;

- Kegiatan Koordinasi, pembinaan dan Monev Pemberdayaan KAT;
- Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar;
- Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS (Anak terlantar, Anak Gelandangan, ABH, Anak Keluarga Kurang Mampu);
- Kegiatan Pelayanan ijin Pengangkatan anak;
- Kegiatan Pemberdayaan Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Disabilitas;
- Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar melalui LKS Penyandang Disabilitas;
- Kegiatan pelayanan panti disabilitas;
- Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- Kegiatan Pelayanan Sosial LANjut Usia Luar Panti;
- Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Penyandang PMKS;
- Kegiatan Pelayanan Sosial di rumah singgah bagi Tuna Sosial;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi penyandang penyakit Sosial (Eks Napi, Tuna Sosial, ODHA dan kelompok Minoritas);
- Penyuluhan sosial Bahaya Narkoba,HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial;
- Pengiriman /fasilitasi klien narkoba ke panti rehabilitasi;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Psikotik;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- Kegiatan pelayanan panti Gelandangan dan pengemis;
- Unit Pelayanan Sosial Keliling;
- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes);

- Kegiatan Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
 - Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada tanggap Darurat;
 - Kegiatan pembentukan dan pembinaan Kampung Siaga Bencana;
 - Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana;
 - Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana;
 - Pembentukan Sekolah Siaga Bencana;
 - Pemberdayaan Dunia Usaha;
 - Rapat Teknis Kesiagaan Penanggulanngan Bencana;
 - Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana;
 - Peningkatan dan Pengembangan SIM Data Kebencanaan;
 - Pengerahan Personil TRC Ke Lokasi Bencana;
 - Ketersediaan Pengadaan Logistik;
 - Kegiatan Ketersediaan Peralatan;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Fisik di Wilayah Pasca Bencana;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana;
 - Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - Pemantapan TRC;
 - Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
 - Bimtek Penilaian Kerusakan Pasca Bencana (JITUPASNA).

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kerbang dan politik Prov. Jambi;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/kegiatan Kesbangpol Provinsi Jambi;
- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan masyarakat;
- kegiatan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan;
- Kegiatan Peningkatan kesadaran bela negara;
- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan TMMD;
- Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah;
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat;
- Kegiatan Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masy dan penanggulangan bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006);
- Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing;
- Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pencehagan penyalagunaan Narkotika Provinsi Jambi;
- Kegiatan Tim Pengawas Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Forum diskusi Politik;
- Kegiatan Monitoring evaluasi dan rakor perkembangan politik daerah;
- Kegiatan Peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga Parpol;
- Kegiatan Monitoring dan evaluasi eksistensi parpol, ormas , OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan Daerah;

- Pembinaan Ormas di Provinsi Jambi;
 - Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi);
 - Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat);
 - Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur);
 - Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo);
 - Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci;
 - Pembangunan Jembatan di Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur;
 - Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi);
 - Peningkatan jalan diwilayah VI (Kab. Merangin);
 - Peningkatan jalan diwilayah VII (Kab. Kerinci);
 - Peningkatan jalan diwilayah VIII (Kab. Sarolangun);
 - Peningkatan jalan diwilayah IX (Kab. Tebo);
 - Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi jambi (P2TP);
 - Peningkatan jalan dengan sumber dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Peningkatan jalan diwilayah III (Kab. Ma. Jambi);
 - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi;
 - Rehab/ Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi;
 - Pembangunan Rumah Susun;
 - Perencanaan dan pengawasan bidang perumahan;
 - Pengadaan dan Pengelolaan Rumah Khusus;
 - Pembangunan Saluran Drainase Sekuler/ Gorong-gorong;
 - Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II;

- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali;
- Pembangunan PSU Perumahan Formal;
- Pembangunan PSU Perumahan Swadaya;
- Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi Baru;
- Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa;
- Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan;
- Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan;
- Penyediaan, Pengelolaan Air Minum dan Destribusi Jaringan Air Bersih;
- Perencanan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- Pembinaan aparatur dan SDM jasa konstruksi;
- Penataan Regulasi, NSPK, serta Kajian Pengembangan Kemitraan;
- Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD;
- Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD;
- Bintek Penyelenggara Jasa Kontruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Kontruksii;
- Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Penilaian Kinerja Jasa Kontruksi dan SIPJAKI;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi;
- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat;
- Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;
- Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta Penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrastruktur;
- Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;

- Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan;
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah Dibangun;
 - Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kegiatan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (MTU);
 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Berbasis Kompetensi (PBK);
 - Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif;
 - Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dan Seleks;
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Bagi Calon Tenaga Kerja dan Magang ke Luar Negeri;
 - Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Instruktur, Tenaga Kerja dan Perusahaan Non Kontruksi;
 - Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan Padat Karya Infrastruktur;
 - Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan Informasi Pasar Kerja;
 - Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia;
 - Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG);
 - Pendayagunaan tenaga kerja sarjana (TKS);
 - Kegiatan Sosialisasi K3 dan Penilaian Penghargaan K3;
 - Kegiatan Pembahasan dan Penetapan serta Monitoring UMP;
 - Kegiatan Pengawasan Pkerja Anak;
 - Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dan Hari Buruh Seluruh Indonesia (May Day);
 - Kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan;

- Kegiatan Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan;
 - Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, UMP dan BPJS di Perusahaan di Kab/Kota;
 - Kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) Umum;
 - Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja;
 - Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual, Pemberdayaan Perempuan Transmigrasi di UPT;
 - Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan;
 - Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten dan Peralatan PUSTU dan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di UPT;
 - Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi;
 - Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah;
 - Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT;
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT;
 - Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi;
 - Kegiatan Monitoring Pembangunan Permukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
 - Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungannya;

- Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak;
- Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak;
- Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa;
- Kegiatan Sosialisasi GN-AKSA;
- Kegiatan PATBM kab/kota Se-Provinsi Jambi;
- Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak;
- Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI;
- Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI;
- Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
- Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Kegiatan Bimtek sistem pencatatan dan pelaporan korban KDRT;
- Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
- Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik Perempuan;
- Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan. Gerakan Sayang Ibu dan kelompok perempuan peduli lingkungan;

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
- Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- Pembinaan dan Penilaian P2WKSS;
- kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat;
- Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan;
- Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat;
- Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa;
- Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
- Kegiatan Pembinaan PosyanteK dan Gelar TTG;
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa;
- Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia;
- Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan;
- Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanel posyandu;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan KPA dan P4GN;
- kegiatan pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA);
- Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR).

9. Dinas Ketahanan Pangan

- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan;
- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah;
- Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan;
- Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;

- Kegiatan Pengembangan Distribusi Pangan;
- Kegiatan Peningkatan Pola konsumsi Pangan Masyarakat;
- Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan Pangan Asal tumbuhan;
- kegiatan percepatan deverfikasi konsumsi Pangan berbahan Baku Sumber Daya Lokal;

10. Dinas Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Kegiatan Pendayagunaan laboratorium Lingkungan Daerah;
- Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan;
- Kegiatan Ppenanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata;
- Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan iklim;
- Kegiatan pengembangan study kebijakan lingkungan;
- Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
- Kegiatan pengembangan data dan informaasi lingkungan;

11. Dinas Perhubungan

- Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
- Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;
- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan;
- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
- Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum teladan;
- Pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai;
- Pelayanan domestic haji embarkasi;
- Pembangunan fasilitas gedung terminal VIP room dan koordinasi bandara perintis Provinsi Jambi;

- Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi;
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

12. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan TIK;
- Kegiatan Pelayanan Jasa Sandi dan telekomunikasi;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Integrasi Sistem;
- Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Internet/Intranet;
- Penyusunan Kompilasi Produk Statistik Sektoral dan Analisis Pembangunan;
- Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Website;
- Kegiatan Pemberdayaan Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik;
- Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran;
- Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID Provinsi Jambi;
- Kegiatan Fasilitasi Kemitraan penguatan layanan komunikasi publik;
- Kegiatan Pelayanan Teknis komisi informasi Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat;
- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Komunikasi Masyarakat;
- Kegiatan Desiminasi Informasi.

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM;
- Penguatan Ekonomi Lokal;
- Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi;

- Sosialisasi Pembiayaan Bagi KUMKM dan LKM;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM;
- Sosialisasi Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- Pelatihan Pengelolaan koperasi usaha mikro kecil;
- Pengembangan Produk Unggulan;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi;
- Pengembangan Kemitraan;
- Bimbingan Teknis KUKM;
- Pendampingan Penerapan Teknologi tepat guna;
- Pemberdayaan KUKM melalui Pendekatan OVOP;
- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri;
- Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi;
- Kegiatan Bimbingan Teknis KSP/USP koperasi;
- Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- Penerapan Kepatuhan Perundang-undangan perkoperasian.

14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- Kegiatan Forum Komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM) Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi;
- Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi dalam negeri;
- Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi luar negeri;
- Kegiatan Pembuatan Profile Peluang Investasi;
- Kegiatan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi;
- Kegiatan penyusunan pemetaan investasi Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan Kemitraan Strategis untuk pengembangan investasi Provinsi Jambi;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

- Kegiatan Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
- Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan;
- Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal;
- Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan;
- Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal;
- Kegiatan Advokasi permasalahan Penanaman Modal.

15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional;
- Kegiatan Bulan Bakti Pemuda;
- Kegiatan Pembinaan Mental, Semangat dan wawasan Kebangsaan;
- Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys;
- Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi Kepemudaan dan olahraga;
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
- Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Karakter dan Jiwa Wirausaha Muda

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah;
- Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei;
- Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi;
- Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi;
- Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah;
- diplomasi budaya dan misi kesenian;
- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;

- kegiatan pelestarian kebudayaan Daerah;
- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata;
- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri;
- Promosi pariwisata dalam daerah (event daerah);
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- Pengembangan Objek pariwisata unggulan;
- Pengembangan sosialisai dan penerapan serta standarisasi.

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dan workshop/supervisi/penyuluhan;
- Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit, pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
- Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka;
- Kegiatan Pemasyarakatan minat baca;
- Kegiatan standarisasi dan akreditasi kelembagaan perpustakaan;
- Kegiatan Pemasyarakatan Sadar arsip;
- Kegiatan Pendataan, Penataan dan penyusutan arsip;
- Kegiatan Akuisisi dan Penelusuran Arsip;
- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemeliharaan Arsip;
- Kegiatan revisi Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Sarasehan Kearsipan;
- Kegiatan Sosialisasi Kearsipan.

18. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan ikan hias di UPTD BBID;
- Pengembangan induk dan benih UPTD BBIS Kerinci;
- Kesehatan ikan dan lingkungan;
- Pengembangan budidaya air payau;
- Pengembangan minapolitan perikanan budidaya;

- Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi;
- Pengembangan perbenihan ikan Komersil dan Ikan Lokal Jambi di UPTD BBID;
- Pengembangan ikan semah;
- Pengembangan pemberdayaan wanita pembudidaya ikan dan pemuda kreatif;
- Pengembangan dan Pelatihan Perikanan Budidaya di Pondok Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Sekolah dan TNI/POLRI;
- Pemberdayaan Pembudidaya di Kawasan Mandiri Pangan;
- Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
- Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Perikanan Budidaya;
- Pengembangan Mutu Pakan;
- Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
- Pengelolaan dan pengembangan aktifitas Pelabuhan Perikanan Pantai;
- Pengembangan minapolitan perikanan tangkap;
- Pengelolaan usaha penangkapan ikan;
- Pengelolaan sumberdaya ikan;
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap;
- Kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Pengembangan pemberdayaan nelayan;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- Perlindungan dan konservasi/rehabiltasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan;
- Pengelolaan thehok;
- Pengelolaan Instalasi Pendung Semurup Kerinci;
- Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan;
- Bina Mutu, Usaha dan Investasi hasil Perikanan;
- Pengembangan sistem informasi pasar;
- Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- Kegiatan Pemasaran;
- Pengembangan pemasaran hasil perikanan;

- Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP);
- Peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- Pengembangan usaha dan investasi pengolahan hasil perikanan;
- Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Taman Anggrek;
- Pengembangan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP).

19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

- Pelatihan peningkatan kompetensi petani;
- Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani;
- Kegiatan Penyebaran Informasi dan Teknologi Penyuluhan;
- Kegiatan Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
- Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan;
- Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian;
- Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura;
- Kegiatan Pengelolaan sistem pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- Kegiatan Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM);
- Kegiatan Perluasan Areal dan Pengembangan Lahan Pertanian;
- Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi;
- Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi;
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro;

- Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPA;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura;
- Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura;
- Kegiatan pengembangan kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- Kegiatan pasca panen tanaman pangan;
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis;
- Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak.
- Kegiatan Pengembangan Perbibitan dan Produksi Ternak;
- Pengembangan Pakan ternak;
- Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Kegiatan Permodalan, Investasi dan Penguatan Kelembagaan Ternak;
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Kesmavet;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
- Kegiatan Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan;
- Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang;
- Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Satwa;
- Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pengunjung dan Ketatausahaan.

20. Dinas Perkebunan

- Kegiatan pengawasan tata niaga TBS;
- Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar;

- Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB);
- Kegiatan peningkatan pengolahan hasil Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan;
- Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH;
- Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi;
- Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Demplot PLTB;
- Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida;
- Kegiatan pengembangan kopi;
- Kegiatan Pengembangan Mutu Benih Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat;
- Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau;
- Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam;
- Kegiatan pembibitan tanaman perkebunan;
- Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawasan Revitalisasi Perkebunan;
- Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO;
- Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan;
- Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan;
- Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan;
- Kegiatan Pengembangan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani;

- Kegiatan Bimbingan teknis/pelatihan peremajaan Kelapa Sawit;
- Model pengembangan tanaman kelapa dalam;
- Pengembangan Tanaman Lada untuk peningkatan pendapatan petani Karet;
- Pengembangan Tanaman Lada untuk peningkatan pendapatan petani Karet;
- Intensifikasi karet rakyat;
- Pemeliharaan Kebun Entres;
- Pembangunan Kebun Induk Pinang;
- Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan;

21. Dinas Kehutanan

- Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- Pengembangan hutan tanaman;
- Pengembangan hasil hutan non kayu;
- Pendampingan kelompok usaha perhutanan social;
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan;
- Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan;
- Penanaman pohon pada kawasan hutan;
- Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan wisata;
- Pembinaan, Pengendalaian dan pengawasan gerakan RHL;
- Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan Hutan wisata di KPHP Unit II dan III Bungo
- Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin;
- Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;
- Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci unit I;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX;

- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV;
- Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII;
- Peningkatan pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif;
- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan;
- Kegiatan Pengamanan dan peredaran hasil hutan;
- Kegiatan evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi;
- Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan;
- Pemantapan kawasan hutan
- Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit I Kerinci;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur;

- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur;
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat;
- Perencanaan Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- Penelitian Terpadu terhadap Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Kegiatan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan.

22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Rehab pembangkit listrik tenaga surya;
- Pembangunan digester biogas dan asesoris;
- Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik (TM, TR, Trafo);
- Pemetaan Desa Belum Berlistrik;
- Pemetaan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Jambi;
- Inventarisasi dan Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu/Hilir Energi Tak Terbarukan;
- Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan;
- Konservasi energy;
- Penyusunan Study Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (FS dan DED);
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan;

- Sistem Informasi Geografis (SIG);
- Identifikasi Sumberdaya Geologi;
- Inventarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah;
- Konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa;
- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);
- Kegiatan Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran;
- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen;
- Identifikasi Tertib Niaga;
- Kegiatan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah;
- Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal;
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil;
- Kegiatan Pengembangan Rumah Tenun Jambi;
- Kegiatan Pendataan IKM se Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi;
- Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya daerah;
- Kegiatan Pengembangan Sentra Usaha IK;
- Kegiatan Konvensi GKM Tingkat Provinsi;
- Kegiatan Peningkatan Pembinaan usaha industri;
- Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang;
- Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- Kegiatan Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal;
- Kegiatan Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya;
- Kegiatan Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya;
- Pelatihan TOT bagi para aparat pembina IKM;
- Pengembangan One Village One Product (OVOP);
- Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar;

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar;
- Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar;
- Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Industri Menengah dan Besar;
- Updating industri menengah dan besar se Provinsi Jambi;
- Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi;
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor;
- Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi;
- Penambahan pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium;
- Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB;
- Survey IKM Atas Pelayanan Lab kalibrasi dan Lab. Penguji;
- Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri;
- Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah;
- Pemuktahiran data eksportir dan importir.

24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya;
- Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
- Perencanaan Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman;
- Kegiatan Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

25. Badan Keuangan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penatausahaan belanja tidak langsung non Pegawai;
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah;
- Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung;
- Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung;
- Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan;
- Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah;
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK provinsi Jambi;
- Administrasi TP-TGR;
- Pengelolaan Akuntansi Pendapatan;
- Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain-lain Daerah;
- Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kabupaten/kota.

26. Badan Kepegawaian Daerah

- Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional;
- Penyelenggaraan Pembelajaran Seni dan Baca Al Qur'an bagi Anggota KORPRI Provinsi Jambi;
- Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS;

- Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahun dan Tahunan;
- Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assited Test);
- Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka;
- Penataan dan Pegawai Non PNS/PTT/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemprov;
- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Seleksi Pejabat Administrasi;
- Peningkatan Kemampuan PNS melalui pemberian Bea Siswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar dan Cost sharing;
- Peningkatan Kemampuan PNS melalui pemberian Bea Siswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar dan Cost sharing;
- Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Tertentu bagi Pegawai ASN;
- Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK;
- Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Non/PNS/PPK;
- Pelaporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS;
- Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS;
- Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap;
- Kegiatan pemberian penghargaan dan kegiatan PNS;
- Kegiatan pelayanan administrasi jenjang pendidikan PNS;
- Pelayanan Pengangkatan CPNS dan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun;
- Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
- Pelayanan Mutasi Pindah Antar Instansi;
- Kegiatan pelayanan dan fasilitas Kartu Identitas Pegawai;

- Pelayanan Penerbitan/ Rekomendasi dan Surat Pernyataan Hukuman Disiplin dan Izin Perceraian/ Perkawinan;
- Penyusunan Buku Profil Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas;
- Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi;
- Kegiatan pengelolaan, pemeliharaan data dan informasi kepegawaian;
- Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik;
- Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal;
- Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan (05);
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM AparaturKediklatan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan;
- Pelaksanaan Seminar/lokkrya/workshop;
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (07);
- Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- Kegiatan Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial.

28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Kegiatan Penelitian Mandiri;
- Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responsif;
- Kegiatan Penelitian Subbid Data dan Pengkajian Peraturan;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pemerintahan Desa;
- Kegiatan Penelitian Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi (Penelitian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ketahanan Pangan);

- Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi (Penelitian Kajian dan Evaluasi Kualitas Bibit Sawit di Provinsi Jambi);
- Kegiatan Penelitian Subbid SDA dan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- Kegiatan Penelitian Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- Kegiatan Penelitian Subbid Sosial dan Budaya;
- Kegiatan Penelitian Subbid Pemberdayaan Masyarakat;
- Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan (Penelitian Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan serta Tenaga Pendidik di Provinsi Jambi);
- Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan (Penelitian Kualitas Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi);
- Kegiatan Sosialisasi Sumber Daya Genetik (SDG) di Sekolah Sekolah;
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Kinerja Litbang;
- Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi;
- Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti;
- Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang;
- Kegiatan Seminar Nasional;
- Kegiatan Science Park di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Iptek;
- Kegiatan Pengembangan Teknologi Reklamasi Lahan.

29. Badan Penghubung

- Kegiatan Sosialisasi program dan hasil pembangunan daerah Jambi;
- Kegiatan Sarasehan masyarakat Jambi di Jakarta;

- Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi;
- Kegiatan Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

30. Inspektorat

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH;
- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah;
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif;
- Kegiatan SABER PUNGLI;
- Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
- Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

31. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

- Kegiatan Pembahasan rancangan Perda;
- Kegiatan reses;
- Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif;
- Kegiatan Publikasi rapat-Rapat Paripurna;
- Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi dan Kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

32. Biro Umum

- Kegiatan Dialog / audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;

- Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri;
- Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
- Kegiatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya

33. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan TUP di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Prov. Jambi;
- Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Review LPPD;
- Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah;
- Kegiatan Pemantauan penyelenggaraan pemerintah bawahan dan Rapat Koordinasi pemerintahan bawahan;
- Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah dan Percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran;
- Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;
- Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah;
- Kegiatan Penyelesaian dan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga;
- Kegiatan Penyelesaian dan Penegasan Batas antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- Kegiatan Rapat koordinasi kerjasama dan pendataan potensi kerjasama di wilayah perbatasan;

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib;
- Kegiatan Koordinasi pertanahan;
- Kegiatan Persiapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

34. Biro Pembangunan dan Kerjasama

- Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan;
- Kegiatan Koordinasi, Monitoring Pelaksanaan kegiatan bidang BUMN/BUMD;
- Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di bidang Pengendalian Inflasi;
- Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi di Bidang Kebudayaan, Kepariwisata dan Koperindag;
- Kegiatan Koordinasi Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penyaluran Raskin Se-Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang ESDM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Kelautan Perikanan;
- Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi.

35. Biro Hukum

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan-Perundang Undangan;
- Kegiatan Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur;
- Kegiatan Penelitian / Pengkajian Terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Intruksi Gubernur Jambi;
- Kegiatan Kajian Peraturan Perundang Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antara Peraturan Perundang Undangan Daerah;
- Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota;
- Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten /Kota;
- Kegiatan Peningkatkan Koordinasi dan Singkronisasi dengan Intansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat;
- Kegiatan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi;
- Kegiatan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Cuma Cuma;
- Kegiatan Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah;
- Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan Publikasi peraturan perundang undangan.

36. Biro Humas

- Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah;
- Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan;
- Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi;
- Kegiatan Pelayanan Publikasi Publik dan Informasi Komunikasi Kehumasan;

- Kegiatan Publikasi melalui Media Dalam dan Luar ruang;
- Kegiatan Pelayanan Informasi Kemasyarakatan;
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Bidang Urusan Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100	2020	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100	2020	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

b. Bidang Urusan Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100	2020	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejaiban luar biasa provinsi	100	2020	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi

e. Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100	2020	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

f. Bidang Urusan Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	2020	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100	2020	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100	2020	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100	2020	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	100	2020	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak. Ada 3 (tiga) factor dalam mencapai IPM yaitu diantaranya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran.

IPM Provinsi Jambi metode baru dalam waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) meningkat setiap tahun. Pada tahun 2014 IPM Provinsi Jambi sebesar 68,24 meningkat menjadi 70,65 pada tahun 2018. Walaupun IPM Provinsi Jambi masih di bawah nasional pada tahun 2018, namun pada periode 2017-2018 IPM Provinsi Jambi tumbuh sebesar 0,94 persen, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,82 persen pada periode yang sama.

Kemajuan pembangunan manusia terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Sejak tahun 2015 tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus “rendah” dimana sebelumnya masih terdapat satu kabupaten dengan status tersebut, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bila dilihat dari capaian IPM seluruh Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, maka capaian IPM seluruh Kabupaten pada tahun 2018 lebih rendah dari capaian Provinsi Jambi, hanya Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang capaiannya lebih tinggi dari Provinsi Jambi dan masuk dalam kategori tinggi.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makan yang disetarakan dengan 2.100 kal per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) kebutuhan minimum untuk perumahan, sandanng, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 274,32 ribu jiwa (7,60 persen) pada bulan Maret dan 273,37 ribu jiwa (7,51 persen) pada bulan September. Indeks pembangunan Manusia pada tahun 2019 sebesar 71,26 meningkat 0,86 persen poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (Ibu)		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)			(4)
2015					
- Maret	406.074	316.838	119,54	181,17	300,71
- September	423.855	329.895	125,60	185,97	311,56
2016					
- Maret	438.600	342.137	115,35	174,46	289,80
- September	448.615	349.735	116,33	174,48	290,81
2017					
- Maret	457.818	360.519	120,62	165,93	286,55
- September	465.233	366.036	118,49	160,11	278,61
2018					
- Maret	487.791	398.501	118,62	163,07	281,69
- September	492.364	401.765	116,50	164,97	281,47
2019					
- Maret	511.654	418.821	115,08	159,24	274,32
- September	524.643	437.987	115,16	158,20	273,37

Sumber: Jambi Dalam Angka 2019

2.1.3. Angka Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi keadaan Agustus tahun 2019 mencapai 1.765.747 orang yang terdiri dari 1.691.782 orang bekerja dan 73.965 orang pengangguran terbuka. Jumlah pencari kerja yang mendaftar di dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelaminnya pada tahun 2019 sebanyak 14.978 orang, dengan jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 8.450 orang dan perempuan 6.528 orang. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu
yang Lalu di Provinsi Jambi Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	118.080	1.069	2.272	3.341	121.421
Merangin	187.523	1.971	5.442	7.413	194.936
Sarolangun	135.156	1.786	4.199	5.985	141.141
Batang Hari	114.983	616	5.051	5.667	120.650
Muaro Jambi	184.465	1.862	8.440	10.302	194.767
Tanjab Timur	113.773	373	1.611	1.984	115.757
Tanjab Barat	166.179	1.398	3.157	4.555	170.734
Tebo	176.355	1.936	3.495	5.431	181.786
Bungo	167.075	3.716	3.116	6.832	173.907
Kota Jambi	286.387	12.463	8.172	20.635	307.022
Kota Sungai Penuh	41.806	713	1.107	1.820	43.626
Jambi	1.691.782	27.903	46.062	73.965	1.765.747

Sumber : Jambi Dalam Angka 2020

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

a) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional

(provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB dan PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jambi
Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kerinci	5,69	6,55	6,44	9,63	6,45
2.	Merangin	7,02	6,47	6,45	6,95	5,48
3.	Sarolangun	8,8	7,98	7,94	8,86	3,59
4.	Batang Hari	8,8	7,13	6,84	8,02	4,26
5.	Muaro Jambi	7,9	7,25	7,69	8,23	5,24
6.	Tanjung Jabung Timur	6,83	7,44	4,09	5,92	1,87
7.	Tanjung Jabung Barat	7,85	7,68	7,55	6,51	3,98
8.	Tebo	6,78	6,73	6,51	9,28	5,28
9.	Bungo	7,68	7,51	6,67	6,35	5,13
10.	Kota Jambi	6,97	7,05	7,76	6,64	5,56
11.	Kota Sungai Penuh	6,73	6,93	6,92	6,35	7,06

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi, selama periode 2010-2015, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Provinsi Jambi pada periode yang sama juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebanyak Rp.97.740.900,- (juta), kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi Rp.125.038.700,- (juta).

Tabel 2.4

**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2015
ADHK Tahun 2010 Provinsi Jambi**

No	Sektor	2013		2014		2015	
		(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%	(Rp) Miliar	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28.071,00	25,12	31.145,40	25,96	32.815,90	26,24
2.	Pertambangan dan penggalian	29.692,30	26,57	30.947,00	25,79	30.879,90	24,70
3.	Industri Pengolahan	13.005,70	11,64	13.630,70	11,36	13.948,80	11,16
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	51,90	0,05	56,90	0,05	59,30	0,05
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	156,70	0,14	163,50	0,14	170,10	0,14
6.	Konstruksi	7.857,50	7,03	8.559,60	7,13	8.806,00	7,04
7.	Perdagangan besar dan eceran;	9.799,20	8,77	10.622,00	8,89	11.836,60	9,47
8.	Transportasi dan pergudangan	3.319,90	3,03	3.669,40	3,06	3.911,20	3,13
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.033,10	0,92	1.226,60	1,02	1.306,20	1,04
10.	Informasi dan komunikasi	3.622,40	3,24	3.876,30	3,23	4.257,50	3,40
11.	Jasa keuangan dan asuransi	2.655,80	2,38	2.757,70	2,30	2.815,80	2,25
12.	Real estate	1.695,50	1,52	1.732,80	1,44	1.805,30	1,44
13.	Jasa perusahaan	1.171,80	1,05	1.230,40	1,03	1.308,20	1,05
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.652,60	3,27	4.141,20	3,45	4.422,40	3,54

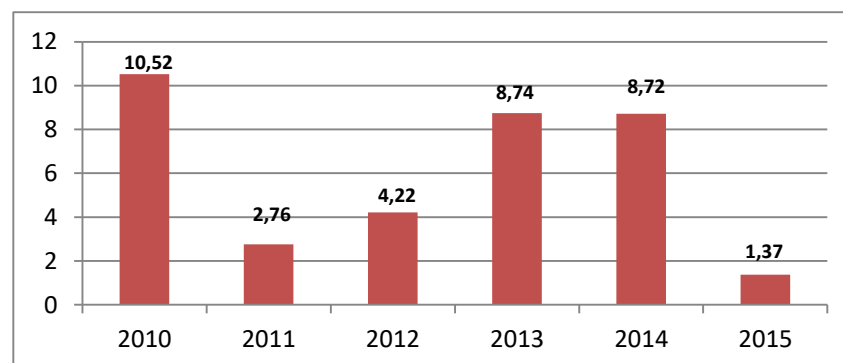
15.	Jasa pendidikan	3.705,00	3,31	3.752,60	3,13	4.033,40	3,23
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.103,00	0,99	1.270,50	1,06	1.398,10	1,12
17.	Jasa lainnya	1.101,00	0,99	1.162,10	0,97	1.263,80	1,01
PDRB		111.766,10	100,00	119.984,70	100,00	125.038,70	100,00

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

b) Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi dari tahun 2010-2015 adalah berfluktuasi dengan rata-rata 6,06 % per tahun. Pada tahun 2010, tingkat inflasi Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 10,52% tetapi pada tahun 2011 tingkat inflasi menurun signifikan menjadi 2,76% atau menurun sebesar 73,76% namun tahun 2012 inflasi naik kembali menjadi 4,22% atau tumbuh 52,90%, kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,74%. Selanjutnya pada tahun 2014 tingkat inflasi Provinsi Jambi menurun sedikit menjadi sebesar 8,72% dan turun signifikan kembali pada tahun 2015 menjadi 1,37% akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap. Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga.

Gambar 2.1
Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010-2015



2.1.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan dapat digunakan nilai ratio gini sebagai gambaran penyebaran pertumbuhan ekonomi apakah telah terjadi pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Gini ratio dari 5 kabupaten sebagaimana tersaji pada table 5.5 gini ratio tertinggi pada tahun 2008 berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,293), dan yang memiliki gini ratio terendah Kabupaten Merangin (0,189), untuk tahun 2009 gini ratio tertinggi Kabupaten Bungo (0,334) dan terendah Kabupaten Merangin (0,227), pada tahun 2010 gini ratio tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,288), dan yang memiliki gini ratio terendah Kabupaten Sarolangun (0,220), tahun 2011 gini ratio tertinggi Kabupaten Sarolangun (0,373) dan terendah Kabupaten Muaro Jambi (0,286).

Pada tahun 2012 gini ratio tertinggi Kabupaten Sarolangun (0,350) dan terendah Kabupaten Muaro Jambi (0,279). (Tabel 5.5. Terlampir) Jika dilihat pada tabel 5.5 gini rasio perkabupaten selama kurun waktu 2008 sampai 2012 seluruh kabupaten nilai gini ratio selalu mengalami peningkatan, ini menunjukkan pembangunan yang dilakukan daerah tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, malah sebaliknya ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah dalam proses prinsip teori pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat dari luar kabupaten, atau tidak dapat dimanfaatkan masyarakat di kabupaten tersebut, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah sehingga sebagian keuntungan yang diraih dibawa oleh pemilik modal keluar kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak membawa pemerataan pendapatan masyarakat dalam kabupaten tersebut. Jika dilihat dari rata-rata ratio gini selama tahun 2008 hingga tahun 2012 maka ratio gini tertinggi pada Kabupaten Sarolangun sebesar 0,3008; ini artinya Kabupaten Saerolangun yang memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi diantara 5 kabupaten di Provinsi Jambi, diikuti Kabupaten Bungo sebesar 0,2994; Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,2974; Kabupaten Merangin sebesar 0,2568 dan terendah

ketimpangan pendapatannya berada pada Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,2488.

Hal ini menunjukkan di Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik diantara 5 kabupaten di Provinsi Jambi. Adalah suatu bukti bahwa Kabupaten Sarolangun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuznets melalui kurva U terbaliknya yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan pada suatu negara atau wilayah ditandai oleh ketimpangan yang tinggi hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonomi baru yang sedang berkembang.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah Peserta Didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	

		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	2427 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2384 orang	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	5758 orang	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	4179 orang	Dinas Pendidikan	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1747 orang	Dinas Pendidikan	
		13. Jumlah Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1226 orang	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	162 orang	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	161 orang	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104 orang	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	

		18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		22. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	18 sekolah	Dinas Pendidikan	
		23. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		24. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		25. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	549 orang	Dinas Pendidikan	
		26. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		27. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		28. Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Data Tidak tersedia	Dinas Pendidikan	
		29. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan	

		30. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan	
		31. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	33	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7	Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	- Zegavit = 472 ktk - Masker N95 = 110 box - Masker bedah= 1230 box	Dinas Kesehatan	
		4. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	24 orang	Dinas Kesehatan	
		5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	24 orang	Dinas Kesehatan	
		6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	24	Dinas Kesehatan	

		7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggi di wilayah berpotensi bencana	-	Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	- Masker bedah= 562.000 box - N95 = 42.750 pcs - KN95 = 23.200 - Masker kain = 30.400 pcs - APD = 65.781 - Rapid Test = 46.530 test - Face Shield = 1.240 pcs - Sarung tangan pjs = 3.500 psg - Kacamata google = 1.160 - Sepatu boot = 1.160 psg - Handscoon = 43.800 psg - Kloroquin 150 mg = 15.000 tbt - Oseltamivir = 56.000 tbt - PCR kit = 4.800 - RNA kit = 4.800 - VTM = 4.800 - Longsee Swab test = 5.500 tes - Handsanitizer= 28 liter - Desinfektan wipes = 410 pck - Cover shoes = 3.260 psg - Gown = 3.260 - Gloves hands = 500 pcs - Nurse cap = 10.660 pcs - Sarung tangan nitril = 940 box - Henclin 500ml = 1.000 btl - Henclin 5kg = 3 jerigen - Goldrion = 150 - Glutafit = 45 bx - Oxymetri = 10 unit - Favipiravir = 16.000 tbt - Hidroksikloroquin = 3.000 - Vit C injeksi = 3.300 ampul - Azytromycin = 15.000 tbt - Termogun = 50 - Nasofing swab= 826 pcs - Lancet = 200 bx	Dinas Kesehatan	

			- Alcohol swab = 200 box - Tabung EDTA = 100 tabung - Multivitamin = 104.560 tblt - Paracetamol = 50.000 tblt - Gown apron = 40 pack - Handscoon steril = 33 box - Vitamin C = 84.560 tblt - Remdesivir = 2.160 vial		
		9. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	24 orang	Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten / kota		Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	

	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / Rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	-	Dinas PUPR	Belum terdata
	8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Tidak ada	Dinas PUPR	
	9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Tidak ada	Dinas PUPR	
	10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Tidak ada	Dinas PUPR	
	11. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
	12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak Ada	Dinas PUPR	Tahun 2021
	13. Jumlah BUMD dan UPTD Provinsi penyelenggara SPAM	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	14. Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Dinas PUPR	
	15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak ada	Dinas PUPR	
	16. Jumlah SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	
	17. Total kapasitas SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	
	18. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	
	19. Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan limbah domestic	Tidak ada	Dinas PUPR	
	20. Jumlah BUMD/ UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah (Ada/Tidak)	Tidak ada	Dinas PUPR	
	21. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
	22. Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	

		23. Panjang jalan yang dibangun	1.007,344 km	Dinas PUPR	
		24. Panjang jembatan yg dibangun	6.197,60 m	Dinas PUPR	
		25. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10,39 km	Dinas PUPR	
		26. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	45 m	Dinas PUPR	
		27. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	33,75 km	Dinas PUPR	
		28. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		29. Panjang jalan yang dipelihara	Tidak ada	Dinas PUPR	
		30. Panjang jembatan yang dipelihara	603,75 m	Dinas PUPR	
		31. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Ada	Dinas PUPR	
		32. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Ada	Dinas PUPR	
		33. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	Dinas PUPR	
		34. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR	
		35. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		36. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Dinas PUPR	
		37. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		38. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada	Dinas PUPR	
		39. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK)	Ada	Dinas PUPR	

		40. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada	Dinas PUPR	
		41. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	Dinas PUPR	
		42. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		43. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		44. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	4716	Dinas PUPR	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas PUPR	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas PUPR	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	

	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR	
	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPR	
	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PUPR	
	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PUPR	
	10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian Asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	87	Dinas PUPR	
	11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	73	Dinas PUPR	
	12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR	
	13. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR	
	14. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	98,22 Ha	Dinas PUPR	
	15. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPR	
	16. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1355,64	Dinas PUPR	
	17. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	6	Dinas PUPR	
	18. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas PUPR	
	19. Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas PUPR	

		20. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban umum dan Linmas	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani			
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			
		3. Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			
		4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			
		5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			
		6. Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum			
		7. Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi			
		8. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi			
		9. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi			
		10. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota			
		11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota			
		12. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi			
		13. Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi			
		14. Pencairan, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi			

		15. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi			

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi	100	Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	100	Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	5	Dinas Sosial, dukcapil	
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	14	Dinas Sosial, dukcapil	
		7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		8. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		11. Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang Difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	100	Dinas Sosial, dukcapil	
		13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	100	Dinas Sosial, dukcapil	

		14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		16. Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	50	Dinas Sosial, dukcapil	
		17. Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	50	Dinas Sosial, dukcapil	
		18. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	5	Dinas Sosial, dukcapil	
		19. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		20. Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		21. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	14	Dinas Sosial, dukcapil	
		22. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	Dinas Sosial, dukcapil	
		23. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		24. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		25. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
		26. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial, dukcapil	
		27. Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	50	Dinas Sosial, dukcapil	
		28. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	50	Dinas Sosial, dukcapil	

	29. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
	30. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
	31. Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	70	Dinas Sosial, dukcapil	
	32. Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	70	Dinas Sosial, dukcapil	
	33. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	14	Dinas Sosial, dukcapil	
	34. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	11	Dinas Sosial, dukcapil	
	35. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
	36. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	9	Dinas Sosial, dukcapil	
	37. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
	38. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	3	Dinas Sosial, dukcapil	
	39. Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
	40. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial, dukcapil	
	41. Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	70	Dinas Sosial, dukcapil	
	42. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	70	Dinas Sosial, dukcapil	
	43. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	

		44. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	3	Dinas Sosial, dukcapil	
		45. Jumlah lanjut usia yang terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	70	Dinas Sosial, dukcapil	
		46. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		47. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		48. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		49. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		50. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		51. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		52. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		53. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		54. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		55. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		56. Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		57. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinas Sosial, dukcapil	

		58. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		59. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		60. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		61. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		62. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		63. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		64. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial, dukcapil	
		65. Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social iang tersedia	0	Dinas Sosial, dukcapil	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Ada	Dinas Nakertrans	
		2. Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	0	Dinas Nakertrans	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	0	Dinas Nakertrans	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	0	Dinas Nakertrans	
		5. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	0	Dinas Nakertrans	
		6. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	Dinas Nakertrans	
		7. Raio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Dinas Nakertrans	
		8. Perentase pengganggur yang dilatih	0	Dinas Nakertrans	
		9. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas Nakertrans	
		10. Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas Nakertrans	

		11. Persentase LPK yang terakreditasi	0	Dinas Nakertrans	
		12. Jumlah calon pekerja migrant Indonesia/ calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Nakertrans	
		13. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Nakertrans	
		14. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Nakertrans	
		15. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Dinas Nakertrans	
		16. Persentase pereusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0	Dinas Nakertrans	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	0	Dinas Nakertrans	
		18. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun	0	Dinas Nakertrans	
		19. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	0	Dinas Nakertrans	
		20. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	0	Dinas Nakertrans	
		21. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	0	Dinas Nakertrans	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Nakertrans	
		23. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Nakertrans	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Nakertrans	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Nakertrans	
		26. Jumlah perselisihan hak	0	Dinas Nakertrans	
		27. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Dinas Nakertrans	
		28. Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Nakertrans	
		29. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Dinas Nakertrans	
		30. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Nakertrans	

		31. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Dinas Nakertrans	
		32. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	0	Dinas Nakertrans	
		33. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	0	Dinas Nakertrans	
		34. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		35. Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		36. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		37. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		38. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		39. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	0	Dinas Nakertrans	
		40. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		41. Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	Dinas Nakertrans	
		42. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/system informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	0	Dinas Nakertrans	
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	0	Dinas Nakertrans	

		44. Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	0	Dinas Nakertrans	
		45. Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	0	Dinas Nakertrans	
		46. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	0	Dinas Nakertrans	
		47. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	0	Dinas Nakertrans	
		48. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	0	Dinas Nakertrans	
		49. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan social	0	Dinas Nakertrans	
		50. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	0	Dinas Nakertrans	
		51. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	0	Dinas Nakertrans	
		52. Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	0	Dinas Nakertrans	
		53. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	0	Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	2 media cetak, 1 radio dan 2 tv	Dinas P3AP2	
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	1 (UPTD PPA dengan ISO 90001)	Dinas P3AP2	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	Dinas P3AP2	

		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 UPTD dan 10 P2TP2A	Dinas P3AP2	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	1 UPTD	Dinas P3AP2	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Dinas P3AP2	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Dinas P3AP2	
		8. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Evaluasi PKDRT dan Evaluasi TPPO	Dinas P3AP2	
		9. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 unit provinsi dan 1 unit Kota Jambi	Dinas P3AP2	
		10. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	80,43%	Dinas P3AP2	
		11. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	- 1 UPTD PPA Prov. Jambi - 10 P2TP2A di 10 kab/kota - 1 unit UPPA Polda Jambi - UPPA Polres kab/kota - LPAI Jambi - KPI wilayah Jambi - DPW lingkungan wanita Indonesia - Jambi	Dinas P3AP2	
		12. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	UPTD UPPA, DPW HWDI Prov. Jambi	Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas KETahanan Pangan	

		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	ada	Dinas KETahanan Pangan	
		4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan local	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada	Dinas KETahanan Pangan	
		10. Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada	Dinas KETahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi		Biro Pem dan Otda	
		2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		Biro Pem dan Otda	
		3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		Biro Pem dan Otda	
		4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya		Biro Pem dan Otda	

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)		Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.		Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dinas Lingkungan Hidup	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan Keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dinas Lingkungan Hidup	
		7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota		Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Fasilitasi pelayanan adminduk	100%	Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	40 desa	Dinas P3AP2	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	36 desa	Dinas P3AP2	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1.399	Dinas P3AP2	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1.164	Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Dinas P3AP2	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,7%	Dinas P3AP2	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	47,8%	Dinas P3AP2	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	5,47%	Dinas P3AP2	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	11	Dinas P3AP2	
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas P3AP2	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68,79%	Dinas P3AP2	

		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	Dinas P3AP2	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	76,8%	Dinas P3AP2	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,37%	Dinas P3AP2	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	44,48%	Dinas P3AP2	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0.54%	Dinas Perhubungan	
		2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	37,8%	Dinas Perhubungan	
		3. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	0,556%	Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		3. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Dinas Kominfo	

		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		Dinas Kominfo	
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Dinas Kominfo	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Kominfo	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Dinas Kominfo	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Kominfo	
		9. Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Dinas Kominfo	
		10. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah		Dinas Kominfo	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Kominfo	

		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Kominfo	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Dinas Kominfo	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Kominfo	
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Dinas Kominfo	
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Kominfo	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	21,05%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor, cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	16,21%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi	10,31%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi	16,21%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26,35%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		13. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	87,60%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		15. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,54%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,87%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		17. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	39,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3,31%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	2,29%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, on one meeting	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		6. Kegiatan penerimaan	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Via aplikasi wa	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	53 izin dan 143 non izin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	PMDM: 2.486.265,40 PMA: 321.801,12 Total: 2.808.066,52	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	50 peserta	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	12 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	619 izin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	Dinas kepemudaan dan Olahraga	

		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	80 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepelopran pemuda	8 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	PPI : 22 orang TOT : 30 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		5. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	402 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		6. Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	46 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		7. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 event	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		8. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	63971 orang	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		9. Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	30 organisasi	Dinas kepemudaan dan Olahraga	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Tidak ada	Dinas Kominfo	
		2. Jumlah survey statistic sectoral yang dilakukan	23 survey	Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		3. Jumlah kompilasi statistic sectoral yangn dilakukan	24 kompilasi data	Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		4. Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi BPS	23 survey	Dinas Kominfo	
		5. Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	24 survey	Dinas Kominfo	
		6. Persentase kelengkapan metada kegiatan statistic sectoral	0	Dinas Kominfo	Akan dilaksanakan Tahun 2021
		7. Persentase kelengkapan metada indicator sektoral	0	Dinas Kominfo	Akan dilaksanakan Tahun 2021

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Kominfo	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah		Dinas Kominfo	
		3. Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Kominfo	
		4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		Dinas Kominfo	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Budpar	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagam)		Dinas Budpar	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Budpar	

		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Dinas Budpar	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Budpar	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Dinas Budpar	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Dinas Budpar	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Dinas Budpar	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Dinas Budpar	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Budpar	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Dinas Budpar	
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Budpar	
		13. Pembentukan tim pendaftaran		Dinas Budpar	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		Dinas Budpar	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Dinas Budpar	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	

		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,27%	Dinas Perpus dan Arsip	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,68%	Dinas Perpus dan Arsip	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,001%	Dinas Perpus dan Arsip	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,96%	Dinas Perpus dan Arsip	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1 kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		7. Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		10. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada	Dinas Perpus dan Arsip	
		11. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	Tidak ada	Dinas Perpus dan Arsip	
		12. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpapn dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnua (item)	Tidak ada	Dinas Perpus dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0	Dinas Perpus dan Arsip	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0	Dinas Perpus dan Arsip	

		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Perpus dan Arsip	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpus dan Arsip	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	7302 arsip	Dinas Perpus dan Arsip	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpus dan Arsip	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Provinsi	Tidak ada	Dinas Perpus dan Arsip	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan	Dinas Perpus dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data belum tersedia
		2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	15 izin usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPI kualatunggal dan Nipah Panjang
		4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5-30GT	2 rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	

		5. Jumlah kapal yang terdaftar	240 unit kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Surat pernyataan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		7. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	68,37%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		8. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0,255%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		9. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	13 unit kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		10. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Surat pernyataan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		11. Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	8 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		12. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Surat pernyataan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		13. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	43 POKMAS	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		14. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	8 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Dinas budpar	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Dinas budpar	
		3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi		Dinas budpar	
		4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		Dinas budpar	
		5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		Dinas budpar	
		6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara		Dinas budpar	
		7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi		Dinas budpar	
		8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Dinas budpar	
		9. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara		Dinas budpar	
		10. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Dinas budpar	
		11. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		Dinas budpar	
		12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Dinas budpar	
		13. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		Dinas budpar	
		14. Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan		Dinas budpar	
		15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Dinas budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	- Optimasi Lahan Pertanian: 2500 Ha - Rehab jaringan irigasi pertanian: 4525 Ha - Irigasi perpompaaan: 18 unit - Pembangunan embung pertanian: 15 unit - Irigasi perpipaan: 8 unit - Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi: Urea 26.199 Ton, SP36 12.416Ton, ZA 9.702 Ton, NPK 53.727 Ton, Organik 4.400 Ton - Prasarana paska panen holti lainnya: 1 unit - Prasarana pengolahan cabe/bawang: 2 unit - Sarana paska panen horti lainnya: 2 unit - Sarana pengolahan cabe/bawang: 3 unit - Sarana pemasaran hotikultura: 1 unit - Power thresher (pasca panen hortikultura): 19 unit - Power thresher (pasca panen pangan: 22 unit - Corn sheller: 6 unit - Power thresher multiguna: 10 unit - Power thresher multiguna mobile: 11 unit - Husker/ polisher: 2 unit - Color sorter: 1 unit - UPH Jagung + Bangunan: 3 unit - UPH Kedelai + Bangunan: 8	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Peternakan	

			unit - UPH Tanaman Pangan Lainnya + bangunan: 3 unit		
		2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	- Realisasi luas sertifikasi buah-buahan tahun 2020 : 52 unit - Realisasi sertifikasi benih bawang tahun 2020: 21 unit	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		3. Dokumen pengawasan benih yang beredar	- Realisasi luas sertifikasi buah-buahan tahun 2020 : 9.115 label - Realisasi sertifikasi benih bawang tahun 2020: 840 label	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		4. Prasarana pertanian yang digunakan	- Optimalisasi lahan pertanian: 99,35% - Rehab jaringan irigasi pertanian: 97,31% - Irigasi Perpompaaan: 100% - Pembangunan embung pertanian: 100% - Irigasi perpipaan: 100% - Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi: Urea 89,95%, SP36 89,95%, ZA 88,87%, NPK 91,74%, Organik 86,11% - Prasarana pasca panen horti lainnya: 100% - Prasarana pengolahan Cabe/Bawang: 100% - UPH Jagung + Bangunan: 100% - UPH kedelai + Bangunan: 100% - UPH Tanaman Pangan lainnya + bangunan: 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	156.031 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	

		6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	156.381 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		7. Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		8. Persentase sarana pertanian yang digunakan	- Sarana pengolahan cabe/bawang: 100% - Sarana pemasaran hortikultura: 100% - Power thresher (pasca panen hortikultura): 100% - Power thresher (pasca panen pangan: 100% - Corn sheller: 100% - Power thresher multiguna: 100% - Power thresher multiguna mobile: 100% - Husker/ polisher: 100% - Color sorter: 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		9. Persentase fasilitas penanggulangan bencana	99,77%	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	Kehutanan	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	100%	Dinas Kehutanan	
		2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	88,22%	Dinas Kehutanan	
		3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2.635 Ha	Dinas Kehutanan	
		4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,00036%	Dinas Kehutanan	
		5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	12,49%	Dinas Kehutanan	

		6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	39,62%	Dinas Kehutanan	
		7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Tersedia	Dinas Kehutanan	
		8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Kehutanan	
		9. Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dinas Kehutanan	
		10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	-	Dinas Kehutanan	
		11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	32,45%	Dinas Kehutanan	
		12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	-	Dinas Kehutanan	
		13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	-	Dinas Kehutanan	
		14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social	410 kelompok	Dinas Kehutanan	
		15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	25%	Dinas Kehutanan	
		16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	-	Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		3. Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		4. Perda/Pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	Pergub Jambi no. 25 Tahun 2019	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

		6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		8. Perda/Pergub terkait IUJP	Pergub Jambi No 534 Ttg Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Prov. Jambi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	13 penerbitan rekomendasi teknis 2017 s.d 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

		17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		DInas Perindag	
		2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		DInas Perindag	
		3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		DInas Perindag	
		4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru		DInas Perindag	
		5. Jumlah penanganan pengaduan konsumen		DInas Perindag	
		6. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		DInas Perindag	
		7. Jumlah komoditi potensial yang dipantau		DInas Perindag	
		8. Indeks Kinerja BPSMB		DInas Perindag	
		9. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		DInas Perindag	
		10. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan		DInas Perindag	
		11. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan		DInas Perindag	

		12. Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		DInas Perindag	
		13. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		DInas Perindag	
		14. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi		DInas Perindag	
		15. Jumlah barang beredar yang diawasi		DInas Perindag	
		16. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi : a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		DInas Perindag	
		17. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DInas Perindag	
		18. Persentase laporan harga harian melalui system informasi harga Kemendag		DInas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		DInas Perindag	
		2. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan		DInas Perindag	
		3. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan		DInas Perindag	
		4. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		DInas Perindag	

		5. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota		Dinas Perindag	

32. Urusan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	71,02%	Dinas Pendidikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	-	Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,11%	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	82,5%	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	Dinas KEsehatan	

		4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%	Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		Dinas PUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani		Dinas PUPR	
		4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota		Dinas PUPR	
		5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0	Dinas PUPR	Tidak memiliki SPAL
		6. Rasio kemantapan jalan	76,815%	Dinas PUPR	
		7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Dinas PUPR	

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan Rakyat	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Dinas PUPR	
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintahan Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	54,38%	Dinas PUPR	

		3. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	0%	Dinas PUPR	
		4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1,88%	Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase gangguan trantibumlinmas			
		2. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan			
		3. Persentase penanganan pra bencana			
		4. Persentase penanganan tanggap darurat bencana			

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial, dukcapil	
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	-	Dinas Sosial, dukcapil	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kabupaten/ kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	72,7%	Dinas Nakertrans	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,82%	Dinas Nakertrans	

		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8.536.509.488	Dinas Nakertrans	
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	87,72%	Dinas Nakertrans	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	24,92%	Dinas Nakertrans	
		6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	87,72%	Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,92%	Dinas P3AP2	
		2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,27	Dinas P3AP2	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	2,87	Dinas P3AP2	
		4. Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Dinas P3AP2	
		5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		Dinas P3AP2	
		6. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Persentase cadangan pangan		Dinas KETahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Biro Pem dan Otda	
		2. persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		Biro Pem dan Otda	
		3. persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota		Biro Pem dan Otda	

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	19%	Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Pemanfaatan data kependudukan	100%	Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	81,9%	Dinas P3AP2	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	152,6%	Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	1,72%	Dinas P3AP2	
		2. tingkat pemakaian kontrasepsi modern	60,3%	Dinas P3AP2	
		3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14%	Dinas P3AP2	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Provinsi	0,53	Dinas Perhubungan	
		2. V/C ratio di jalan Provinsi	16	Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Dinas Kominfo	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	7,48%	Dinas Koperasi dan UKM	
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	3,29%	Dinas Koperasi dan UKM	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di provinsi	-13,55%	Dinas PM dan PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	50,84%	Dispora	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,000027%	Dispora	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	570	Dispora	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Dinas Kominfo	

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	53,82%	Dinas Kominfo	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Terlestariannya Cagar Budaya		Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	72,5%	Dinas Kelautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan		Dinas Budpar	

		2. Pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi		Dinas Budpar	
		3. Tingkat hunian akomodasi di provinsi		Dinas Budpar	
		4. Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB provinsi (harga berlaku)		Dinas Budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Dinas holtikultura,	
		2. Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	135,24%	Dinas holtikultura,	

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	kehutanan	1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	60,22%	Dinas Kehutanan	
		2. Tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	36,95%	Dinas Kehutanan	
		3. Tingkat rehabilitasi luas lahan kritis	0,28%	Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	0%	Dinas ESDM	
		2. Persentase desa yang telah teraliri listrik	99,49%	Dinas ESDM	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor non migas	21,96%	Dinas Perindag	
		2. Persentase penanganan pengaduan konsumen	82,5%	Dinas Perindag	
		3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	Dinas Perindag	

		4. Tertib usaha	0	Dinas Perindag	
		5. Persentase kinerja realisasi pupuk	0	Dinas Perindag	
		6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	131%	Dinas Perindag	
		7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	0	Dinas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Tingkat pertambahan jumlah industry besar di provinsi	0,47%	Dinas Perindag	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	16,67%	Dinas Perindag	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,056%	Dinas Perindag	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindag	
		5. persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindag	
		6. ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		Dinas Perindag	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	0,184%	Bakeuda	
		Rasio PAD	0,84%	Bakeuda	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	Bakeuda	
		Opini laporan Keuangan	WTP	Inspektorat	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Maturitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3	Inspektorat	

2. Kepegawaian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	596%	BKD	
		Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13,6%	BKD	
		Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)	-	BKD	

3. Manajemen Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget Execution	28,22%	Bakeuda	
		Revenue mobilization	8,56%	Bakeuda	
		Assesment Management	-	Bakeuda	
		Cash Management	-	Bakeuda	

4. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga

mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1	91-≥100	Sangat Tinggi	
2	76 -90	Tingg	
3	66 -75	Sedan	
4	51 -65	Renda	
5	≤	Sangat Rendah	

A. Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2020 secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

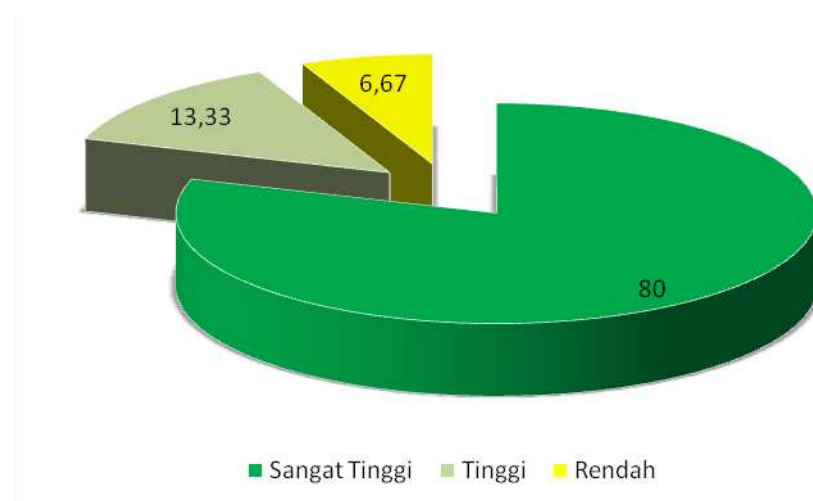
Tabel 2.6
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
sampai dengan Tahun 2020

No.	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	100%	B	100
2.	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	71,5	71,29	99,71	71,8	99,29
3.	IDG	61,93	66,01	88,44	133,98	67,01	131,98
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68	77	69,76	90,60	79	88,30
5.	Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,4	4,09	292,14	1,5	272,67
6.	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	21,50	18,99	88,33	22,00	80,91
7.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.125	3.005	93,47	3.217	93,41
8.	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56	78,93	76,51	96,93	79,54	96,19
9.	Rasio Elektrifikasi	81,5	95%	99,90	105,16	96	104,06
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	75	70,71	94,28	80	88,39
11.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35	84	76,89	91,54	91	84,49
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	65	68,06	104,71	66	103,12
13.	Angka Kemiskinan	9,12	7,57	7,58	99,86	7,4	102,43
14.	Tingkat pengangguran terbuka	4,20	3	5,13	58,47	2,80	54,58
15.	Laju Pertumbuhan penduduk	2,24	1,91	1,34	142,53	1,82	135,82

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan criteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 12 indikator (80%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator (13,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,67%) terealisasi rendah. Sehingga bila dihitung rata-rata keseluruhan IKU telah tercapai 93,33% dari target tahun 2020 dan berbanding sama dengan target akhir RPJMD atau masuk dalam criteria capaian tinggi. Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2020 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2

Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik Berkualitas.

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

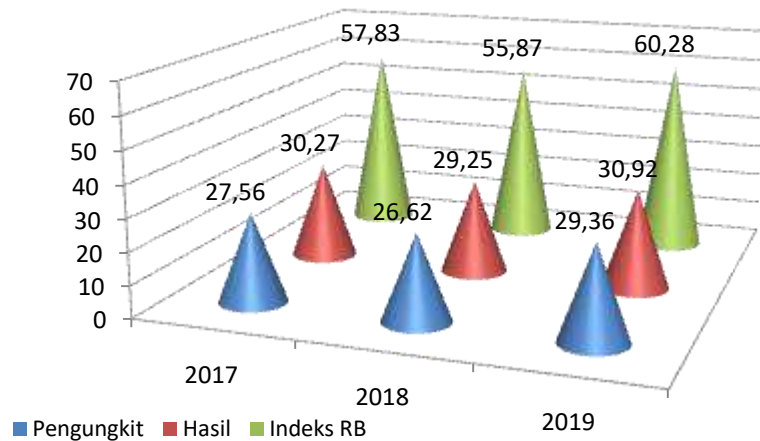
Tabel 2.7
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2019			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	B	B	100	B

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan diseluruh daerah diIndonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indicator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks

Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 dikarenakan hasil evaluasi belum diterima hingga laporan ini disusun. Capaian dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

Gambar 2.3
Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta
Komponen pengungkit dan komponen hasilnya



Sumber: KemenpanRB, 2019

Berdasarkan komponen pengungkit penilaian capaian tersebut, hampir seluruh komponen mengalami perbaikan nilai, kecuali adalah komponen penataan tata laksana, komponen penataan system manajemen SDM, dan komponen penguatan akuntabilitas. Sedangkan komponen pengungkit lainnya mengalami sedikit penurunan. Secara detil perubahan nilai per komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,79	2,27
2	Penataan peraturan perundang-	5,00	1,35	1,35
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00	2,66	2,96
4	Penataan tata laksana	5,00	2,08	2,44
5	Penataan sistem manajemen SDM	15,00	11,05	11,29
6	Penguatan akuntabilitas	6,00	3,30	3,65
7	Penguatan pengawasan	12,00	1,65	2,35
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	2,74	3,05
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	26,62	29,36
II	Komponen Hasil			
	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	8,40	8,40
	Survei internal integritas organisasi	6,00	3,89	4,42
	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	5,76	6,32
	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
	Survei eksternal Pelayanan publik	10,00	8,20	8,78
	Total komponen hasil (B)	40,00	29,25	30,92
	Indeks reformasi birokrasi (A+B)	100,00	55,87	60,26

Sumber: KemenPANRB, 2019

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pengelolaan kearsipan dapat dilihat hasilnya dari hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian cukup baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan nilai penataan organisasi/kelembagaan adalah penataan struktur organisasi dan tata laksana terus disempurnakan setiap tahun untuk mencapai struktur ideal yang diinginkan. Dalam rangka penguatan komponen penataan Ketatalaksanaan, telah

disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jambi.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP, diantaranya melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) Pemerintah Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan SKP Online berbasis kinerja dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik ditingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah

instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Tabel 2.9
Kategori Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
C	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-	Kurang

Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2019 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2019 ini mencapai 88,45% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian.

Dalam rangka perbaikan komponen perencanaan kinerja, selain telah melakukan perubahan atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diikuti oleh perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan melibatkan seluruh pimpinan di level Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyusun Pohon Kinerja (logical framework) beserta Cascading Kinerjanya sekaligus mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja serta

memantau perjanjian kinerja sampai dengan level Staf/fungsional sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan dan didukung oleh capaian kinerja yang secara umum menunjukkan capaian yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kedelapan kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi sangat tinggi atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun

2020. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2020 masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 2.10
Realisasi Capaian Komponen Hasil Opini BPK
Terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan public bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bias dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsu yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Tabel 2.11
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020

UnsurPelayanan	2017	2018	2019	2020
U1: Persyaratan pelayanan	78,07	81,713	83,862	84,296
U2: Prosedurpelayanan	78,14	81,390	82,776	83,877
U3: Waktu pelayanan	76,53	78,860	81,326	81,741
U4: Biaya/tarifpelayanan	78,88	82,229	83,006	85,226
U5: Produk/hasil pelayanan	78,11	79,931	81,742	82,759
U6: Kemampuan petugas pelayanan	80,43	80,763	82,070	82,665
U7: Perilaku petugas pelayanan	81,03	81,858	82,480	83,057
U8: Maklumat pelayanan	76,77	78,916	80,961	81,740
U9: Mekanismepengaduan pelayanan	75,75	79,775	80,382	82,451
Indeks KepuasanMasyarakat	78,19	80,604	82,063	83,090

Pada tahun 2020, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan public Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata 83,090.

Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsur pelayanan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan terendah adalah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
4. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
5. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. Program penataan batas dan wilayah administrasi;
7. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip;
8. Program Pengembangan kearsipan;
9. Program Profesionalisasi PNS;
10. Program Manajemen pelayanan kediklatan;
11. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka;
12. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi;
13. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS;
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Program penelitian dan pengembangan;
16. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi;
17. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi;
18. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah;
20. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika;
21. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

22. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca;
23. Program Reformasi Birokrasi;
24. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi;
- b. Unsure-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*resultoriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*);
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggatwaktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisilain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal;
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik;
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perludi lakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan

keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah;

- e. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh system IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

SASARAN 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan

dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 71,29 atau melebihi target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 71,5.

Tabel 2.12

Capaian IPM Sebagai Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan
Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
IPM	68,24	71,5	71,29	99,71	71,8

Bila melihat capaian IPM Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Data yang dirilis tahun 2020 menunjukkan peningkatan IPM sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya, yaitu dari 71,26 menjadi 71,29 atau meningkat 0,03%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2020 yaitu 71,5 atau terealisasi sebesar 99,71%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2020 kinerja indikator IPM telah tercapai sebesar 99,29%.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (*UHH*) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2020. IPM Provinsi Jambi meningkat dari 66,14 pada tahun 2011 menjadi 71,29 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun.

Kurun waktu 2011 hingga 2020 IPM Provinsi Jambi menunjukkan kemajuan yang besar. Pada tahun 2018 IPM Provinsi Jambi telah menembus angka 70 poin yang berarti meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” dibandingkan

dengan tahun 2017. Hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri dimana bisa dikatakan IPM Provinsi Jambi telah “naik kelas”. Pada periode 2019-2020, IPM Provinsi Jambi tumbuh 0,04 persen.

Pertumbuhan pada periode tersebut lebih lambat apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2018-2019, yang tumbuh sebesar 0,86 persen. Melambatnya pertumbuhan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh tekanan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada indeks pengeluaran akibat pandemi Covid-19.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2011-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan nilai komponennya. Seiring dengannya, angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, Provinsi Jambi telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,12 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Jambi hanya sebesar 70,04 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 71,16 tahun.

Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia

harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6minggu)setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab lain.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indicator keberhasilan pembangunan sector kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka ini mengalami perbaikan yang signifikan pada data Supas Tahun 2015 dan SDKI 2015, dimana AKI menurun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup atau telah terjadi peningkatan kinerja penurunan AKI sebesar 15,04%. Untuk mengetahui data tahunan, maka yang digunakan adalah jumlah kematian ibu.

Tabel 2.13

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kerinci	6	6	4	5	4	8
2.	Merangin	10	6	5	5	9	5
3.	Sarolangun	3	5	4	4	4	5
4.	Batang Hari	4	2	8	3	7	8
5.	Bungo	8	1	5	1	9	1
6.	Tebo	2	9	4	3	10	6
7.	Muaro Jambi	6	3	5	2	4	2
8.	Tanjab Barat	3	5	7	4	5	12
9.	Tanjab Timur	5	8	6	4	2	3
10.	Kota Jambi	7	3	4	2	5	11
11.	Kota Sei Penuh	2	2	2	2	0	0
Provinsi		56	59	54	46	59	61

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2020

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2020. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2020, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebanyak 61 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 12 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan 0 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetric pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020, jenis terbanyak adalah perdarahan dan hipertensi. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga.

Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi(AKB). Angka KematianBayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitive terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menja di 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup menggembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Tabel 2.14

Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kerinci	43	42	42	49	34
2.	Merangin	25	35	35	32	25
3.	Sarolangun	22	21	21	23	35
4.	Batang Hari	19	25	25	29	36
5.	Bungo	15	12	12	21	20
6.	Tebo	16	11	11	13	29
7.	Muaro Jambi	13	35	35	33	19
8.	Tanjab Barat	44	38	38	52	31
9.	Tanjab Timur	10	32	32	26	16
10.	Kota Jambi	12	4	4	8	19
11.	Kota Sei Penuh	20	6	6	4	0
Provinsi		273	239	261	290	264

Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 264 orang tertinggi terdapat terdapat pada kabupaten Batanghari 36 orang dan kabupaten sarolangun 35 orang, kabupaten kerinci 34 orang.

Dilihat dari jumlah kematian neonatal 0-6 hari meninggal 235 orang bayi dengan penyebab kematian adalah BBLR dan asfiksia. Pada bayi yang berumur 7-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 48 orang sedangkan yang berumur 0-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 283 orang dengan penyebab BBLR 120 orang (42,40%) dan asfiksia sebesar 91 orang (32,15%).

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dipuskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan

imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ke tingkat desa/kelurahan (UCI Desa).

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadargizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi pendek pada balita mencapai 37,9%. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi pendek pada anak balita menjadi 30,7% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 19% dalam kurun 5 tahun tersebut.

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi berdasarkan by name by address, jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi sebanyak 70 kasus, kasus terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 17 kasus, Kabupaten Tebo sebesar 11 kasus dan Kabupaten Batanghari sebesar 6 kasus, kasus gizi buruk meninggal ada di Kabupaten Muaro Jambi 1 orang, Kabupaten Sarolangun 1 orang dan Kabupaten Tanjab Barat 1 orang.

Kab/Kota yang mengirimkan kasus gizi buruk lebih banyak hal ini disebabkan karena survailans pelacakan kasus gizi buruk berjalan dengan baik, semakin banyak penemuan kasus harapan kita semakin banyak anak yang bisa di intervensi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memberikan bantuan makanan pangan lokus untuk anak gizi buruk

sebanyak 5 kasus dengan hari makan sebanyak 90 hari @ Rp. 20.000,- sehari makan.

Tabel 2.15

Intervensi Gizi Spesifik Yang Dilaksanakan Di
Provinsi Jambi Tahun 2020

No	KABUPATEN/ KOTA	INDIKATOR GIZI								
		Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT			Persentase Balita Kurus yang mendapat PMT			Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah		
		Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%
1	KERINCI	483	483	100	1.285	1.285	100	4.209	3.638	86,4
2	KOTA S.PENUH	85	85	100	10	10	100	1.615	1.584	98,1
3	MERANGIN	1.057	889	84,1	2.693	2.069	76,8	8.017	7.227	90,1
4	SAROLANGUN	361	361	100	680	680	100	7.084	6.482	91,5
5	BATANGHARI	484	484	100	3.230	3.230	100	5.689	5.456	95,9
6	MUARAJAMBI	333	309	92,8	149	149	100	10.825	10.120	93,5
7	TANJAB TIMUR	286	276	96,5	673	673	100	4.264	3.507	82,2
8	TANJABBARAT	647	632	97,7	721	697	96,7	7.096	6.678	94,1
9	TEBO	1.452	1.054	72,6	734	734	100	7.404	6.620	89,4
10	BUNGO	49	49	100	3	3	100	8.736	7.682	87,9
11	KOTAJAMBI	752	689	91,6	269	257	95,5	11.613	11.085	95,5
	PROVINSI	5.989	5.311	88,7	10.447	9.787	93,7	76.552	70.079	91,5

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Data diolah, 2020

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Bentuk intervensi yang diberikan antara lain adalah pemberian suplemen kepada ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita serta pemberian suplemen vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun. Khusus pada balita yang tergolong kurus, semua atau 100% telah mendapat makanan tambahan di Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten/kota untuk memiliki puskesmas terakreditasi. Dari 206 puskesmas yang ada, sampai dengan tahun 2020 telah terakreditasi 188 puskesmas dengan sebagian besar klasifikasi akreditasinya

adalah Madya sebanyak 112 puskesmas (59,5%), dan Dasar sebanyak 55 Puskesmas (29,2%). Selanjutnya klasifikasi utama sebanyak 18 puskesmas (9,5%), dan klasifikasi paripurna 3 puskesmas (1,5%). Puskesmas dengan klasifikasi Paripurna terdapat di Kota Jambi sebanyak 2 Puskesmas, Kabupaten Tebo sebanyak 1 Puskesmas.

b. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan taraf kehidupan, sudah selayaknya masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah proses belajar mengajar agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,38 tahun sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 1,07 tahun.

Selama periode 2011 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,36 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi telah mencapai 12,98 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan Diploma 1.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tumbuh 1,54 persen per tahun selama periode 2011 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,55 tahun atau hingga kelas IX (SMP kelas III).

Kesempatan seluas-luasnya telah diberikan kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan berbagai upaya, pemerintah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2020 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan antara lain adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 161 Sekolah Menengah Atas, 104 Sekolah Menengah Kejuruan dan 13 sekolah luar biasa.

Selain RLS, indikator dimensi pengetahuan dalam IPM lainnya adalah Harapan Lama Sekolah atau HLS. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Pada rentang 2015-2017 capaian HLS Provinsi Jambi selalu lebih tinggi dari nasional, namun dua tahun terakhir peningkatan HLS nasional lebih cepat dari Provinsi Jambi walaupun dengan selisih yang sangat kecil. Pada tahun 2019, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,93 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018 yang lalu.

c. Dimensi Standar Hidup layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat

Provinsi Jambi mencapai Rp 10,392juta per tahun. Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan, terakhir pada tahun 2020 berfluktuasi dan mengalami penurunan sebesar 0,98persen.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi diatas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Upaya Kesehatan Perorangan;
- 3) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 4) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- 5) Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi;
- 6) Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;
- 7) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- 8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular;
- 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 14) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 15) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga;
- 16) Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda;
- 17) Program Kesehatan Ibu dan Anak;
- 18) Program Kesehatan Anak balita;

- 19) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 20) Program Pendidikan SMA;
- 21) Program Pendidikan SMK;
- 22) Program BOS;
- 23) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan :

- a. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
- b. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang dimasyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadang kala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan;
- c. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi diseluruh Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong;
- d. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi.

Solusi :

- a. Standarisasi Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi;
- b. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil;
- c. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/pola pemberian makan anak, kesehatan

- lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya;
- d. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - e. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya;
 - f. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN 3: Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagai mana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki didalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan

dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender sertakesehatan seksual danreproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2019 (kondisi tahun2018) adalah sebesar 67,78%.

Tabel 2.16

Capaian IDG Sebagai Indicator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Dan Partisipasi Perempuan Di Berbagai Bidang Kehidupan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,93	66,01	67,78	102,68	67,01

Sumber: BP, DP3AP2, 2020

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indicator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objekeksplorasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM.

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Disamping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2020 (kondisi Tahun 2019) adalah 67,78% atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 102,68% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 98,86%.

Capaian IDG Provinsi Jambi tersebut, masih berada dibawah capaian nasional dengan tren meningkat lebih cepat dari nasional. Pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka

Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG dibawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan diparlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan.

Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Namun pada komponen perempuan sebagai tenaga profesional terlihat bahwa persentase perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan di Provinsi Jambi sudah diperhitungkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalitas.

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, dan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.

Solusi :

- a. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan;
- b. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya

SASARAN 4 : Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945(amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2020 sebagaimana tergambar dibawah ini.

Tabel. 2.17

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi
Sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya
Ketertiban Umum Daerah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi	70,68	77	69,76	90,60	79

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2019

IDI Provinsi Jambi tahun 2019 mencapai 69,76 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2018 yang capaiannya sebesar

68,71. Perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 71,00.

Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41; dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 74,12. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 76,67; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 64,63; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 69,21. Pada tahun 2019, aspek Lembaga Demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dan menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang semakin menurun. Sementara itu, meskipun capaiannya masih menjadi yang terendah di antara aspek lainnya, aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan dan menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang semakin meningkat. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan masing-masing 3,79 poin dan 1,87 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,71 poin.

Meskipun mengalami penurunan, Aspek Lembaga Demokrasi masih termasuk kategori “sedang”, sama halnya untuk kedua aspek lainnya, yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik juga masih berkategori “Sedang”.

Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2019 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, tujuh variabel yang mengalami peningkatan, dan satu variabel tidak mengalami perubahan. Dari tiga variabel yang mengalami penurunan, satu diantaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Partai Politik menurun paling tajam yaitu sebesar 64,29 poin dari 100 pada 2018 menjadi 35,71 pada 2019. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan Berkeyakinan dari 78,96 pada 2018 menjadi 71,16 pada 2019 atau turun 7,80 poin. Selanjutnya variabel Pemilu yang Bebas dan Adil turun sebesar 3,02 poin dari 95,57 pada 2018 menjadi 92,55 pada 2019.

Di sisi lain, variabel Kebebasan Berpendapat meningkat secara bermakna sebesar 52,06 poin, dari 3,47 pada 2018 menjadi 55,53 pada 2019. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat meningkat sebesar 34,38 poin dari 56,25 pada 2018 menjadi 90,63 pada 2019, variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 17,18 poin dari 29,78 pada 2018 menjadi 46,96 pada 2019, variabel Peran DPRD meningkat 13,60 poin dari 61,27 menjadi 74,87 pada 2019, variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami kenaikan sebesar 12,50 poin dari 87,50 menjadi 100 pada 2019, dan variabel Hak Memilih dan Dipilih naik 3,74 poin dari 75,52 menjadi 79,26 pada 2019, serta variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang mengalami kenaikan 2,61 poin dari sebelumnya 90,86 menjadi 93,47.

Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI 2019, dari 28 indikator terdapat 15 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi :

- a) Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- b) Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
- c) Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok;
- d) Indikator 9, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok;
- e) Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok;
- f) Indikator 11, Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- g) Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih;
- h) Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turnout*);
- i) Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan;
- j) Indikator 18, Netralitas penyelenggara pemilu;
- k) Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara;
- l) Indikator 20, Alokasi pendidikan dan kesehatan;
- m) Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik;
- n) Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan
- o) Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Terdapat 4 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a) Indikator 3, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat;
- b) Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c) Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif dprd terhadap jumlah total perda yang dihasilkan;
- d) Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.

Meskipun demikian, masih terdapat 9 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a) Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- b) Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat;
- c) Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama;
- d) Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama;
- e) Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi;
- f) Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan;
- g) Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif;
- h) Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu;
- i) Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.18
Perkembangan Skor Indikator, 2018-2019

No	Nama Indikator	2018	2019
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	50,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	25,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	4,17	66,67
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	78,26	82,61
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	50,00	25,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	100,00	55,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	83,33
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	90,63	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	98,08
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	95,76
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72,37	74,14
14	Voters turnout	77,25	85,14
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	56,60	48,50
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	86,36
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	91,14	98,73
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	91,97	94,58
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0,00	76,20
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	28,57
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	55,26	63,16
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	33,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	75,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020

Aspek kebebasan sipil ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa mengalami penurunan pada tahun 2020 terjadi 54 kali unjuk rasa dengan 6 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 11,1 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan.

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan demokrasi makin kokoh
9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Permasalahan :

Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi antara lain : faktor ideology, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosian budaya.

Beberapa permasalahan yang seringkali dialami dalam pengelolaan aksi demonstrasi diantaranya :

- a. Kemampuan manajerial;
- b. Pengalaman aparaturnya dalam mengelola aksi;
- c. Kemampuan deteksi dini yang minim;
- d. Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki;
- e. Ada tidaknya dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian dan TNI;
- f. Kondisi fisik para pendemo termasuk banyaknya jumlah serta lamanya aksi yang dilakukan;
- g. cepat atau lambatnya penerimaan aspirasi oleh pejabat yang berwenang.

Solusi :

Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada erademokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forumkomunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan profesionalitas aparaturnya dalam menangani aksi demonstrasi;
- b. Pengembangan sistem antisipasi dini;
- c. Menerapkan manajemen konflik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo, serta
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri dan TNI.

SASARAN 5 : Meningkatkan Total Faktor Productivity (TFP)

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya

alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.19

Capaian Total Factor Productivity Sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,4	4.09	292,14	1,5

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat

pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 4,09 atau terealisasi 292,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,4 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Salahsatu kontributor pertumbuhan TFP adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam baik pertambangan, migas maupun sumber daya perkebunan. Selain itu pertumbuhan pengguna telepon selular dan dampak industri 4.0 turut memberikan andil dalam pertumbuhan TFP ini terutama dalam masa pandemic Covid 19.

Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkat TFP adalah :

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Permasalahan :

TFP yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja yang lebih baik, jika tidak maka akan menambah pengangguran di Provinsi Jambi.

Solusi :

Upaya-upaya peningkatan kapasitas kemampuan angkatan kerja khususnya dalam penguasaan teknologi harus terus dilakukan, agar mereka dapat tertampung di duniakerja.

SASARAN 6 : Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran strategis perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah ditandai dengan indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB, yang capaiannya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20

Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder Terhadap PDRB Sebagai Indikator Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi Yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	21,50	18,99	88,33	22

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisadilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau

mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2020, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori tinggi karena mencapai 88,33%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana terlihat pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan carapenguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensidaerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakandari sektor-sektor

pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional;

3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan;
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan;
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia;
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan.

Permasalahan :

Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

Solusi :

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang sertamendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlunya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala.

SASARAN 7 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 3.047 kkal/kap/hari.

Tabel 2.21

Capaian Indikator Ketersediaan Energi Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.215	3.005	93,46	3.217

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2020 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar 113,753Kg beras, dan selama kurun waktu tersebut telah digunakan sebanyak 71,534Kg beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per September 2020 sebesar 42,219Kg beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhankebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkanpotensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaanenergi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 2.22

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No	Tahun	PengadaanCPPD (Kg)	Penggunaan CPPD (Kg)	Saldo/Stok (Kg)
1	2013	70.000	-	70.000
2	2014	20.000	3.449	86.551
3	2015	-	9.349	77.203
4	2016	-	22.839	54.364
5	2017	7.000	6.102	55.262
6	2018	12.000	5.400	61.862
7	2019	3.805	24.396	41.271
8	2020	948	0	42.219
Jumlah		113.753	71.534	42.219

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.005 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Tabel 2.23

Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2020

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.520	1.200
2.	Umbi-Umbian	98	144
3.	Pangan Hewani	183	288
4.	Minyak Dan Lemak	712	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	208	72
6.	Kacang-Kacangan	56	120
7.	Gula	141	120
8.	Sayuran dan Buah	128	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.005	2.400

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2020, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.005 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 84,81. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat

ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012), walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3.215 kkal/kapita/hari atau terealisasi sebesar 93,46% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini telah mencapai 93,41% atau kategori sangat tinggi.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar minimal 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan Energi ini sangat bergantung pada Kondisi Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi, sehingga apabila produksi bahan pangan meningkat, ada kecenderungan ketersediaan energi akan meningkat. Berdasarkan hasil survey Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 69.536,06 hektar. Luas

panen tertinggi terdapat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 18.597,95 hektar, sementara luas panen terendah terdapat pada Kota Jambi dengan luas panen sebesar 322,07 hektar.

Produksi padi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 386.413 ton Gabah Kering Giling (GKG). Tiga wilayah dengan produksi padi (GKG) tertinggi di Provinsi Jambi berturut-turut adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh dengan produksi masing-masing sebesar 100.061 ton, 57.279 ton dan 40.943 ton. Sedangkan produktivitas padi Provinsi Jambi adaah sebesar 4,47 ton GKG/hektar, dengan produktivitas tertinggi terdapat pada Kab. Kerinci, Kab. Tanjab Timur, dan Kota Sei. Penuh dengan produktivitas sebesar 6,10 ton GKG/ hektar dan terendah pada Kabupaten Muaro Jambi dengan produktivitas sebesar 2,91 ton GKG/ hektar.

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.

Permasalahan:

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar

disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.909 Ha (2,95%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 105 Ha (0,25%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.814 Ha (3,84%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjung Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 terjadi kemarau yang cukup panjang yang berdampak pada kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran musim tanam.

3. Produksi Tanaman Pangan Masih Rendah

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat,

begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan ujiadaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal.

4. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Belum tepat Sasaran

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah-daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi. Selain itu, keterlambatan penyaluran benih ke lapangan masih sering terjadi sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut.

5. Sarana dan Prasarana masih Sangat Terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyedia benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih;
 - b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau;
 - c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan;
 - d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian;
 - e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.
6. Kelembagaan Pertanian Belum Berkembang Dengan Baik
- Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.
7. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal
- Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu

dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, SubTerminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Solusi:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras;
3. Penyediaan benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan;
4. Penggunaan/ Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu;
6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan secara selektif;

8. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru (terutama penggunaan benih unggul);
9. Mendorong sinergitas antar subsistem agribisnis;
10. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru;
11. Mendorong peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
12. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran;
13. Mendorong pola partisipasi aktif seluruh stakeholder;
14. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia;
15. Pemberdayaan petani dan masyarakat;
16. Meningkatkan efisiensi usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil.

SASARAN 8 : Terciptanya Akselerasi pembangunan Infrastruktur Transportasi Yang Menyentuh Terhadap Akses dan Sentra perekonomian

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi. Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3)

memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap. Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.24

Capaian Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Akselerasi
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Yang Menyentuh
Terhadap Akses Dan Sentra Perekonomian

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	75,56	78,93	76,51	96,93	79,54

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan

provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2020 adalah sebesar 76,51%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2020 sebesar 78,93%, maka persentase capaian ini mencapai 96,93% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini mencapai 96,19% atau sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut:

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun);

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo);
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi;
- Kegiatan Rehab/pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi;
- Perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv);
- Kegiatan Peningkatan jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Diawal periode 2020 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.

Permasalahan :

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.
2. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.
3. Rasionalisasi anggaran tahun 2020 yang digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memutus mata rantai virus covid-19 pada Provinsi Jambi menyebabkan beberapa paket kegiatan pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan

sehingga berdampak pada tidak tercapainya target kinerja tahun 2020.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
3. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

SASARAN 9 : Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Listrik

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing.

Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.25

Capaian Rasio Elektrifikasi Sebagai Indikator
Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Rasio elektrifikasi	81,5	95	99,90	105,16	96

Pada tahun 2020, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 99,90. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95% atau terealisasi sebesar 105,16% dengan kriteria sangat tinggi. Capaian ini telah melewati target akhir tahun 2021 atau terealisasi mencapai 104,06% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 2.26

Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No.	Lokasi	Resources(Mwe)			Reserves(Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1.	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2.	Gunung Kaca,	25	-	-	-	-
3.	Sungai Betung,	100	-	-	-	-
4.	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5.	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6.	Air Dikit,	25	-	-	-	-
7.	Graha Nyabu,	-	185	-	-	-
8.	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*)

yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.27

Lokasi potensi Air Terjun di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN	LOKASI	KET
1.	MERANGIN	Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		Desa Sepantai Renah	
		Desa Terapung Air Liki	
		Desa Terapung Air Liki Baru	
		Desa Terapung Ngaol Ilir	
		Desa Tanjung Beringin	
2.	TEBO	Desa Semambu Kec. Sumay	
3.	KERINCI	Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180KW
		Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4.	SAROLANGUN	Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		Desa Simpang Narso Kecil	
		Desa Padang Jering	
		Desa Pulau Langsat	
5.	BUNGO	Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk	10 KW
		Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.28

Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO.	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI
1.	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2.	BEDENGIV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3.	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4.	TALANGKEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5.	PANCURANARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6.	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7.	PANCURANTUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8.	TELUNBERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9.	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10.	GUNUNGTUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi. Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah

tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, namun dengan gap yang semakin mengecil, bahkan pada tahun 2020 capaiannya selisih 0,09 dibanding nasional. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah Program Pengembangan Energi.

Permasalahan :

Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal.

Solusi :

Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi.

SASARAN 10 : Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih Dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan.

Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan

perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

1. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahna akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Tabel 2.29

Capaian Sasaran Meningkatkan Akses
Terhadap Air Bersih Tahun 2020

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	62,75	75	70,71	94,28	80

Pada tahun 2020, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 70,71 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75 persen atau terealisasi sebesar 94,28% dengan kriteria sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 88,38% dengan kategori tinggi.

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 70,71%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75% atau hanya terealisasi sebesar 94,28% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 88,38% dari target akhir dan masih termasuk dalam kategori tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian

Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional. Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2020 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Pada tahun 2020, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 76,89 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan

sebesar 84 persen atau terealisasi sebesar 91,53% dengan kriteria sangatteringgi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 84,49 persen dengan kategori tinggi. Capaian tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2019, dimana pada tahun 2019 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 73,3 persen.

Tabel 2.30

Capaian Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Sebagai Indikator Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
jaringan irigasi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	66,36	84	76,89	91,53	91

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian.

Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air.

Permasalahan :

Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi karena beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti longsor yang penanganannya tidak bisa langsung pada tahun anggaran tersebut.

Solusi :

Percepatan rehabilitasi jaringan pada Tahun Anggaran 2021.

SASARAN 11 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan.

Keinginan luhur tersebut diejawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 3.31

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sebagai Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	65	68,06	104,70	66

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, dan kualitas udara ambien. IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

Data realisasi IKLH tahun 2020 yang disampaikan pada laporan ini merupakan data yang dirilis pada tahun 2020 dan merupakan kondisi tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH Provinsi Jambi melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 104,70% atau masuk dalam kategori

sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir, maka realisasi ini telah mencapai 103,12% dari target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 66 atau telah terealisasi sangat tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen.

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 tidak terlalu berat karena pemahaman penduduk/perusahaan terhadap tata kelola lahan sudah semakin baik.

Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 12 hot spot dengan kategori high conf rate >80% di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka

dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan;
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya;
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar;
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku;
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya;
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral;

7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang;
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor.

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar perusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*.

Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan kepatuhan PNBP, pada tahun 2020 Provinsi Jambi mendapatkan Juara III Penghargaan Subroto Bidang Kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara Kategori Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Terbaik.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan;
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Permasalahan :

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat;
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal;
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara.

Solusi :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali;
3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan;

4. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

SASARAN 12 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerjayang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2020 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32

Capaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kemiskinan	9,12	7,57	7,58	99,09	7,4

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 101,13%, atau masuk kategori sangat tinggi dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 97,62% dan juga termasuk kategori sangat tinggi.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode Maret 2011-Maret 2020 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode Maret-September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2011-Maret 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 272,77 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 277,80 ribu orang pada Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada Maret 2020 sebanyak 277,80 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019, maka selama enam bulan tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,4 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sebanyak 8,5 ribu orang dan daerah pedesaan turun sebesar 4,0 ribu orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 9,75 persen menjadi 10,41 persen. Sedangkan di pedesaan turun dari 6,44 persen menjadi 6,23 persen dibandingkan dengan September 2019.

Tabel 2.33

Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi
Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020

Daerah	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (000)		
	Maret 2019	September 2019	Maret 2020	Maret 2019	September 2019	Maret 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota	9,81	9,75	10,41	115,08	115,16	123,64
Perdesaan	6,53	6,44	6,23	159,24	158,20	154,16
Kota+Perdesaan	7,60	7,51	7,58	274,32	273,37	277,80

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2019-Maret 2020.

Selama periode September 2019-Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,09 persen, yaitu dari Rp 464.558 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 483.542 per kapita per bulan pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2020 sebesar 76,13 persen.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kedalaman

kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2020, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,169 pada Maret 2019 menjadi 1,096 pada September 2020. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,264 menjadi 0,251 pada periode yang sama.

Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian;

2. Program pengembangan usaha peternakan;
3. Program pengembangan perikanan budidaya;
4. Program pengembangan perikanan tangkap;
5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman;
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan;
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS;
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Permasalahan :

Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi :

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi;
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

SASARAN 13 : Menurunnya Angka Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan

capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.34

Capaian Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20%	3%	5,13%	58,46	2,8%

Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2020 sebesar 5,13% atau meningkat 1,07% dibandingkan kondisi tahun 2019 dan terealisasi sebesar 55,6% (rendah). Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 54,58% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

TPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Agustus 2020, TPT laki-laki adalah sebesar 4, 44%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,34%. Dibandingkan Agustus 2019, peningkatan

TPT laki-laki (0,88% poin) lebih rendah dibandingkan perempuan (1,35% poin).

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,44%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,54%; dan Konstruksi sebesar 4,68%. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan Agustus 2019.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi jika dibandingkan dengan Agustus 2019 adalah Pertambangan dan penggalan (1,21% poin), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,52% poin); Transportasi dan pergudangan (0,27% poin), Perdagangan Besar dan Eceran (0,12% poin); Jasa Keuangan dan asuransi (0,11% poin); Pengadaan listrik dan gas (0,06% poin); serta Jasa lainnya (0,01% poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Industri Pengolahan (0,53% poin); Administrasi Pemerintahan (0,54% poin); Konstruksi (0,39% poin); Jasa Pendidikan (0,36% poin); Penyediaan Akomodasi makan dan minum (0,24% poin); Jasa Perusahaan (0,16% poin); serta Jasa Kesehatan (0,07% poin).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri; Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat

Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja;
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan;
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Permasalahan :

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga kerja dengantingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah;
2. Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi;
Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan

ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020.

Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- a) Penganggur;
- b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020;
- c) Penduduk yang bekerja dengan status sementaratidakbekerja;
- d) Pendudukbekerjayangmengalami pengurangan jam kerja.

Solusi :

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi;
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat;
 - b. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik;
 - c. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mempeluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

SASARAN 14 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah pendudukmenjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera

diatasi. kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.35

Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Sebagai Indikator
Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,91	1,34	142,53	1,82

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 1,34. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,91 atau terealisasi sebesar 142,53% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 135,82% dengan kategori capaian sangat tinggi.

SP2020 mencatat penduduk Provinsi Jambi pada bulan September 2020 sebanyak 3,55 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami penambahan sekitar 455,96 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 45,60 ribu setiap tahun. Dalam kurun

waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,34 % per tahun.

Jika dilihat pada diagram diatas, terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk lebih satu persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,54%. Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya penambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan.

Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan KB. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan :

Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi :

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik;
2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk pertumbuhan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 adalah sebesar 88,86% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang

mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 94,52%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis menurunnya angka pengangguran. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat sehingga penyiapan administrasi terlambat dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36**Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020**

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	172.330.213.444,41	167.556.666.531,99	97,23
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	289.125.196.587,-	243.530.153.085,23	84,23
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	2.643.087.611,-	2.537.364.106,56	96,05
4.	Terwujudnya ketertiban umumdaerah	52.069.613.000,-	50.549.180.300,40	97,08
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity(TFP)	7.706.281.455,-	7.539.825.775,57	97,84
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	15.392.270.302,-	13.930.004.623,31	90,50
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	6.440.626.982,-	6.291.848.498,72	97,69
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	322.643.385.577,14	312.318.797.238,67	96,80
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	519.026.301,-	473.351.986,51	91,20
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	33.903.182.482,-	32.306.342.587,10	95,29
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	13.677.127.148,-	12.272.486.189,90	89,73
12.	Menurunnya angka kemiskinan	21.598.410.106,-	20.397.538.504,11	94,44
13.	Menurunnya angka pengangguran	5.199.238.866,32	5.131.648.761,06	98,70
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	506.562.621,-	488.883.585,53	96,51
	Rata-rata			94,52

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unaudited, diolah), 2020

Tabel 2.37

Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Realisasi Anggaran(%)	Realisasi Kinerja (%)	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	97,23	100%	102,85
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	84,23	99,71	118,38
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	96,05	133,98	139,49
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	97,08	90,60	93,33
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity(TFP)	97,84	292,14	298,59
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	90,50	82,79	91,48
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	97,69	93,47	95,68
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	96,80	96,93	98,11
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	91,20	105,16	115,31
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	95,29	92,91	97,50
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	89,73	104,71	116,69
12.	Menurunnya angka kemiskinan	94,44	99,86	105,74
13.	Menurunnya angka pengangguran	98,70	58,47%	59,24
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	96,51	142,53	147,68

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unaudited, diolah), 2020

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Upaya Kesehateraan Sosial;
- 7) Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan KAT;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil;

- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Gambaran Umum Pelaksanakaan Tugas Pembantuan di Provinsi

A. Kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian integral daripada pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi social yang adil dan merata melalui pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai gerak dasar pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah terciptanya perubahan perilaku penyandang masalah kesejahteraan social lebih khusus bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan permasalahan yang semakin kompleks.

Potensi masalah kesejahteraan social KAT disebabkan oleh beberapa aspek yang menyangkut kehidupannya meliputi :

- 1) Aspek Sosial Budaya Lingkungan;
- 2) Aspek Sosial Ekonomi;
- 3) Aspek Sosial Politik;
- 4) Aspek Sosial Pendidikan;
- 5) Aspek Sosial Kesehatan;
- 6) Aspek Sosial Religi.

Sementara permasalahan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin kompleks, oleh karena itu perlu adanya program pemberdayaan sosial yang berkesinambungan dan terstruktur baik terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial maupun kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah proses pembelajaran sosial yang dilakukan dengan menghargai inisiatif dan kreativitas warga KAT itu sendiri terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga masyarakat dapat mandiri untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi

kebutuhan dasar (basic human needs) dan mampu memecahkan permasalahannya.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi awal dan akhir sampai pada tahap pengakhiran kegiatan (terminasi) pemberdayaan.

B. Kegiatan Preservasi Jalan Simpang Tuan-Batas Kabupaten Muaro Jambi/Tanjung Jabung Barat – Simpang Batara Gas Plant – Kuala Tungkal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah konsekuensi logis dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum 09/PRT/M/2018, tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa system Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP tentang pendoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri menyatakan bahwa satuan kerja perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP).

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 124 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi bertanggungjawab kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV melalui pejabat terkait dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah Preservasi Jalan Sp. Tuan – Bts. Kab. Muaro Jambi / Tanjabbar – Sp. Batara Gas Plant – Kuala Tungkal di Provinsi Jambi.

C. Kegiatan Merumuskan Serta Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Sumber Daya Air

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2008 serta dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Jambi No. 226 Tahun 2008 Tentang Uraian Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2008 No. 89, Tambahan Lembaga Negara No. 4741), maka pembentukan Dinas PU Provinsi Jambi disempurnakan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi No. 42 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 08/PRTM/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, maka tugas Ditjen SDA yaitu : “Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan yang berlaku”.

D. Kementerian Pertanian (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi)

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.768.672.000,- dengan realisasi Rp. 14.669.732.450,- atau capaian Kinerja sebesar 99,33 %.

E. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran Tugas Pembantuan untuk satker TP pangan (109119), satker TP Hortikultura (109905), satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125) dan satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121) yang berasal dari dana APBN Kementerian Pertanian. Anggaran dan program kegiatan di peruntukan untuk 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

A. Kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- 1) Kegiatan monitoring dan pengawasan tujuannya untuk memperoleh gambaran awal dan akhir proses Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2020 dari awal kegiatan sampai terminasi sehingga diperoleh capaian tingkat keberhasilan selama 1 (satu) Tahun Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan monitoring Program sampai Bulan Desember 2020 mencapai 100% fisik, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp.54.630.000,-.

- 2) Kegiatan administrasi pada intinya adalah hal-hal yang fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi: Honorarium Penandatanganan SPM 1 orang, Honor Bendaharawan 1 Orang, Honor Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM 1 Orang, Honor Pelaksana Kegiatan 1 Orang, Honor Staf Pelaksana Kegiatan 1 Orang, Honor Petugas Operator Aplikasi 1 Orang, Honor Petugas BMN 1 Orang, Honor Petugas Bendahara Barang Persediaan 1 Orang, Honor Panitia Pengadaan Barang / Jasa 3 Orang. Dan Honor Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan jasa 3 Orang. Honor tersebut diberikan selama 12 bulan. Administrasi Kegiatan: biaya belanja Alat Tulis Kantor selama 9 bulan, biaya laporan dan dokumentasi selama 9 bulan dan biaya pengumuman lelang sebanyak 1 paket. Realisasi Fisik dan Keuangan dari 3 (tiga) item kegiatan tersebut diatas sampai bulan Desember 2020 serapan dana mencapai Rp.12.000.000,-
- 3) Kegiatan ini adalah membangun sarana pemukiman Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah melewati proses Penjajagan Awal pada tahun 2019 oleh Tim dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diberdayakan. Pelaksanaan pekerjaan meliputi:
- Pengelolaan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana bagi warga KAT sebanyak 19 Unit untuk 19 KK 1 paket, sampai dengan Bulan Desember 2020 adala 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp.710.600.000,-
 - Perencanaan konstruksi Pembangunan Rumah Sederhana bagi warga KAT sebanyak 19 Unit untuk 19 KK1 Paket, sampai Bulan Desember 2020 100% Fisik, sedangkan serapan Anggaran Rp. 43.600.000,-
 - Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana bagi warga KAT sebanyak 19 Unit untuk 19 KK1 Paket, sampai

Bulan Desember 2020 100% Fisik, sedangkan serapan Anggaran Rp. 30.400.000,-

- Penyiapan lahan Landclearing dan pematangan tanah untuk perumahan 1 Paket. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Penyiapan/land landclearing untuk perumahan sampai Bulan Desember 2020 mencapai 80% Fisik sedangkan serapan Anggaran sudah mencapai Rp.68.400.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana sebanyak 19 Unit untuk 19 KK. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana sampai Bulan Desember 2020 100% Fisik sedangkan serapan Anggaran Rp.710.600.000,-
- Pemberian bantuan jaminan hidup selama 6 bulan untuk 19 KK. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pemberian Bantuan Jaminan Hidup bagi Warga KAT sampai Bulan Desember 2020 mencapai 100% Fisik sedangkan penyerapan Anggaran mencapai Rp.57.00.000,-
- Memberikan bantuan bibit tanaman hortikultura 19 Paket untuk 19 KK. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga KAT sampai Bulan Desember 2020 mencapai 100% Fisik sedangkan penyerapan Anggaran mencapai Rp. 19.000.000,-
- Memberikan bantuan Peralatan Kerja 19 Paket untuk 19 KK. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga KAT sampai Bulan Desember 2020 mencapai 100 % Fisik sedangkan penyerapan Anggaran mencapai Rp. 19.000.000,-
- Kegiatan Pemberian bantuan Peralatan Rumah Tangga, 19 Paket untuk 19 KK. Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pemberian bantuan tersebut sampai Bulan Desember 2020 mencapai 100% sedangkan penyerapan Anggaran mencapai Rp.19.000.000,-

- Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Lingkungan bagi warga KAT 1 Paket dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Tahun II dialokasikan untuk warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah diberdayakan pada Tahun I. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan jaminan hidup sebanyak 60 Paket selama 6 bulan, diLokasi Suka JadiKec. Bathin VIIIKab. Sarolangun dan lokasi Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin. Kegiatan tersebut dapat direalisasikan sebanyak 60 Paket untuk 60 KK.
 - Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pemberian Jaduptersebutsampai Bulan Desember2020 mencapai 100% Fisik, sedangkan penyerapan Anggaran mencapai Rp.180.000.000,-.
 - Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Lingkungan bagi warga KAT 2 Paket dengan anggaran Rp. 400.000.000,-
- B. Kegiatan Preservasi Jalan Simpang Tuan-Batas Kabupaten Muaro Jambi/Tanjung Jabung Barat – Simpang Batara Gas Plant – Kuala Tungkal
 Pecapaian kinerja pada tahun 2020 ini dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan rincian :
 1. Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan rutin ditargetkan 38,76 Km dan terealisasi sepanjang 38,76 Km atau 100%.
 2. Panjang jalan yang mendapat Rehabilitasi Jalan/Rehabilitasi Mayor Jalan ditargetkan 1,1 Km dan terealisasi sepanjang 1,1 Km atau 100%.
 3. Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin Jembatan ditargetkan 295,50 m dan terealisasi sepanjang 295.50 atau 100%.
 4. Layanan Dukungan Manajemen Kantor ditarget kab 12 Bulan Layanan atau terealisasi 99,66%.
- C. Kegiatan Merumuskan Serta Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Sumber Daya Air

Dari analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa tugas – tugas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019 dan Renstra SKPD Tp Dinas PUPR Provinsi Jambi telah terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari progress fisik dilapangan 97,48% dan keuangan rata-rata mencapai 96,07% dengan total anggaran .sebesarRp. 4.033.336.00,-

D. Kementerian Pertanian (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi)

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.768.672.000,- dengan realisasi Rp. 14.669.732.450,- atau capaian Kinerja sebesar 99,33 %. Rincian Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1.	Dinas Perkebunan	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.512.415.000	1.491.852.250	98,64
2.	Dinas Perkebunan	Dukungan Perlindungan Perkebunan	786.076.000	772.178.300	98,23
3.	Dinas Perkebunan	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1.018.600.000	1.018.600.000	100
4.	Dinas Perkebunan	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	616.600.000	610.482.400	99,01
5.	Dinas Perkebunan	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2.417.505.000	2.403.781.600	99,43
6.	Dinas Perkebunan	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	8.417.476.000	8.372.837.900	99,47
TOTAL			14.768.672.000	14.669.732.450	99,33

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi,, 2020

E. Satuan Kerja Tanaman Pangan (Kementerian Pertanian)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Sub kegiatan :

- Kawasan Kedele, target yang di tetapkan 4.614 Ha dengan pagu Rp. 4.440.370.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.761.111.401,- (84,70%) dan realisasi fisik 90 %.
- Kawasan Kacang Tanah target yang di tetapkan 200 Ha dengan pagu Rp. 699.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 679.524.000,- (97,21%) dan realisasi fisik 100 %.
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dengan pagu Rp. 597,700,000,- target yang di tetapkan 7 lokasi, terealisasi sebesar Rp. 577.533.500,- (96,63%) dan realisasi fisik 100 %.

2) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, sub kegiatan :

- Kawasan Padi dengan pagu Rp. 10,895,125,000,- terealisasi sebesar Rp. 7.991.554.956,- (73,35%) target yang di tetapkan 8.500 Ha terealisasi sebesar 87 %.
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi dengan pagu Rp. 512,500,000,- terealisasi sebesar Rp. 511,693,003,- (99,84%) target yang di tetapkan 7 lokasi terealisasi sebesar 100 %.

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat dengan pagu Rp. 4,750,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.741.000.000,- (99,71%) target yang di tetapkan 19.000 Ha terealisasi sebesar 100 %.
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi dengan pagu Rp. 334,340,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 334.225.000,- (99,97%) target yang di tetapkan 1 lokasi terealisasi sebesar 100 %.
- Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat dengan pagu Rp. 4,995,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.993.050.000,- (99,96%) target yang di tetapkan 9.000 Ha terealisasi sebesar 100 %.

- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan pagu Rp. 1,257,650,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.256.966.025,- (99,95%) target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi sebesar 100 %.
- 5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sub kegiatan :
 - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dengan pagu Rp.2,475,570,000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.468.371.641,- (99,71%) target yang di tetapkan 83 unit terealisasi sebesar 100 %.
 - Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dengan pagu Rp.1,800,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.798.333.000,- (99,91%) target yang di tetapkan 15 unit terealisasi sebesar 100 %.
 - Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu Rp.41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 1 sertifikat terealisasi sebesar 100 %.
 - Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan dengan pagu Rp.109.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.108.100.000,- (99,17%) target yang di tetapkan 5 Lokasi terealisasi sebesar 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp.33.277.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.629.786.775,- (89,04 %).

F. Satuan Kerja Hortikultura (Kementerian Pertanian)

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, sub kegiatan :

- Kawasan Bawang Merah dengan pagu Rp.2.900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.880.707.600,- (99,33 %), target yang di tetapkan 100 Ha terealisasi 100 %.
 - Kawasan Sayuran Lainnya dengan pagu Rp. 900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 899.430.400,- (99,94%) target yang di tetapkan 300 Ha terealisasi 100 %.
 - Kawasan Aneka Cabai dengan pagu Rp.1.575.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.568.318.000,- (99,58%) target yang di tetapkan 350 Ha terealisasi 100 %.
 - Kawasan Bawang Putih dengan pagu Rp.10.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.034.000,- (99,35%) target yang di tetapkan 0,0010 Ha terealisasi 100 %.
- 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan pagu Rp.590.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.574.259.825,- (97,33%) target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100 %.
- 3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sub kegiatan :
- Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu Rp.549,822,000.- dan terealisasi sebesar Rp.545.120.200,- (99,14%) target yang di tetapkan 6 unit terealisasi 100 %.
 - Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu Rp.630.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.625.723.000,- (99,32%) target yang di tetapkan 4 Unit terealisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp.7.154.922.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.103.593.025,- (99,28 %).

G. Satuan Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kementerian Pertanian)

- 1) Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2020, dengan Peningkatan Produksi Pakan Ternak, sub kegiatan Hijauan Pakan Ternak dengan pagu Rp.5.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.496.000,- (100%) target yang ditetapkan 2 Ha terealisasi 100 %.
- 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, sub kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan dengan pagu Rp.598,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp.595.817.500,- (99,55%) target yang ditetapkan 17.500 dosis terealisasi 100 %.
- 3) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, sub kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan pagu Rp.2,468,844,000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.448.373.300,- (99,17%) target yang ditetapkan 27.940 akseptor terealisasi 100 %.
- 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), sub kegiatan :
 - Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan pagu Rp.66.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.960.000,- (99,94%) target yang ditetapkan 2 unit terealisasi 100 %.
 - Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk dengan pagu Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.000.000,- (100%) target yang ditetapkan 50 sampel terealisasi 100 %.
 - Pengendalian Pematangan Betina produktif dengan pagu Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) target yang ditetapkan 1 lokasi terealisasi 100 %.
- 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen

Satker dengan pagu Rp.308,274,000,- dan terealisasi sebesar Rp.307.678.200,- (99,81%) target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100 %.

- 6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, sub kegiatan Kelembagaan dan Usaha Peternakan dengan pagu Rp. 118,349,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.289.200,- (99,95%) target yang di tetapkan 2 lokasi terealisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.655.463.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.631.614.200,- (99,35 %).

H. Satuan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, sub kegiatan :
 - Jaringan Irigasi Tersier dengan pagu Rp.5.580.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.580.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 4.650 Ha terealisasi 100 %.
 - Irigasi Perpompaan dengan pagu Rp.2.286.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.256.000.000,- (98,69%) target yang di tetapkan 18 unit terealisasi 100 %.
 - Embung Pertanian dengan pagu Rp.1.800.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.800.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 15 unit terealisasi 100 %.
 - Irigasi Perpipaan dengan pagu Rp.800.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.800.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 8 unit terealisasi 100 %.
- 2) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, sub kegiatan :
 - Optimasi Lahan dengan pagu Rp.10,875,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.804.050.000,- (99,35%) target yang di tetapkan 2.500 Ha terealisasi 100 %.
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan pagu

Rp.467,750,000,- dan terealisasi sebesar Rp.406.150.400,- (86,83%) target yang di tetapkan 5 Lokasi terealisasi 100 %.

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan pagu Rp.1,658,400,000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.618.112.826,- (97,57%) target yang di tetapkan 12 layanan terealisasi 100 %.

3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, sub kegiatan :

- e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani dengan pagu Rp.1,764,150,000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.753.360.000,- (99,39%) target yang di tetapkan 38 lokasi terealisasi 100 %.
- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida dengan pagu Rp.929,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp.871.710.000,- (93,78%) target yang di tetapkan 11 lokasi terealisasi 100 %.

4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Bimtek, sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian dengan pagu Rp.1,274,300,000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.192.904.600,- (93,61%) target yang di tetapkan 12 lokasi terealisasi 100 %.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp.27.435.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.082.287.826 (98,71 %).

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Provinsi**

No.	K/L PNK	Dasar Pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1.	Kementerian Pertanian				Dinas Pertanian, Tanaman Pangan	33.277.615.000	29.629.786.755	89,04			
					Dinas Perkebunan	14.768.672.000	14.669.732.450	99,33			
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.655.463.000	3.631.614.200	99,35			
					Dinas Pertanian, Tanaman Pangan	27.435.100.000	27.082.287.826	98,71			
					Dinas Pertanian, Tanaman Pangan	7.154.922.000	7.103.593.025	99,28			
2.	Kementerian Sosial dan Kependudukan				Dinas Sosial, Kependudukan dan pencatatan Sipil	2.109.930.000	2.087.988.000	98,96			
3.	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup				Dinas Kehutanan	7.600.000.000	7.369.711.708	96,97			
4.	Kementerian Pekerjaan Umum				Dinas Pekerjaan Umum	11.173.902.000	11.136.207.824	99,66			
					Dinas Pekerjaan Umum	4.033.336.000	3.874.959.709	96,07			

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten/Kota**

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1.				Kabupaten Tebo	Dinas Perkebunan, Pernakan dan Perikanan	542.932.000	528.685.081	97,38			
2.				Kabupaten Tebo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.500.000.000	2.325.975.003	93,04			
3.				Kabupaten Kerinci	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	446.890.000	427.715.900	95,71			
4.				Kabupaten Merangin	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	446.890.000	408.999.100	91,52			
5.				Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.500.000.000	2.333.634.638	93,35			

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan
 - a. Kegiatan perbaikan sekat Kanal dan Kegiatan Sumur Bor terlambat direalisasikan karena adanya Pandemic Covid;
 - b. Tidak sesuai jumlah anggaran (minim) untuk pemeliharaan dengan jumlah IPG yang akan dipelihara atau diperbaiki.
2. Dinas Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah “Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat menganggarkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.”

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan

- a. Melaksanakan koordinasi ke pusat terutama ke Badan Restorasi Gambut;
- b. Melaksanakan revisi anggaran beberapa kali untuk menyesuaikan situasi dan kondisi.

2. Dinas Perkebunan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b) Terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di padu serasikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan proses pencairan dananya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jambi, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sejalan dengan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar daerah Provinsi diantaranya :

- ◆ Pendidikan Menengah
- ◆ Pendidikan Khusus.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, telah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam	100 %	Setiap Tahun

2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang	100 %	Setiap Tahun

4.1.3. Realisasi

1. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Pertama : Pendidikan Menengah.

Tabel 4.2.

Capaian SPM Pendidikan Menengah

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Pendidikan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	192.600 orang	122.730 siswa	63,72	1 Tahun
J u m l a h			192.600	122.730	63,72%	

Berdasarkan tabel 2.2 capaian SPM Pendidikan Menengah, realisasi indikator jumlah warga negara 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sebanyak 122.730 siswa dengan target 192.600 warga usia 16-18 tahun dengan persentase capaian sebesar 63,72%.

2. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kedua : Pendidikan Khusus

Tabel. 4.3

Capaian SPM Pendidikan Khusus

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Pendidikan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	1.941 orang	1.647 siswa	84,85	1 Tahun
	J u m l a		1.941	1.647	84,85	

Berdasarkan tabel 4.3 capaian SPM Pendidikan Khusus, realisasi indikator jumlah warga negara 4 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sebanyak 1.647 siswa dengan target 1.941 warga usia 4-18 tahun dengan persentase capaian sebesar 84,85%.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.182.236.120.144,20 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.646.876.567.530,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp.535.359.552.614, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri 11 program dan 47 kegiatan namun yang menjadi program yang mendukung capaian indikator SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Nama Program dan Pagu serta Realisasi Anggaran
Tahun 2020

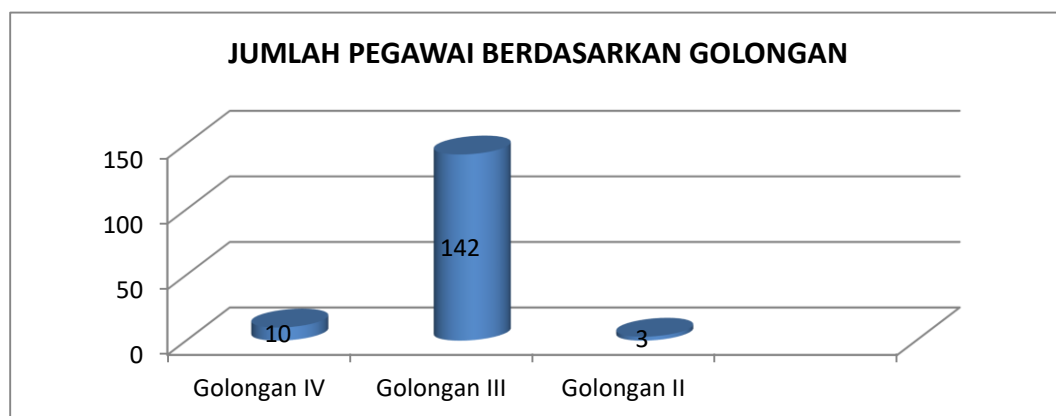
No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	14.219.183.800,00	13.826.410.697,00	97,24
2	Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.064.340.500,00	47.694.498.819,00	97,21
3	Program Pendidikan SMA	67.315.420.000,00	63.471.466.192,00	94,29
4	Program Pendidikan SMK	116.345.875.000,00	112.014.036.646,00	96,28
5	Program BOS	279.915.645.000,00	340.367.735,00	68,29

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 155 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

Gambar 4.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan :
 - a. Pejabat Struktural = 24 orang
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu = 2 orang
 - c. Fungsional Umum = 129 orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP.	1. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa prestasi diantaranya pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMAN/SMKN dan SLB, sehingga diharapkan dapat membantu dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi hingga tamat sekolah.
2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.	2. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik sehingga dapat terus melanjutkan pendidikan menengah.
3. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan	3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai bagi Anak Berkebutuhan Khusus

5. Dalam pengelolaan Dana Bos pada setiap satuan pendidikan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga masih banyak satuan pendidikan dalam perencanaannya belum menyesuaikan kondisi sekolah dengan pemenuhan standar masing-masing komponen SNP. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat terkait dengan SNP karena sama-sama merupakan ukuran mutu sekolah/ madrasah yang saling mendukung, dimana SPM diupayakan pemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi SNP.	4. Memberikan pemahaman dalam penyusunan RKAS Dana Bos di setiap satuan pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Jambi untuk optimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sejalan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 5. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam perencanaan kedepan dengan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/ kota menjadi salah satu wadah dalam penerapan SPM dalam memenuhi jumlah dan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

- ◆ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- ◆ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejaidan luar biasa provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100	2020	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejaidan luar biasa provinsi	100	2020	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

4.2.3. Realisasi

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama : Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	2.805.497	2.805.497	100	2020
J u m l a h			2.805.497	2.805.497	100	2020

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua : Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	18.647	18.647	100	2020
J u m l a h			18.647	18.647	100	2020

4.2.4 Alokasi Anggaran

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBD	534.460.000,-	339.503.900,-	63,52
2.	APBN	0,-	0,-	0
	J U M L A H	534.460.000,-	339.503.900,-	63.52

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 masih cukup kecil dan sumber anggarannya hanya bersumber dari APBD sedangkan dari APBN tidak tersedia alokasi anggarannya. Masih kecilnya alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Provinsi Jambi pada tahun 2020 tersebut oleh karena masih menghimpun dana yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sedangkan untuk dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya belum terhimpun pada tahun 2020.

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

Alokasi Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	APBD	626.960.000,-	431.183.900,-	68,77
2.	APBN	44.800.000,-	44.716.000,-	99.81
	J U M L A H	671.760.000,-	475.899.900,-	70.84

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 masih cukup kecil dan bersumber dari APBD dan APBN.

Masih kecilnya alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 tersebut oleh karena masih menghimpun dana yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sedangkan untuk dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya belum terhimpun pada tahun 2020.

Kejadian luar biasa di sini adalah Pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dengan kasus pertama di Provinsi Jambi pada Maret 2020.

4.2.5 Dukungan Personil

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Tim Gerak Cepat (TGC) sebanyak 48 orang
Terdiri dari petugas surveilans, dokter umum, perawat dan supir ambulans yang tersedia di 11 Kabupaten/Kota dan Provinsi. Tim TGC ini melakukan investigasi/ pendahuluan 1 sampai 24 jam setelah mendapatkan informasi krisis.
- b. Tim Rapid Health Assesment (RHA)
Terdiri dari dokter umum, perawat, petugas kesling, petugas epidemiologi, apoteker dan supir ambulans. Tim ini akan turun setelah 24 jam pada kejadian krisis yang besar namun sampai saat ini belum ada kejadian krisis yang sangat besar.
- c. Tim Brigade Siaga Bencana (BSB)
Tim ini berada di Rumah Sakit Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- d. Tim Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana Indonesia (HIPGABI)
Tim ini merupakan asosiasi profesi yang dibentuk sebagai upaya penanganan gawat darurat bencana di provinsi.

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi, Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB/Wabah
Tim ini di bawah pelindung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang diketuai oleh Kepala Bidang P2P, dan Sekretaris Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang beranggotakan staf seksi Surveilans dan Imunisasi, Staf Seksi Penyehatan Lingkungan, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan, Staf Bidang Kesmas, Staf Balai Laboratorium Kesehatan, dan Staf BPOM.
- b. Tim Teknis Surveilans Epidemiologi Covid-19
Tim ini disusun dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengarah, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai Ketua dengan anggota Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi serta Staf Balai Labkes.
- c. Tim Koordinasi Penanganan Covid-19
Tim ini dengan penasihat Kepala Dinas Kesehatan, Ketua oleh Kepala Bapelkes, Sekretaris oleh Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Koordinator oleh Semua Kabid, dan anggota semua Kasi di lingkungan Dinkes Provinsi Jambi serta staf yang berkompeten.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
Informasi sering terlambat dari Kab/Kota	Pro aktif kepada Kab/Kota untuk memberikan informasi kejadian krisis secepat mungkin

Seringnya pergantian petugas Kab/Kota yang pernah dilatih program krisis kesehatan	Transfer <i>knowledge</i> kepada petugas lain setelah mendapatkan pelatihan dan melakukan <i>on job training</i> sebagai langkah awal penguatan terhadap petugas yang baru
Kemampuan petugas penyelidikan dan penanggulangan KLB masih belum sama.	Asistensi teknis maupun monitoring serta evaluasi intens dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Kab/Kota.
Mutasi petugas Kab/Kota dan petugas pengelola program di Puskesmas masih cukup tinggi.	Transfer <i>knowledge</i> kepada petugas lain setelah mendapatkan pelatihan dan melakukan <i>on job training</i> sebagai langkah awal penguatan terhadap petugas yang baru
Keterbatasan dana di Kab/Kota dalam melakukan investigasi kasus atau penyelidikan dan penanggulangan KLB	Advokasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- ◆ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

- ◆ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi

4.3.3 Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi SPM	%
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota		100%		100
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		100%		100

4.3.4 Alokasi Anggaran

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2019 sebanyak 276orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap STandar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam dokume perencanaan Pemeirntah Daerah maupun Perangkat Daerah;
- 2) Tidak semua provinsi memiliki SPAM dan SPALD Regional;
- 3) Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam

standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- ◆ Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
- ◆ Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100	2020	Dinas PUPR Provinsi Jambi

4.4.3 Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi SPM	%
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2.268	100%	0	0

2	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	282	100%	282	100

4.4.4 Alokasi Anggaran

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2019 sebanyak 276orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- 1) Rendahnya alokasi APBD untuk program dan kegiatan PKP/ketergantungan daerah terhadap bantuan program dari pusat;
- 2) Lemahnya system koordinasi dan sinergi antara pemangku pembangunan perumahan;
- 3) Belum lengkapnya data perumahan yang akurat dan terupdate untuk rumah terkena bencana dan rumah relokasi program pemerintah;
- 4) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan/peraturan daerah tentang perumahan.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibumlinas untuk Provinsi adalah sebagai berikut:

- ◆ Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100	2020	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

4.5.3 Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi SPM	%
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	528	100%	528	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya	138.175.025,-	129.900.000,-	94,01%

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 305 orang PNS yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 20 orang
- Pejabat Fungsional Tertentu : 93 orang
- Fungsional Umum : 62 orang
- Pegawai Tidak Tetap : 129 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas adalah dalam penegakan Perda/Perkada yang dilaksanakan selama ini (mengacu pada SOP), Kapasitas SDM dan Kecukupan Saprass) diharapkan tidak mengakibatkan dampak, sehingga tidak ada warga negara yang dilayani akibat dampak penegakan Perda/Perkada.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

- ◆ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
- ◆ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
- ◆ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;

- ◆ Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
- ◆ Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	2019	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100	2019	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100	2019	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	100	2019	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	100	2019	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

4.6.3 Realisasi

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai saat ini memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar yang menangani khusus Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik). UPTD ini bernama PSBAWEP HARAPAN JAYA (UPTD PANTI

SOSIAL BINA ANAK, WANITA, DAN EKS PSIKOTIK) yang berlokasi di Talang Bakung dengan kapasitas 150 Orang Eks Psikotik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi belum memiliki sebuah panti khusus yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD PSBAWEP meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekreasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar di dalam panti	120	120	100	2020
J u m l a h			120	120	100	2020

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dimaksud adalah PSBAWEP HARAPAN MULYA dengan kapasitas 100 orang anak terlantar. Untuk Tahun 2020 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD PSBAWEP adalah sebanyak 50 Orang Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah, yang pada Tahun 2020, tidak mencapai target dikarenakan mengalami Refocusing Anggaran dan Minimalisir Dampak Covid-19 di Provinsi Jambi.

Tabel 4.8

Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100	50	50	2020
J u m l a h			100	50	50	

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengimplementasikannya dalam kegiatan yaitu : Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BUDI MULIA yang berlokasi di Pall V Kota Jambi. UPTD PSTW memiliki kapasitas 70 orang lansia. Pada tahun 2020 terdapat 70 orang lansia terlantar (35 nenek dan 35

kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD PSTW BUDI MULYA KOTA JAMBI.

Tabel 4.9

Target Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	70	70	100	2020
	J u m l a h		70	70	100	

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Pelayanan sosial dasar kepada Tuna Sosial khususnya Rehabilitasi Sosial dalam panti bagi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2020 BELUM dilaksanakan di UPTD PSBAWEP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi karena Calon Klien yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PSBAWEP sebagai Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial dalam Panti.

Tabel 4.10

Target Capaian SPM Bidang Sosial Keempat

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti	0	0	0	2020
	J u m l a h		0	0	0	

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permensos No 9 tahun 2018 persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk mencapai pelaksanaan SPM Bidang Sosial kelima ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran logistik bencana penanggulangan bencana melalui DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

tahun 2020 senilai Rp. 285.000.000,-.

- b. Penyediaan Anggaran Meneruskan Orang Terlantar di Perjalanan sebanyak 635 jiwa dengan dana anggaran Rp.130.000.000,-
- c. Tahun 2020 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sebanyak 1761 jiwa.

Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial di kabupaten/Kota dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.11

Target Capaian SPM Bidang Sosial Kelima

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	1761	1761	100	2020
	JUMLAH		1761	1761	100	2020

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020 didukung oleh 2 (dua) sumber pembiayaan negara yaitu **APBD** sebesar **Rp 10.036.940.682,-** (*Sepuluh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dan **APBN** sebesar **Rp 9.071.793.000** (*Sembilan Miliar Tjuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa dari total anggaran DPA APBD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 10.036.940.682,-**, (*Sepuluh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Depalan Puluh Dua Rupiah*) terdapat anggaran sebesar **Rp 5.122.926.750,-** (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau sama dengan **51.04 %** dari total Pagu Anggaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang digunakan untuk dukungan **pencapaian SPM Bidang Sosial**. Anggaran tersebut tersebar di 1 (satu) bidang teknis dan 2 (dua) UPTD.

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **129 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 26 orang
- Pejabat Fungsional tertentu : 4 orang
- Fungsional Umum : 99 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 2 UPTD (unit pelaksana teknis daerah) yaitu PSBAWEP yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Anak Terlantar, Wanita Eks Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dan Eks Psikotik dan PSTW yang memberikan Rehabilitasi Sosial dalam panti bagi lansia terlantar.	Dinas Sosial Jambi mengajukan pemekaran UPTD sesuai Kluster pelayanan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Jambi hanya memiliki 1 (unit) panti sosial disabilitas yang menangani disabilitas mental, sementara permasalahan sosial di kalangan para disabilitas lainnya belum tertangani dengan baik. Provinsi Jambi masih butuh panti sosial untuk disabilitas lainnya, seperti disabilitas daksa, disabilitas wicara dan lainnya.	Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi perlu membentuk UPTD yang menangani disabilitas lainnya serta penambahan SDM untuk memaksimalkan pelayanan sosial bagi para disabilitas di Provinsi Jambi.
Dinas Sosial Jambi mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dalam melakukan penjangkauan terhadap para disabilitas di seluruh Jambi	Pemerintah Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Jambi dipandang perlu melakukan rekrutmen PNS baru untuk memaksimalkan pejangkauan terhadap disabilitas guna memberikan pelayanan sosial.

Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Dalam Panti yang dilaksanakan UPTD PSBAWEP selama ini berlatar belakan pelayanan ketrampilan bekerja bagi anak terlantar putus sekolah	Mengajukan perubahan Dasar Hukum atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar dalam panti sehingga pola pelayanan merujuk pada pemenuhan SPM Bidang Sosial
Dinas Sosial Jambi memiliki 1 (unit) lembaga panti sosial bagi lanjut usia yakni UPTD PSTW BUDI LUHUR. Kondisi bangunannya saat ini kurang representatif lagi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia.	Dinas Sosial Jambi telah mengajukan permohonan ke Biro Asset Pemprov Jambi atas penguasaan lahan di belakang gedung PSTW lama dan karena keterbatasan anggaran lahan ytersebut belum di manfaatkan secara maksimal
Calon Penerima Manfaat yang di rujuk oleh Dinas Sosial Kab/kota belum sesuai dengan kriterias Gelandangan dan Pengemis, sehingga Rehabilitasi Sosial dalam panti tidakbisa dilaksanakan	Dinas Sosialdukcapi Provinsi Jambi melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Sosial Kab/kota mengenai criteria dan hal lainnya yang dianggap perlu.
Ketersediaan bahan pangan dan bahan sandang sebagai bufferstock gudang bencana baik di tingkat provinsi dan tingkat kab/kota terkadang mengalami kekurangan seiring dengan makin meningkatnya intensitas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.	Dinas Sosial Jambi dan Dinas Sosial kab/kota masing-masing telah memiliki gudang bencana alam dan selalu berup aya menganggarkan dana untuk penyediaan bahan pangan dan bahan sandang untuk bufferstock.

Keterbatasan Jumlah Personil yang menduduki Jabatan Fungsional dengan latar belakang Pelayanan Sosial yang masih sangat terbatas di UPTD (PSBAWEP dan PSTW)	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengajukan Analisis Jabatan Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial serta memfasilitasi keberadaan Jabatan Fungsional tersebut di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat serta mempedomani RKPD Tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang mengemban visi **“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA” atau JAMBI TUNTAS 2021**”. Hasil dari pelaksanaan pembangunan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2020 didukung oleh APBD Provinsi Jambi dan APBN termasuk dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan.
2. APBD Provinsi Jambi tahun 2020 sebesar Rp.5.244.838.971.067,04 dengan realisasi belanja Rp.3.764.965.251.275,71
3. Pendapatan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD sebesar Rp. 1.665.325.702.543,00.
4. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2010 mencapai Rp17,465 milyar meningkat menjadi Rp20,373 Milyar di tahun 2012. Jika dilihat dari PDRB harga berlaku, maka nilai PDRB pada tahun 2010 mencapai Rp53,818 milyar menjadi Rp72,654 milyar di tahun 2012. Dengan demikian kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, mengalami peningkatan dari 7,3 % pada tahun 2010, menjadi 8,69 % di tahun 2012. Peningkatan ini didukung oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector Bangunan sebesar 16,6% dan pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertambangan sebesar 2,62 %.

5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing SKPD se Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2020, tergambar pada lampiran (Data Pendukung LPPD).

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ini dibuat dan disusun dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai evaluasi agar Pembangunan di Provinsi Jambi dapat lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih.

BAB V

I. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi}} \times 100\% = \frac{\text{#####}}{\text{#####}} \times 100\% = 71,02$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	159 sekolah	
	2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia	
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia	
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia	
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia	
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	2387 orang	
	7)	Jumlah kebutuhan minnimal pendidik pada jenjanng sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2384 orang	
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	5758 orang	
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	4179 orang	
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia	
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia	
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1747 orang	

13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1226 orang	
14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	5523 orang	
15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik	162 orang	
16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	161 orang	
17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104 orang	
18)	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	
19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/ workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	data tidak tersedia	
20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	
21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	

2) IKK Outcome : Persentase Desa yang Teraliri Listrik

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kuhus}}{\text{Jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\% = \frac{1,625}{-} \times 100\% = -$	Data tidak tersedia

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
	1) Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	18 sekolah
	2) Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia

Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yng menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	549 orang
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia
	7)	Jumlah kebutuhan minnimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi	$\frac{4124}{3624579} \times 100\% = 0.11\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1)	Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	33	

2) IKK Outcome : Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di provinsi yang telah memiliki akreditasi	$\frac{33}{40} \times 100\% = 82.5\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Persentase RS rujukan yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7	

3) IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN

Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{2805497}{2805497} \times 100\% = 100.0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		
	2)	Jumlah pos kesehatan		
	3)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan		
	4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan		
	5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan		

4) IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi	$\frac{30840}{30840} \times 100\% = 100.0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		
	2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi		

	3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten / kota		

I. Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		
	6)	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (m)</i>	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% = \text{_____}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		

irigasi	2)	Persentase panjang jaringan sekunder dalam kondisi baik		
	3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		

4) **IKK Outcome : Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota		
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA		
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi		
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		

5) **IKK Outcome : Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
	1)	Jumlah SPALD Regional		
	2)	Total kapasitas SPALD Regional		

Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional		
	4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik		
	5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah domestik		

6) IKK Outcome : Rasio kemantapan jalan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di provinsi}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		
	2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		
	3)	Panjang jalan yang dibangun		
	4)	Panjang jembatan yang dibangun		
	5)	Panjang jalan yang ditingkatkan		
	6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		
	7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		
	8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi		
	9)	Panjang jalan yang dipelihara		
	10)	Panjang jembatan yang dipelihara		

7) IKK Outcome : Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktika ndengan sertifikat pelatihan ahli

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		
	2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		
	3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		
	4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		
	6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		
	7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		
	8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		
	9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK)		
	10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		
	12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
	13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		

	14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota}} \times 100\% = \text{-----} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		Tidak ada
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		Tidak ada
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Tidak ada
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Tidak ada
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		Tidak ada
	6)	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / Rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		Tidak ada
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		Belum didata

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		
	6)	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		
	2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		
	3)	persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten / kota		
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi		
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Provinsi penyelenggara SPAM		
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	1)	Jumlah SPALD regional		
	2)	Total kapasitas SPALD regional		
	3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD regional		
	4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik		
	5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan

Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		
	2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		
	3)	panjang jalan yang sudah dibangun		
	4)	Panjang jembatan yang dibangun		
	5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur / fungsi)		
	6)	Panjang jalan yang diganti / dilebarkan		
	7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		
	8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi		
	9)	Panjang jalan yang dipelihara		
	10)	Panjang jembatan yang dipelihara		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		
	2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		
	3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		
	4)	terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		

6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		
7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		
8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		
9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga ahli konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPKK)		
10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		
11)	tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		
12)	tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
13)	tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		

	14)	tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		
	2)	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		
	3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi		
	4)	Jumlah perda dan perkara yang ditegakkan		
	5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		
	6)	Jumlah SOP dalam penegakkan perda dan perkara serta penanganan gangguan trantibum		
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah / legal	1)	Penyediaan / pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi		
	2)	penyediaan / pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi		
	3)	penyediaan / pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penganganan pra bencana	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten / kota		

	2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kab/kota		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi		
	2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi		
	3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi		
	4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan dalam panti sesuai dengan standar gizi		
	2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		
	7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti		
	8)	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti		
	9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		
	10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		
	11)	Jumlah pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		
	12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		
	13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		
	14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		
	15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		
	2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)		
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		
	7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti		
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional / tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		
	10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		
	11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		
	12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti		
	13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
	14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		
	15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		
	2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional / tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		
	11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		
	12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses layanan kesehatan dasar		
	13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		
	14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga		
	15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		

dasarnya di dalam panti	2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti		
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional / tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		
	11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		
	12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti		
	13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
	14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		
	15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		

dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		
	3)	Jumlah tempat penampungan		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase Kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi		
	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		
	3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja		
	4)	Jumlah Kabupaten / Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi		
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		
	4)	Persentase penganggur yang dilatih		
	5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		
	6)	persentase penyerapan lulusan		
	7)	Persentase LPK yang terakreditasi		
	8)	jumlah calon pekerja migran indonesia / calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		
	9)	Jumlah pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia / calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Tingkat produktivitas tenaga kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		

	2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)		
	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB		
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan pada tahun n		
	4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		
	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		
	6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit		
	7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		
	8)	Jumlah mogok kerja		
	9)	Jumlah penutupan perusahaan		
	10)	Jumlah perselisihan kepentingan		
	11)	Jumlah perselisihan hak		
	12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		
	13)	Jumlah perselisihan PHK		
	14)	Jumlah pekerja / buruh yang ter-PHK		
	15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		
	16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		
	17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		
	18)	Persentase perselisihan hubungan idustrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional		

BAB XII

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD

<u>45,528,538,583.00</u>	x	100%	= 0,92%
4,949,887,054,267.68			

IKK Output :

1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	43 OPD
2)	Jumlah program / kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	108 Program pada 21 OPD

- 2) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

<u>71.00</u>	x	10.000	= 2,27
313,282.00			

1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Media cetak, 1 radio dan 2 TV
2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 (UPTD PPA dengan ISO 90001)
3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	71/71 x 100% = 100%

4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 UPTD dan 10 P2TP2A
5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)	1 UPTD PPA Provinsi Jambi dan Pokja Perlindungan Anak

3) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000

<u>51.00</u>	x	100.000	= 2,87
1,775,725.00			

IKK Output :

2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 (UPTD PPA dengan ISO 90001)
3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	51/51 x 100% = 100%
4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	26 Lembaga terdiri dari 1 UPTD, 10 P2TP2A, 1 Unit PPA Polda, 11 Unit PPA Polres, KPI, HWDI
5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 UPTD PPA Provinsi Jambi dan HWDI Provinsi Jambi

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Nilai	Keterangan
Persentase ARG pada belanja langsung APBD = 0,92%	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	43 OPD	
	2)	Jumlah program / kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	21 OPD, 108 Program	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Nilai	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		
	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		

	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani\		
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)		

b)
Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
	1)	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada	A. Evaluasi PKDRT B. Evaluasi TPPO	
	2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Unit Layanan Provinsi	
	3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	(222/276) x 100% = 80,43%	
	4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	1. UPTD PPA Provinsi dan Kota Jambi	

Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 orang = 15,32%			2. P2TP2A di 10 Kabupaten	
			3. UPPA Polda .Jambi	
			4. UPPA Polres di 11 Kab/Kota	
			5. LPAI Jambi	
			6. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jambi	
			7. DPW Lingkungan	
	5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh	1. UPTD PPPA	
			2. DPW HWDI Prov. Jambi	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase surat keputusan penetapan tanah lokasi		
	2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		
	3)	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		
	4)	Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap :		
		a. Indeks Kualitas Air (IKA)		
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi		
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		
	3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab / kota dalam 1 provinsi		
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		
	5)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten / kota		

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	1)	Fasilitasi pelayanan adminduk		

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Pemanfaatan data kependudukan	1)	Fasilitasi pelayanan adminduk		

BAB XVII

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) IKK Outcome : Persentase pengentasan desa tertinggal

<u>693.00</u>	x	100%	= 81,9%
847.00			

IKK Output :

1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	40 Desa
2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	40 - 4 = 36 Desa
3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1.399
4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1.164

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan status desa mandiri

<u>528.00</u>	x	100%	= 152,6%
347.00			

IKK Output :

1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	40 Desa
3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1.399
4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1.164

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase pengentasan desa tertinggal = 81,9%	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi		
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang		

	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan status desa mandiri = 152,6%	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		

BAB XVIII

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1) IKK Outcome : Total Fertility Rare/TFR (Angka Kelahiran Total)

TFR PROVINSI JAMBI	1,72

IKK Output :

1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di perdikan	tidak ada
2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,7
3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	47,8
4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	11 Kampung KB/201 Kampung KB = 5,47%
5)	Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	11

2) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MmCPR)

MmCPR PROVINSI JAMBI	60,3

IKK Output :

1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	$2.198/2.198 \times 100\% = 100\%$
2)	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$429.349/624.085 \times 100\% = 68,79\%$
3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1
4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	76,8

3) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MmCPR)

<u>87,371.00</u>	x	100%	14%
624,085.00			

IKK Output :

1)	Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	$147.562/429.349 \times 100\% = 34,37\%$
2)	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	$429.349/965.172 \times 100\% = 44,48\%$

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perdakan	2.49	
	2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19.7	
	3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	4.78	
	4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	

	5)	Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP		
	2)	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		
	4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo		
	2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Keterangan
	Penjelasan	Hasil	
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	
	2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	
	3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen prosese bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	

	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		
	6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan		
	7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		
	8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		
	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai		
	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City		
	13)	N pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		
	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	1)	Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi		

	3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (starkom) dan SOP yang telah ditetapkan		

BAB XXI

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Persandian

1) IKK Outcome : Meningkatnya koperasi yang berkualitas

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus				Keterangan
Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset				
	$\frac{11}{148} \times 100\% = 7,48\%$				

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	21.05%	
	2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	16.21%	
	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10.13%	
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	
	6)	persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	

	8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	16.21%	
	9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
	10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	
	11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26.35%	
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	

2) IKK Outcome : Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus			Keterangan
mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\% = \frac{387}{11,778} \times 100\% = 3,29\%$			

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	87.60%	
	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	0	
Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3)	persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0.54%	
	4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.87%	
	5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	39.23%	

	6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3.31%	
	7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	2.29%	

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Meningkatnya koperasi yang berkualitas

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus		Keterangan
Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	-	
	Jumlahg seluruh koperasi		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Keterangan
	Penjelasan	Hasil	
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1) Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	

BAB XXII

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(Jumlah\ investasi\ tahun\ n - jumlah\ investasi\ tahun\ n-1)\ di\ provinsi}{Jumlah\ investasi\ tahun\ n-1\ di\ provinsi} \times 100\% = \frac{3.900.500 - 5.255.936,2}{5,255,936}$	x 100% = -13.55%

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase peningkatan investasi di provinsi	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	-
	2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	-
	3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	-
	4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-
	5) Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali (saat HUT Jambi 2020))
	6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-
	7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	via <i>whatsapp</i> dikarenakan pandemi
	8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	53 izin dan 143 non izin
	9) Laporan realisasi penanaman modal	PMDM : 2.486.265,40 PMA : 321.801.12 Total : 2.808.066,52
	10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kab / kota	50 peserta
	11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	12 perusahaan
	12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi	619 izin

BAB XXIII

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\% = \frac{470,391}{925,295} \times 100\% = 50,84 \%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	
	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	20	
	3)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30	

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\% = \frac{25}{925,295} \times 100\% = 0,000027\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	Surat Pernyataan

3) IKK Outcome : Peningkatan prestasi olahraga

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur peningkatan prestasi olahraga	<i>Jumlah peraihan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 570</i>	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan	402	
	2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	-	
	3)	Jumlah penyelenggara event OR prestasi tingkat daerah	-	
	4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	-	
	5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	63971	

BAB XXIV

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah		
	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		
	3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		
	4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		
	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

BAB XXV

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Persandian

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penelitian}} \times 100\% = 53,82\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		
	3)	Persentase sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategor rendah		
	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		

BAB XXVI

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Provinsi

1) IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Terlestarikannya cagar budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	
	2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	
	3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	
	4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	
	5)	Register cagar budaya	
	6)	Perlindungan cagar budaya provinsi	
	7)	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	
	8)	Pengembangan cagar budaya provinsi	
	9)	Pemanfaatan cagar budaya provinsi	
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	
	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	
	12)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	
	14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	

	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	
	16)	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	
	17)	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	

BAB XXVII

I. Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

1) IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Diukur menggunakan survei (belum terdata)	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	
	Penjelasan	Hasil
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	162.509 / 611.353 = 0,27
	2) Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	(4.139 / 611.353) x 100% = 0,68%
	3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	620 / 611.353 = 0,001
	4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	(11 / 1139) x 100% = 0,96%
	5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1 kegiatan
	6) Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	tidak ada kegiatan hunting KCKR tahun 2020 karena <i>refocusing</i> anggaran
	7) Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah	tidak ada kegiatan pada tahun 2020 karena <i>refocusing</i> anggaran
	8) Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	tidak ada kegiatan pada tahun 2020 karena <i>refocusing</i> anggaran
	9) Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah	tidak ada kegiatan pada tahun 2020 karena <i>refocusing</i> anggaran

2) IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	
	Penjelasan	Hasil

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak ada
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada

BAB XXVIII

I. Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4} = -$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Ket
	Penjelasan		Hasil	
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	
	2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	
	4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	

2) IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6} = -$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Ket
	Penjelasan		Hasil	
	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tahun 2020 masuk usul musnah sebanyak 7302 arsip	

Mengukur Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan di tahun 2020	
	3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Tidak ada kegiatan di tahun 2020	
	4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan di tahun 2020	
	5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan di tahun 2020	
	6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Tidak ada kegiatan di tahun 2020	

BAB XXIX

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

1) IKK Outcome : Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Sumber data menggunakan One Data KKP
		Apabila One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	
		Penjelasan	Jumlah
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	1)	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	Data belum tersedia dikarenakan data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI
	2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	15 Izin Usaha
	3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ 1) PPI Kuala Tungkal 2) PPI Nipah Panjang

	4)	Jumlah izin pembangunan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	2 Rekomendasi
	5)	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	240 unit kapal
	6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan per tahun	Belum ada, dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi. Penerapan akan dilaksanakan pada tahun 2021

2) IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \times 100\% \right)}{n}$ X = 72.5%	ci = pelaku usaha yang patuh si = sampel pelaku usaha yang diperiksa i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = jumlah komponen pelaku usaha KP

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	$\frac{266.664,61 \text{ Ha}}{388.967,54 \text{ Ha}} \times 100\% = 68,73\%$
	2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil yang dikelola	$\frac{100 \text{ Ha}}{39.143,44 \text{ Ha}} \times 100\% = 0,255\%$

	3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30 GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	13 unit kapal
	4)	Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) Provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Belum ada, dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi. Penerapan dilaksanakan pada tahun 2021
	5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	8 unit
	6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Pada tahun 2020 belum ada yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Tahun 2021 akan dibuat perda mengenai hal yang dimaksud
	7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	43 POKMASWAS
	8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	8 Unit

BAB XXX

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	
	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	
	3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	
	4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	
	5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	
	6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	
	7)	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	
	8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	
	9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	
	10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	
	11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	
	12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	
	13)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	

	14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	
	15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Tingkat hunian akomodasi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat hunian akomodasi di provinsi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\% =$	

4) IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB provinsi (harga berlaku)		

BAB XXXI

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat produktivitas pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	Penjelasan		IKK OUTPUT
			Jumlah
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	- Optimasi lahan pertanian : 2500 Ha
			- Rehab jaringan irigasi pertanian : 4525 Ha
			- Irigasi perpompaan : 18 unit
			- Pembangunan embung pertanian : 15 unit
			- Irigasi perpipaan : 8 unit
			- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea 26.199 Ton, SP36 12.416 Ton, ZA 9.702 Ton, NPK 53.727 Ton, Organik 4.400 Ton
			- Prasarana pasca panen horti lainnya : 1 unit
			- Prasarana pengolahan cabe/bawang : 2 unit
			- Sarana pasca panen horti lainnya : 2 unit
			- Sarana pengolahan cabe/bawang : 3 unit
			- Sarana pemasaran hortikultura : 1 unit
			- Power thresher (pasca panen hortikultura) : 19 unit
			- Power thresher (pasca panen pangan) : 22 unit
			- Corn sheller : 6 unit
			- Power thresher multiguna : 10 unit
			- Power thresher multiguna mobile : 11 unit
			- Husker/Polisher : 2 Unit

		- Color Sorter : 1 Unit
		- UPH Jagung + Bangunan : 3 Unit
		- UPH Kedelai + Bangunan : 8 Unit
		- UPH Tanaman Pangan Lainnya + Bangunan : 3 Unit
2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	- Realisasi Luas Sertifikasi Benih Buah-Buahan Tahun 2020 : 52 Unit
		- Realisasi Setifikasi Benih Bawang Tahun 2020 : 21 Unit
3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	- Realisasi Luas Sertifikasi Benih Buah-Buahan Tahun 2020 : 9.115 Label
		- Realisasi Setifikasi Benih Bawang Tahun 2020 : 840 Label
4)	Prasarana pertanian yang digunakan	- Optimasi lahan pertanian : 99,35 %
		- Rehab jaringan irigasi pertanian : 97,31 %
		- Irigasi perpompaan : 100 %
		- Pembangunan embung pertanian : 100%
		- Irigasi perpipaan : 100%
		- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea 89,59 % SP36 89,95% ZA 88,87% NPK 91,74% Organik 86,11%
		- Prasarana Pasca Panen Horti Lainnya : 100%
		- Prasarana Pengolahan Cabe/Bawang : 100%
		- UPH Jagung + Bangunan : 100%
		- UPH Kedelai + Bangunan : 100%
		- UPH Tanaman Pangan Lainnya + Bangunan : 100%
5)	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	- Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi : 156.031 Ha
6)	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	- Jumlah areal yang dikendalikan : 156.381 Ha
7)	Penerbitan izin usaha pertanian	-

	8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	- Sarana Pengolahan Cabe/Bawang : 100 %
			- Sarana Pemasaran Hortikultura : 100 %
			- Power Thresher (Pasca Panen Hortikultura) : 100 %
			- - Power Thresher (Pasca Panen Pangan) : 100 %
			- Corn Sheller : 100 %
			- Power Tresher Multiguna : 100 %
			- Power Tresher Multiguna Mobile : 100 %
			- Husker/Polisher : 100 %
			- Color Sorter : 100 %
	9)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{156,031}{156,381} \times 100\% = 99,77\%$
	10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	-

2) IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	$\frac{11.621 - 4.940}{4,940} \times 100\% = 135, 24\%$	

BAB XXXII

1) IKK Outcome : Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal	
	$\frac{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\% = \frac{201.102,47 \text{ Ha}}{333.945,55 \text{ Ha}} \times 100\% = 60,22\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	100%	
	2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	88.22%	
	3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2.365 Ha	
	4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0.00036%	
	5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan	12.49%	
	6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m³ per tahun yang aktif	39.62%	
	7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Tersedia	
	8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	
	9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	
	10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	-	
	11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	32.54%	
	12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	-	
	13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	-	
	14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	410 Kelompok	
	15)	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	25%	
	16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	-	

2) **IKK Outcome : Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)**

b) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / Definisi	Rumus			Keterangan
Mengukur tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak	775,535	x 100% = 36,95%	
	Jumlah hutan keseluruhan	2,098,535		

3) **IKK Outcome : Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi**

b) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / Definisi	Rumus			Keterangan
Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)	2365	x 100% = 0,28%	
	Luas lahan kritis di provinsi (ha)	844,647		

BAB XXXIII

I. Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) IKK Outcome : Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	
	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi}}{\text{perda}} \times 100\% = \frac{0}{267} \times 100\% = 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (belum ada)	Menunggu Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
	2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (belum ada)	Menunggu Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
	3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait Izin Penggalian, pemakaian dan izin Pengusahaan air tanah dalam area provinsi (belum ada)	Menunggu Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
	4)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah (ada)	Pergub Jambi No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
	5)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi (tidak ada)	tidak ada

Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	6)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan daerah provinsi	tidak ada
	7)	Perda/Pergub terkait IUJP	Perda/Pergub terkait IUJP	tidak ada
	8)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 (ada)	Pergub jambi No. 534 tentang Penetapan harga patoka mineral bukan logam dan batuan di wilayah provinsi Jambi
	9)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan (Tidak ada)	tidak ada
	10)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun (Tidak ada)	tidak ada
	11)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Jumlah SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	tidak ada
	12)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (Ada)	Perda Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan
	13)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait izin operasi dalam daerah provinsi (Tata cara Penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	
	14)	Perda/Pergub terkait pentapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Peraturan Gubernur terkait penetapan (Penyesuaian) Tarif tenaga listrik untuk pemegang izin yang wilayah usahanya berada dalam 1 provinsi	tidak ada
	15)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	tidak ada

	16)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Jumlah izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	13 Penerbitan rekomendasi teknis 2017 s/d 2020
	17)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Total Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	tidak ada

2) **IKK Outcome : Persentase Desa yang Teraliri Listrik**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Persentase Desa yang Teraliri Listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\% = \frac{2}{1.562} \times 100\% = 99,49\%$	

BAB XXXIV

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan

1) IKK Outcome : Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas	$\frac{963.667.435.9 \text{ US \$} - 1.234.785.534.4 \text{ US \$}}{1.234.785.534.4 \text{ US\$}} \times 100\% = 21,96\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan	
	3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan / fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	
	4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	

2) IKK Outcome : Persentase penanganan pengaduan konsumen

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan x 100% = $\frac{33}{40}$ x 100% = 82,5%	
	Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	40
	2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	130

3) IKK Outcome : Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\% = \frac{2074}{2,074} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	
	2)	Indeks kinerja BPSMB	6

4) IKK Outcome : Tertib Usaha

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0%
	2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang diterbitkan	0%
	3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0%
	4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0%
	5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%

5) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase Kinerja realisasi pupuk	1) Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	

6) IKK Outcome : Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\% = \frac{118}{9} \times 100\% = 131\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1) Jumlah barang beredar yang diawasi	

7) IKK Outcome : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d.Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	
	2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	
	3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	

BAB XXXV

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Provinsi

1) IKK Outcome : Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus				Keterangan
Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\% = \frac{212-211}{211} \times 100\% = 0,47\%$				

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus			Keterangan
Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	$\frac{100}{6} \times 100\% = 16,67\%$			

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	78,87%

3) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus		Keterangan
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% =$	$\frac{12}{211} \times 100\% = 0,056\%$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang diterbitkan	

4) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% =$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	

5) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan**

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	

BAB XXXVI

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Provinsi

IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	

BAB XXXVII

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (perencanaan dan keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} = \frac{837.562.623.584,04}{4.562.562.623.584,04} \times 100\% = 0.184$	

2) IKK Outcome : Rasio PAD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Mengukur <i>tax ratio</i> atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\% = \frac{1.522.832.793.387}{180.794.330.000.000} \times 100\% = 0,84\%$	

3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\% = -$	

4) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	

5) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sertifikat SPIP yang mencantumkan level 3	

6) IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Ket
Melihat tingkat peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	sertifikat APIP yang mencantumkan level 3	

BAB XXXVIII

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		

2) IKK Outcome : Rasio PAD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\% =$	

BAB XXXIX

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	
	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\% = \frac{9,426}{1581} \times 100\% = 596\%$	

2) IKK Outcome : Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah pegawai PNS fungsional	
	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah}} \times 100\% = \frac{740}{5,421} \times 100\% = 13,6\%$	

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	
	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional}} \times 100\% = \frac{}{740} \times 100\% = \%$	

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	
	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\% = \frac{}{} \times 100\% = \%$	

BAB L

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Hasil
Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	Nilai absolut dari total belanja dalam Realisasi Total Belanja APBD x 100% = ((3.764.965.251.275,71 5.244.838.971.067,04) - 1) x 100% = 28,22 %

2) IKK Outcome : Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Hasil
melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD x 100% = ((1,522,832,793,387.59 1.665.325.702.543,00) - 1) x 100% = 8,56 %

3) IKK Outcome : Assets Management

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Hasil
Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	-

4) IKK Outcome : Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Hasil
Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100% = -

BAB L

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di webste pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\% =$	-

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap keuangan daerah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\% =$	-

BAB V

I. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\% = \frac{133,801}{188,400} \times 100\% = 71,02\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Ket
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	159 sekolah	
	2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia	
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia	
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia	
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia	
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	2387 orang	
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2384 orang	
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	5758 orang	
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	4179 orang	
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia	

	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia	
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1747 orang	
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1226 orang	
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	5523 orang	
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik	162 orang	
	16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	161 orang	
	17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104 orang	
	18)	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	
	19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/ workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	data tidak tersedia	
	20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	
	21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	data tidak tersedia	

2) **IKK Outcome : Persentase Desa yang Teraliri Listrik**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\% = \frac{1,625}{-} \times 100\% = -$	Data tidak tersedia

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1) Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	18 sekolah
	2) Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	data tidak tersedia
	3) Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia
	4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	549 orang
	5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	data tidak tersedia
	6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia
	7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	data tidak tersedia

BAB VI

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi	$\frac{4,124}{3,624,579} \times 100\% = 0.11\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1)	Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	33	

2) IKK Outcome : Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di provinsi yang telah memiliki akreditasi	$\frac{33}{40} \times 100\% = 82.5\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KETERANGAN
		Penjelasan	Jumlah	
Persentase RS rujukan yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7	

3) **IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{2,805,497}{2,805,497} \times 100\% = 100\%$	100%

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		KETERANGAN
	Penjelasan	Jumlah	
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Zegavit = 472 ktk Masker N95 = 110 box Masker Bedah= 1230 Box	
	2) Jumlah pos kesehatan		
	3) Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan	24 orang	
	4) Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan	24 orang	
	5) Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan		

4) **IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KET
Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi	$\frac{30840}{30840} \times 100\% = 100.0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		KET
		Penjelasan	Jumlah	
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	masker bedah = 562.000 pcs	
			N95 = 42.750 pcs	
			KN 95 = 23.200 pcs	
			masker kain = 30.400	
			APD = 65.781 pcs	
			Rapid Test = 46.530 test	
			Face Shield = 1.240 pcs	
			Sarung Tangan Pnjg = 3.500 pcs	
			Kacamata google = 1.160 pcs	
			Sepatu Boot = 1160 pasang	
			Handscoon = 43.800 pasang	
			Kloroquin 150 mg = 15.000 tbt	
			Oseltamivir = 56.000 tbt	
			PCR Kit = 4.800 tes	
			RNA Kit = 4.800 tes	
			VTM = 4.800 tes	
			Longsee Swab Tes = 5.500 tes	
			Handsanitizer = 28 liter	
			Desinfektan wipes = 410 pack	
			Cover Shoes = 3.260 pasang	
			Gown = 3.260 pcs	
			Gloves Hands = 500 pcs	
			Nurse Cap = 10.660 pcs	
			Sarung Tangan nitril = 940 box	
			henclin 500 ml = 1.000 botol	
			Henclin 5 = 3 jerigen	
			Goldrion = 150 box	
			Glutafit = 45 box	
			Oxymetri = 10 unit	
			Favipiravir = 16.000 tablet	
			hidroksikloroquin 200mg = 3.000 tbt	
			VIT C Injeksi = 3.000 ampul	
			Azytromycin = 15.000 tbt	

			Termogun = 50 pcs	
			Nasofaring swab = 836 pcs	
			Lancet = 200 box	
			Alkohol Swab = 200 box	
			Tabung EDTA = 100 tabung	
			Multivitamin = 104.560 tblt	
			Paracetamol = 50.000 tblt	
			Gown Apron = 40 pak	
			Handscoon steril = 33 box	
			Vitamin C = 84.560 tblt	
			Remdesivir = 2.160 vial	
	2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	24 Orang	
	3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten / kota		

BAB VII

I. Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	tidak ada	
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	tidak ada	
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	tidak ada	
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	tidak ada	
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi	tidak ada	
	6)	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	tidak ada	
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	-	belum terdata

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (m)}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (m)		
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	8	

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% = \text{_____}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		
	2) Persentase panjang jaringan sekunder dalam kondisi baik		
	3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		

4) IKK Outcome : Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan}} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% = \text{_____}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	tidak ada	
	2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA	tidak ada	
	3) Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi	tidak ada	2021
	4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	tidak ada	
	5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	tidak ada	

5) IKK Outcome : Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	1) Jumlah SPALD Regional	tidak memiliki SPALD	
	2) Total kapasitas SPALD Regional	tidak memiliki SPALD	
	3) Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	tidak memiliki SPALD	
	4) Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	tidak memiliki SPALD	
	5) Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah domestik	tidak memiliki SPALD	

6) IKK Outcome : Rasio kemandapan jalan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat kemandapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di provinsi}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Rasio kemandapan jalan	1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	1.032.844 km	
	2) Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	tidak ada	
	3) Panjang jalan yang dibangun	1.007344 km	
	4) Panjang jembatan yang dibangun	6.197,60 meter	
	5) Panjang jalan yang ditingkatkan	10,39 Km	
	6) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	45 meter	
	7) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	33,75 km	
	8) Panjang jembatan yang direhabilitasi	tidak ada	
	9) Panjang jalan yang dipelihara	-	
	10) Panjang jembatan yang dipelihara	603,75 meter	

7) IKK Outcome : Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi}} \times 100\% = \quad \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1) Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		
	2) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	326 orang	
	3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	224 orang	
	4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	ada	
	5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	tidak ada	
	6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	tidak ada	
	7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	tidak ada	
	8) Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	ada	web SIPJAKI
	9) Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK)	ada	web SIPJAKI
	10) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	ada	
	11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	

	12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
	13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
	14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	

BAB VIII

I. Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Warga Negara Korban bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana Yang Ditangani Pada Tahun } n}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana Yangg Akan Ditangani Pada Tahun } n} \times 100\% = \text{_____} \times 100\% = \text{_____}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
prsentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	4716	
	2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	
	3) jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	
	4) jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	
	5) jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	
	6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
	7) jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
	8) jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	
	9) Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	

2) IKK Outcome : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat prgram Pemerintah Daerah Provinsi Yangmemperoleh fasilitasi penyediaa rumah layak huni	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dana atau bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak huni}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (m)}} \times 100\% = \frac{87}{160} \times 100\% = 54,38\%$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
persentase warga negara yang terkena relokasi akibat prgram Pemerintah Daerah Provinsi Yangmemperoleh fasilitasi penyediaa rumah layak huni	1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	87 unit	
	2) jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	73 unit	
	3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
	4) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	

3) **IKK Outcome : Persentasee Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan kumuh 10-15 ha}} \times 100\% = \frac{0}{98.22} \times 100\% = 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh 10 - 15 ha	98,22 Ha	
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	
	3)	Jumlah Luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1355.64	

4) IKK Outcome : Persentase Satuan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani}}{\text{luas kawasan kumuh 10-15 ha}} \times 100\% = \frac{6}{320} \times 100\% = 1,88 \%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah Pemukiman yang terfasilitasi PSU	6	
	2)	Jumlah pengembangan yang tersertifikasi	0	
	3)	Jumlah pengembangan yang teregistrasi	0	2021
	4)	Jumlah pengembangan yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	

BAB IX

I. Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas kab/kota yang ditangani	0	
	2) Jumlah Satlinmas yang telatih dan dikukuhkan	0	
	3) Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	0	
	4) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	13	
	5) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	13	
	6) Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	8	

2) IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100\% = \text{-----} \times 100\% \quad 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1) Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi		
	2) Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi		
	3) Penyediaan/Pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi		

4) IKK Outcome : Persentase penanganan pra bencana

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi}} \times 100\% = \text{-----} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase penanganan pra bencana	1) Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota		
	2) Pelaksanaan monitorin dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota		

5) IKK Outcome : Persentase penanganan tanggap darurat bencana

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\% = \frac{\quad}{11} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi		
	2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi		
	3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi		
	4)	penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi		

BAB X

I. Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Provinsi Yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	1) Jumlah Penyandang disabilitas yang menerima paket pemakaman dalam panti sesuai dengan standar gizi	100	
	2) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	100	
	3) Jumlah asraa yang tersedia dan mudah diakses (panti)	5	
	4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2	
	5) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	
	6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	14	
	7) Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	10	
	8) Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	
	9) Jumlah paket bimbingan fisik, metanl spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1	
	10) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	

11)	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesehatan sosial yang disediakan di dalam panti	2	
12)	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	100	
13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	100	
14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	1	
15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan	0	

2) IKK Outcome : Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{populasi anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\% = \frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1) Jumlah anak terlantar yang menerima pakeet permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	50	
	2) Jumlah anak terlantar yang menreima paket sandang di dalam panti	50	
	3) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	5	
	4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2	
	5) Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	10	

6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	14	
7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	10	
8)	jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	
9)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1	
10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1	
11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	
12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	50	
13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	50	
14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	0	
15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	

3) IKK Outcome : Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia di Dalam Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar Di Daerah Provinsi Yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti}} \times 100\% = \frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	70	
	2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	70	
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	14	
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	11	
	5)	Jumlah perebekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1	
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	9	
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1	
	8)	Jumlah taga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	3	
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan sosial yang disediakan di dalam panti	0	
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	
	11)	Jumlah lanjut usia terlantar difasilitasi nomor Induk Kependudukan di dalam panti	70	
	12)	Jumlah lanjtt usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan kesehatan dasar	70	
	13)	Jumlah lanjtt usia terlantar di dalam panti yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	0	
	14)	Jumlah lanjut usia tterlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	3	
	15)	Jumlah lanjut usia terlantttr yang mendapat layanan pemulasaran	70	

4) IKK Outcome : Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Daerah Provinsi Yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1) Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0	
	2) Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	
	3) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	
	4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0	
	5) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	
	6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	
	7) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0	
	8) Jumlah taga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	
	9) Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan sosial yang disediakan di dalam panti	0	
	10) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	
	11) Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan keterampilan dasar	0	

	12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	
	13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapat layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0	
	14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	
	15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan reunifikasi keluarga	0	

BAB XI

I. Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	<i>Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</i>	
	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\% = \frac{8}{11} \times 100\% = 72,7\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen Perencanaan tenaga kerja provinsi	ada	
	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	
	3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	0	
	4)	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	0	

2) IKK Outcome : Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	
	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\% = \frac{1,437}{1,739,000} \times 100\% = 0,82\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	0	
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	
	4)	Persentase penganggur yang dilatih	0	
	5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	0	
	6)	Persentase penyerapan lulusan	0	
	7)	Persentase LPK yang terakreditasi	0	
	8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ Calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	
	9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	

3) IKK Outcome : Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	$\frac{PDRB \text{ tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\% = \frac{148,449,900,000,000}{1,739,000} \times 100\% = 8.536.509.488$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		
	2)	persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jenjang peningkatan produktifitas		

4) IKK Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persenta seperusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\% = \frac{3,610}{4115} \times 100\% = 87,72\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase penanganan pra bencana	1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		
	2) Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB		
	3) rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n		
	4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		
	5) Persentas perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		
	6) Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit		
	7) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		
	8) Jumlah mogok kerja		
	9) Jumlah penutupan perusahaan		
	10) Jumlah perselisihan kepentingan		
	11) Jumlah perselisihan hak		
	12) Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		
	13) Jumlah perselisihan PHK		
	14) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		
	15) Jumlah perselisihan yang diselesaikn melalui perundingan bipartit		
	16) Lembaga kerjasama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		
	17) Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		

	18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional		

5) **IKK Outcome : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (penaker) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\% = \frac{1,872}{7513} \times 100\% = 24,92\%$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	1) Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daaerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi		
	2) Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi		
	3) Jumlah tenaga kerja ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi		
	4) Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi		
	5) Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi		
	6) Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja		
	7) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		
	8) Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		
	9) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/ sitem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)		
	10) Jumlah pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya		

	11)	Jumlah Ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan		
	12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)		

6) IKK Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\% = \frac{3,610}{4115} \times 100\% = 87,72\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1) jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat		
	2) Jumlah perusahaan yang menerapkan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat		
	3) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan		
	4) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial		
	5) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan		
	6) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja		
	7) Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		
	8) Jumlah perusahaan yang wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Nilai	Keterangan
Persentase ARG pada belanja langsung APBD = 0,92%	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	43 OPD	
	2)	Jumlah program / kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	21 OPD, 108 Program	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Nilai	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		
	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		
	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani\		
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)		

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
	1)	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat	A. Evaluasi PKDRT	

Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 orang = 15,32%		terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang telah dievaluasi	B. Evaluasi TPPO	
	2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Unit Layanan Provinsi	
			1 Unit Layanan di Kota Jambi	
	3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$(222/276) \times 100\% = 80,43\%$	
	4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	1. UPTD PPA Provinsi dan Kota Jambi	
			2. P2TP2A di 10 Kabupaten	
			3. UPPA Polda Jambi	
			4. UPPA Polres di 11 Kab/Kota	
			5. LPAI Jambi	
			6. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jambi	
			7. DPW Lingkungan Wanita Disabilitas Indonesia - Jambi	
	5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1. UPTD PPPA	
			2. DPW HWDI Prov. Jambi	

BAB XIII

I. Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Persentase Cadangan Pangan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase cadangan pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan provinsi}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan provinsi}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	
	2) Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
	3) Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi		
	4) Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada	
	5) Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	6 kali	
	6) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada	
	7) Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada	
	8) Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada	
	9) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada	
	10) Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada	

BAB XIV

I. Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Persentase Surat Keputusan penetapan tanah lokasi	Ada	
	2)	Jumlah maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Ada	
	3)	SK ijin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur		
	4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Ada	

1) IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	

BAB XV

I. Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	$IKLH\ Prov = (IKA\ 30\%) + (IKD\ 30\%) + (ITH\ 40\%)$ $IKA = Indeks\ Kualitas\ Air$ $IKD = Indeks\ Kualitas\ Udara$ $ITH = Indeks\ Tutupan\ Hutan$	= 0%

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) hasil perhitungan provinsi terhadap IKA, IKU, ITH		

1) IKK Outcome : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilaksanakan pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi		
	2) rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provijnsi		
	4) terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		
	5) terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		
	6) Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota		

BAB XVI

1) IKK Outcome : Persentase tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
mengukur persentase tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah provinsi	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\% = \frac{8}{43} \times 100\% = 19\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100%	

2) IKK Outcome : Persentase tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	$\frac{\text{Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun}}{2} \times 100\% = 100\%$	

BAB XVII

I. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase Pengentasan desa tertinggal

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan Indeks Desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun)}} \times 100\% = \frac{693}{847} \times 100\% = 81,9\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) Jumlah desa tertinggal yang terfasilitasi dalam kerjasama antar daerah	40 desa	
	2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	36 desa	
	3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1399	
	4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1164	

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan status desa mandiri

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun pertahun}}{\text{Jumlah desa berkembang per tahun}} \times 100\% = \frac{528}{347} \times 100\% = 152,6\%$	

b) **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	40 desa	
	2)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	36	
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1399	
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1164	

BAB XVIII

I. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Provinsi

1) IKK Outcome : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	$TFR \text{ Provinsi Jambi} =$ 1,72	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	tidak ada	
	2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,7%	
	3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	47,8%	
	4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	5,47%	
	5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	11	

2) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase pemakaian kontrasepsi modern (mmCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif moders}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\% = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% = 60,3\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	
	2)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	68,79%	
	3)	Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	1	
	4)	Persentase pelayanan KB pasca operasi	76,8%	

3) IKK Outcome : Persentase kebutuhan per Kb yang tidak terpenuhi (unmet need)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase kebutuhan per Kb yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\% = \frac{87,731}{624,085.00} \times 100\% = 14\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	34,37%	
	2)	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	44,48%	

BAB XIX

I. Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Konektivitas Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Rasio Konektivitas Provinsi	<i>0.53</i>	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Rasio Konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0.54%	
	2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	37.80%	

2) IKK Outcome : V/C Ratio di jalan Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur V/C Ratio di jalan Provinsi	<i>16</i>	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	0,556%	

BAB XX

I. Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	
	2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		
	3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintahan yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahan		

2) IKK Outcome : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegritas

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegritas	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegritas}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% = \text{---}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara		
	2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		
	3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	4) persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		

5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		
6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		
8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		
9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		
10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		
11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai		
12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		
13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		
14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		

3) IKK Outcome : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\% = \frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		

I.	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Persandian								
1)	IKK Outcome : Meningkatnya koperasi yang berkualitas								
a)	Penjelasan IKK Outcome								
	Konsep / definisi				Rumus			Keterangan	
	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas				Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	x 100% =			
					Jumlah seluruh koperasi				
b)	Penjelasan IKK Output								
	IKK Outcome				IKK Output			Keterangan	
					Penjelasan		Hasil		
					1)	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					6)	persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

			Meningkatnya koperasi yang berkualitas	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
				8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
				9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
				10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
				11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
				12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						
			2) IKK Outcome : Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha								
			a)	Penjelasan IKK Outcome							
				Konsep / definisi	Rumus				Keterangan		
				mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha	jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	x 100% =					
					jumlah usaha kecil keseluruhan						
				b)	Penjelasan IKK Output						
				IKK Outcome	IKK Output				Keterangan		
					Penjelasan			Hasil			
				1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil						

			Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)					
				3)	persentase jumlah usaha kecil yang bermitra					
				4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha					
				5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran					
				6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan					
				7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha					
II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota										
1) IKK Outcome : Meningkatnya koperasi yang berkualitas										
		a)	Penjelasan IKK Outcome							
			Konsep / definisi	Rumus					Keterangan	
			Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset		x 100% =				
				Jumlahg seluruh koperasi						
		b)	Penjelasan IKK Output							
			IKK Outcome	IKK Output					Keterangan	
				Penjelasan			Hasil			
			Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi					

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di provinsi}} \times 100\% = \frac{3.900.500 - 5.255.936,2}{5,255,936} \times 100\% = -13.55\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase peningkatan investasi di provinsi	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	-
	2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	-
	3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	-
	4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-
	5) Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali (saat HUT Jambi 2020))
	6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-
	7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	via <i>whatsapp</i> dikarenakan pandemi
	8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	53 izin dan 143 non izin
	9) Laporan realisasi penanaman modal	PMDM : 2.486.265,40 PMA : 321.801.12 Total : 2.808.066,52
	10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kab / kota	50 peserta
	11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	12 perusahaan
	12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi	619 izin

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\% = \text{-----} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		
	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		
	3)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\% = \text{-----} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		

3) IKK Outcome : Peningkatan prestasi olahraga

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur peningkatan prestasi olahraga	<i>Jumlah peraihan medali pada event olahraga nasional dan internasional =</i>	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Hasil	Keterangan
Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan		
	2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM		
	3)	Jumlah penyelenggara event OR prestasi tingkat daerah		
	4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan		
	5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi		

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Provinsi

1)

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Hasil	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1) Tersedianya buku profil daerah	tidak ada	
	2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	23 survey	
	3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	24	
	4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	23	
	5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	24	
	6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		dilaksanakan 2021
	7) Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		dilaksanakan 2021

2) **IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \text{---} \times 100\% =$	

[illegible]

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Provinsi

1) IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Terlestarikannya cagar budaya	1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	
	2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	
	3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	
	4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	
	5) Register cagar budaya	
	6) Perlindungan cagar budaya provinsi	
	7) Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	
	8) Pengembangan cagar budaya provinsi	
	9) Pemanfaatan cagar budaya provinsi	
	10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	
	11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	
	12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	
	13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	
	14) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	

	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	
	16)	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	
	17)	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	

I. Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

1) IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Diukur menggunakan survei	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
	2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		
	3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		
	4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		
	5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		
	6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun		
	7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah		
	8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah		
	9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah		

2) IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya		
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya		

I. Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi

1) IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
	2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		
	4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		

2) IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output			Keterangan
	Penjelasan		Hasil	
Mengukur Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		
	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		
	3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		
	4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		
	5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		
	6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

1) IKK Outcome : Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Sumber data menggunakan One Data KKP
		Apabila One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	1) Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	Data belum tersedia dikarenakan data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI
	2) Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT	15 Izin Usaha
	3) Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ 1) PPI Kuala Tungkal 2) PPI Nipah Panjang
	4) Jumlah izin pembangunan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	2 Rekomendasi
	5) Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	240 unit kapal

6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan per tahun	Belum ada, dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi. Penerapan akan dilaksanakan pada tahun 2021

2) IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \times 100\% \right)}{n}$ $X = 72.5\%$	ci = pelaku usaha yang patuh si = sampel pelaku usaha yang diperiksa i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = jumlah komponen pelaku usaha KP

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase kepatuhan pelaku	1) Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	$\frac{266.664,61 \text{ Ha}}{388.967,54 \text{ Ha}} \times 100\% = 68,73\%$
	2) Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil yang dikelola	$\frac{100 \text{ Ha}}{39.143,44 \text{ Ha}} \times 100\% = 0,255\%$
	3) Jumlah unit kapal perikanan (10-30 GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	13 unit kapal
	4) Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) Provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Belum ada, dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi. Penerapan dilaksanakan pada tahun 2021

usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan	5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	8 unit
	6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Pada tahun 2020 belum ada yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Tahun 2021 akan dibuat perda mengenai hal yang dimaksud
	7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	43 POKMASWAS
	8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	8 Unit

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	
	2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	
	3) Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	
	4) Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	
	5) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	
	6) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	
	7) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	
	8) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	
	9) Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	
	10) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	
	11) Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	
	12) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	
	13) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	

	14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	
	15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Tingkat hunian akomodasi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat hunian akomodasi di provinsi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\% =$	

4) IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB provinsi (harga berlaku)		

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat produktivitas pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	- Optimasi lahan pertanian : 2500 Ha
		- Rehab jaringan irigasi pertanian : 4525 Ha
		- Irigasi perpompaan : 18 unit
		- Pembangunan embung pertanian : 15 unit
		- Irigasi perpipaan : 8 unit
		- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea 26.199 Ton, SP36 12.416 Ton, ZA 9.702 Ton, NPK 53.727 Ton, Organik 4.400 Ton
		- Prasarana pasca panen horti lainnya : 1 unit
		- Prasarana pengolahan cabe/bawang : 2 unit
		- Sarana pasca panen horti lainnya : 2 unit
		- Sarana pengolahan cabe/bawang : 3 unit
		- Sarana pemasaran hortikultura : 1 unit
		- Power thresher (pasca panen hortikultura) : 19 unit
		- Power thresher (pasca panen pangan) : 22 unit
		- Corn sheller : 6 unit
		- Power thresher multiguna : 10 unit
		- Power thresher multiguna mobile : 11 unit

		- Husker/Polisher : 2 Unit
		- Color Sorter : 1 Unit
		- UPH Jagung + Bangunan : 3 Unit
		- UPH Kedelai + Bangunan : 8 Unit
		- UPH Tanaman Pangan Lainnya + Bangunan : 3 Unit
2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	- Realisasi Luas Sertifikasi Benih Buah-Buahan Tahun 2020 : 52 Unit
		- Realisasi Setifikasi Benih Bawang Tahun 2020 : 21 Unit
3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	- Realisasi Luas Sertifikasi Benih Buah-Buahan Tahun 2020 : 9.115 Label
		- Realisasi Setifikasi Benih Bawang Tahun 2020 : 840 Label
4)	Prasarana pertanian yang digunakan	- Optimasi lahan pertanian : 99,35 %
		- Rehab jaringan irigasi pertanian : 97,31 %
		- Irigasi perpompaan : 100 %
		- Pembangunan embung pertanian : 100%
		- Irigasi perpipaan : 100%
		- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea 89,59 % SP36 89,95% ZA 88,87% NPK 91,74% Organik 86,11%
		- Prasarana Pasca Panen Horti Lainnya : 100%
		- Prasarana Pengolahan Cabe/Bawang : 100%
		- UPH Jagung + Bangunan : 100%
		- UPH Kedelai + Bangunan : 100%
		- UPH Tanaman Pangan Lainnya + Bangunan : 100%
5)	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	- Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi : 156.031 Ha
6)	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	- Jumlah areal yang dikendalikan : 156.381 Ha
7)	Penerbitan izin usaha pertanian	-
8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	- Sarana Pengolahan Cabe/Bawang : 100 %
		- Sarana Pemasaran Hortikultura : 100 %
		- Power Thresher (Pasca Panen Hortikultura) :

			- - Power Thresher (Pasca Panen Pangan) : 100
			- Corn Sheller : 100 %
			- Power Tresher Multiguna : 100 %
			- Power Tresher Multiguna Mobile : 100 %
			- Husker/Polisher : 100 %
			- Color Sorter : 100 %
	9)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{156,031}{156,381} \times 100\% = 99,77\%$
	10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	-

2) IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

a) Penjelasan IKK Outcome

KONSEP / DEFINISI	RUMUS	KETERANGAN
Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	$\frac{11.621 - 4.940}{4,940} \times 100\% = 135,24\%$	

1)	IKK Outcome : Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial						
a)	Penjelasan IKK Outcome						
	Konsep / definisi	Rumus				Keterangan	
	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal	x 100% =	201.102,47 Ha	x 100% = 60,22%		
		Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi		333.945,55 Ha			
b)	Penjelasan IKK Output						
	IKK Outcome	IKK Output				Hasil	Keterangan
	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH			100%	
		2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek			88.22%	
		3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi			2.365 Ha	
		4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi			0.00036%	
		5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan			12.49%	
		6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m ³ per tahun yang aktif			39.62%	
		7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan			Tersedia	
		8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			-	
		9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura			-	
		10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura			-	
		11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan			32.54%	
		12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan			-	
		13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan			-	
		14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial			410 Kelompok	
		15)	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi			25%	
		16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor			-	

[illegible]

[illegible]

I. Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral										
1) IKK Outcome : Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda										
a) Penjelasan IKK Outcome										

				15)	Perda/Pergub terkait pentapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi						
				16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi						
				17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah						
				18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu						
			2) IKK Outcome : Persentase Desa yang Teraliri Listrik								
	a)	Penjelasan IKK Outcome									
		Konsep / definisi	Rumus							Keterangan	
		Mengukur Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik	x 100% =		x 100%	=				
			Jumlah desa								

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan										
1) IKK Outcome : Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas										
a) Penjelasan IKK Outcome										
Konsep / definisi			Rumus						Keterangan	
Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas			Nilai ekspor non migas tahun berjalan - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya		x 100% =		x 100%			
			Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya							
b) Penjelasan IKK Output										
IKK OUTCOME			IKK OUTPUT							
			Penjelasan					Jumlah		
Pertumbuhan nilai ekspor non migas			1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang						
			2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk						
			3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan / fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor						
			4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru						
2) IKK Outcome : Persentase penanganan pengaduan konsumen										
a) Penjelasan IKK Outcome										
Konsep / Definisi			Rumus						Keterangan	
Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen			Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan		x 100% =		x 100%		= 13,6%	
			Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan							
b) Penjelasan IKK Output										
IKK OUTCOME			IKK OUTPUT							
			Penjelasan					Jumlah		
Persentase penanganan			1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Provinsi

1) IKK Outcome : Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\% =$	

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	$(100/N)\%$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	

3) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan

Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	
	<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i> x 100% =	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang diterbitkan	

4) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	
	<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i> x 100% =	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	

5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan

Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% =$	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	

6) IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri	

b) Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	
	Penjelasan	Jumlah
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan 1) kawasan industri lintas kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kab/Kota

1) IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\% =$	

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Provinsi

- IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kab/Kota

- IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		
	Penjelasan		Jumlah
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (perencanaan dan keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} =$	

2) IKK Outcome : Rasio PAD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur <i>tax ratio</i> atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\% =$	

4) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	Opini laporan keuangan	

5) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		

6) **IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat tingkat peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)		

II. **Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (perencanaan dan keuangan) Kab/Kota**

1) **IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan**

a) **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} =$	

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		

2) IKK Outcome : Rasio PAD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\% =$	

3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\% =$	

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Provinsi

1) IKK Outcome : Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\% = \frac{9,426}{1581} \times 100\% = 596\%$	

2) IKK Outcome : Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah}} \times 100\% = \frac{740}{5,421} \times 100\% = 13,6\%$	

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional}} \times 100\% = \frac{\quad}{740} \times 100\% =$	

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\% = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% =$	

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi

1) IKK Outcome : Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal		

2) IKK Outcome : Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal		

3) IKK Outcome : Assets Management

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada		

4) IKK Outcome : Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\% =$	

I. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / definisi	Rumus	Keterangan
Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di webste pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\% =$	

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap keuangan daerah

a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\% =$	

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kab/Kota

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

b) Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di webste pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\% =$	

2) IKK Outcome : Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

a) IKK Outcome : Akses publik terhadap keuangan daerah

Konsep / Definisi	Rumus	Keterangan
Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\% =$	



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telp. (0741) 61606 Fax. (0741) 62317
JAMBI - 36122

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, Maret 2021



FERDIANSYAH, S.STP., M.A.
Pembina
NIP. 19800701 199912 1 001



LPPD **2020**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

JAMBI 20
TUNTAS 21

TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL & SEJAHTERA